

LAPORAN TAHUNAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA TAHUN 2018



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
2019

KATA PENGANTAR

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2018, yang dijabarkan dalam Visi, Misi, Tujuan, serta Sasaran Program dan Kegiatan yang diemban Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai wujud pelaksanaannya.

Secara umum laporan ini menyajikan berbagai capaian kegiatan pembangunan Hortikultura sepanjang tahun 2018 pada masing-masing unit Eselon II dalam rangka mewujudkan program peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura. Namun demikian, laporan ini juga memuat permasalahan dan kendala dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung dalam pencapaian sasaran Direktorat Jenderal Hortikultura selama ini, baik dari pihak pemerintah maupun swasta.

Semoga Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2019
Direktur Jenderal Hortikultura,

Dr. Ir. Suwandi, M.Si.
NIP. 196703231992031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
I. PENDAHULUAN.....	8
1.1. Latar Belakang	8
1.2. Visi dan Misi.....	9
1.3. Tujuan dan Sasaran	9
1.4. Ruang Lingkup.....	15
II. KINERJA MAKRO SUBSEKTOR HORTIKULTURA TAHUN 2018	16
2.1. Produksi	16
2.2. Luas Panen	18
2.3. Produk Domestik Bruto (PDB)	20
2.4. Tenaga Kerja	21
2.5. Ekspor dan Impor Komoditas Pertanian	22
2.6. Nilai Tukar Petani	24
2.7. Konsumsi	25
III. CAPAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN HORTIKULTURA TAHUN 2018.....	28
3.1. Capaian Kegiatan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat	28
3.2. Capaian Kegiatan Direktorat Buah dan Florikultura	39
3.3. Capaian Kegiatan Direktorat Perbenihan Hortikultura	62
3.4. Capaian Kegiatan Direktorat Perlindungan Hortikultura	74
3.5. Capaian Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	99
3.6. Capaian Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura.....	108
IV. PENGELOLAAN ANGGARAN DAN SUMBERDAYA MANUSIA.....	121

4.1. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura	121
4.2. Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Hortikultura.....	123
V. PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT	125
5.1. Permasalahan	125
5.2. Upaya Tindak Lanjut.....	126
VI. PENUTUP.....	128
LAMPIRAN	130

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Target dan Realisasi Komoditas Untuk Peningkatan Produksi, Komoditas Ekspor, dan Substitusi Impor Tahun 2018	16
Tabel 2.	Perbandingan Luas Panen Komoditas Untuk Peningkatan Produksi, Komoditas Ekspor, dan Substitusi Impor Tahun 2018 dan 2017.	19
Tabel 3.	Kontribusi Subsektor Hortikultura dibanding Subsektor Lain Terhadap Sektor Pertanian Tahun 2018	20
Tabel 4.	Ekspor dan Impor Komoditas Hortikultura Tahun 2017 dan 2018	23
Tabel 5.	Konsumsi per Kapita Buah dan Sayur dalam Rumah Tangga Tahun 2018	25
Tabel 6.	Hasil Pencapaian Kinerja Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2018 ..	28
Tabel 7	Realisasi Rencana Kerja Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2018....	31
Tabel 8	Capaian Output Kegiatan Pengembangan Kawasan Jeruk per Lokasi Tahun 2018	39
Tabel 9	Capaian Output Kegiatan Pengembangan Kawasan Mangga Per Lokasi Tahun 2018.....	41
Tabel 10	Capaian Output Kegiatan Pengembangan Kawasan Manggis per Lokasi Tahun 2018.....	43
Tabel 11.	Capaian Output Kegiatan Pengembangan Kawasan Pisang per Lokasi Tahun 2018	45
Tabel 12.	Capaian Output Kegiatan Pengembangan Kawasan Durian per Lokasi Tahun 2018	48
Tabel 13.	Capaian Output Kegiatan Pengembangan Kawasan Salak di Magelang Tahun 2018.....	49
Tabel 14.	Capaian Output Kegiatan Pengembangan Kawasan Duku di Ogan Komering Ilir Tahun 2018	49
Tabel 15.	Capaian Output Kegiatan Pengembangan Kawasan Lengkeng per Lokasi Tahun 2018.....	51
Tabel 16.	Capaian Output Kegiatan Pengembangan Kawasan Srikaya di Gresik Tahun 2018	52
Tabel 17.	Capaian Output Kegiatan Pengembangan Kawasan Sukun di Sorong Tahun 2018	53
Tabel 18.	Capaian Output Kegiatan Pengembangan Kawasan Nenas di Prabumulih Tahun 2018.....	54

Tabel 19. Capaian Output Kegiatan Pengembangan Kawasan Pepaya per Lokasi Tahun 2018	57
Tabel 20. Capaian Output Kegiatan Pengembangan Kawasan Krisan per Lokasi Tahun 2018	58
Tabel 21. Capaian Output Kegiatan Pengembangan Kawasan Florikultura Lainnya per Lokasi Tahun 2018.....	60
Tabel 22. Realisasi Fisik dan Keuangan DPO 2018	75
Tabel 23. Realisasi Pelaksanaan Pengendalian OPT Cabai dan Bawang TA. 2018.....	78
Tabel 24. Hasil Pengujian Residu Pestisida pada Komoditas Buah Tahun 2018.....	88
Tabel 25. Realisasi Sertifikasi LPHP/LAH 2018*).....	98
Tabel 26. Realisasi Kegiatan Sertifikasi Standar, Mutu dan Pemasaran	101
Tabel 27. Realisasi Kegiatan Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah	103
Tabel 28. Pengukuran Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018	105
Tabel 29. Pengukuran Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018	107
Tabel 30. Realisasi Anggaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018 Berdasarkan Kewenangan.....	107
Tabel 31. Pencapaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018...	108
Tabel 32. Rekapitulasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2018.....	115
Tabel 33. Interpretasi Indeks Kepuasan Rata-rata	117
Tabel 34. Indeks Kepuasan Atas Layanan Unit Eselon III lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018	118
Tabel 35. Realisasi Kegiatan Utama Ditjen Hortikultura Tahun 2018	121
Tabel 36. Realisasi per Kewenangan Pusat dan Daerah Tahun 2018	123
Tabel 37. Komposisi Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Hortikultura Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018.....	124

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tenaga Kerja Hortikultura	22
Gambar 2. Nilai Tukar Petani Hortikultura Tahun 2018.....	25
Gambar 3. Pengembangan Kawasan Aneka Cabai	33
Gambar 4. Pengembangan Kawasan Bawang Merah.....	35
Gambar 5. Pengembangan Kawasan Bawang Putih.....	36
Gambar 6. Program #Bekerja	38
Gambar 7. Pengembangan Kawasan Jeruk.....	41
Gambar 8. Pengembangan Kawasan Mangga	43
Gambar 9. Pengembangan Kawasan Manggis	44
Gambar 10. Pengembangan Kawasan Pisang TA. 2018.....	46
Gambar 11. Pengembangan Kawasan Lengkeng	52
Gambar 12. Pengembangan Kawasan Srikaya.....	53
Gambar 13. Pengembangan Kawasan Sukun	54
Gambar 14. Pengembangan Kawasan Nenas TA. 2018.....	55
Gambar 15. Pengembangan Kawasan Pepaya TA. 2018	57
Gambar 16. Dokumentasi Pengembangan Kawasan Krisan	59
Gambar 17. Dokumentasi Pengembangan Kawasan Florikultura Lainnya	61
Gambar 18. Desa Pertanian Organik Bidang Hortikultura Tahun 2018	74
Gambar 19. Uji Preferensi Buah Inang Lalat Buah (<i>Bactrocera papayae</i> , <i>B. cucurbitae</i> dan <i>B. carambolae</i>) di Laboratorium VHT BBPOPT Jatisari, 2018.....	90
Gambar 20. Uji Perkembangan Larva Lalat Buah pada Buah Naga.....	91
Gambar 21. Kajian Pupasi Lalat Buah pada Berbagai Jenis Media Pupasi (serbuk kayu/gergaji, pasir dan	92
Gambar 22. Identifikasi Lalat Buah Hasil Pengambilan Sampel Dari Lapangan.....	92
Gambar 23. LPHP Narmada, Nusa Tenggara Barat dan Bandar Buat, Sumatera Barat yang telah disertifikasi ISO 9001 : 2015	98
Gambar 24. Grafik Hasil Penilaian AKIP Periode 2015 - 2017	111
Gambar 25. Capaian Nilai Kinerja berdasarkan aplikasi SMART	113

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Matrik Kinerja dan Pendanaan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2015 – 2019 (berdasarkan Renstra Kementerian Pertanian Revisi II Permentan No.68 Tahun 2017)	107
Lampiran 2 PK Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2018 (Revisi 3) .	114
Lampiran 3 Capaian Produksi Cabai Tahun 2018 Per Provinsi.....	115
Lampiran 4 Capaian Produksi Bawang Merah Tahun 2018 Per Provinsi.....	131
Lampiran 5 Capaian Produksi Bawang Putih Tahun 2018 Per Provinsi.....	138
Lampiran 6 Capaian Produksi Sayuran Dan Buah-Buahan Program #Bekerja Tahun 2018.....	142
Lampiran 7 Hasil Pengujian Analisa Residu Pestisida Pada Komoditas Cabai, Bawang Merah Dan Sayuran Lainnya	144

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tahun 2018 Direktorat Jenderal Hortikultura melaksanakan satu program yaitu Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Hortikultura. Program tersebut merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian. Selain itu, program tersebut merupakan kelanjutan dari program tahun sebelumnya sesuai Renstra 2014-2019. Kegiatan utama yang dilaksanakan dalam program di atas meliputi: 1) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat; 2) Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura; 3) Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura; 4) Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura; 5) Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura; dan 6) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

Kegiatan Ditjen Hortikultura pada tahun 2018 difokuskan pada komoditas untuk peningkatan produksi, ekspor dan substitusi impor. Komoditas untuk peningkatan produksi yaitu bawang merah dan aneka cabai. Komoditas ekspor yaitu mangga, manggis, nenas, pisang, salak, krisan, kentang, jamur, dan jahe. Sementara, komoditas substitusi impor yaitu jeruk dan bawang putih.

Dukungan anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2018 berupa APBN Sektoral. APBN Sektoral dialokasikan pada 104 Satker (1 Satker Pusat Ditjen Hortikultura, 34 Satker Dekonsentrasi, 33 Satker Tugas Pembantuan Provinsi, 36 Satker Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota).

Laporan Tahunan Ditjen Hortikultura Tahun 2018 disusun untuk memberikan gambaran terkait capaian kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura selama tahun 2018. Pokok-pokok materi didalamnya memuat capaian kinerja, pelaksanaan program kegiatan, realisasi serapan anggaran, serta permasalahan dan saran tindak lanjut.

1.2. Visi dan Misi

Visi Direktorat Jenderal Hortikultura adalah Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani Hortikultura.

Misi Direktorat Jenderal Hortikultura adalah:

- 1) Mewujudkan Ketahanan Pangan;
- 2) Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Hortikultura

1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Pembangunan Hortikultura adalah “Meningkatnya kesejahteraan petani hortikultura” dengan indikator tujuan sebagai berikut :

TUJUAN	Indikator tujuan	Target 2018
Meningkatnya kesejahteraan petani hortikultura	PDB hortikultura per jumlah tenaga kerja hortikultura	Rp 35 juta

Renstra Direktorat Hortikultura merupakan bagian dari Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Hortikultura secara berjenjang memangku tanggung jawab pencapaian beberapa Sasaran Strategis Kementerian Pertanian yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Indikator Sasaran Strategis/Indikator Sasaran Program Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS (Kode SS)	IKSS/IKSP	Satuan	Target 2018
Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional (SS3)	1 Pertumbuhan volume ekspor produk pertanian nasional	%	8,97
	a Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian hortikultura	%	2,83
	2 Penurunan volume impor untuk produk pertanian nasional	%	5,02
	b Penurunan volume impor untuk produk pertanian hortikultura	%	7,38
Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis nasional (SS4)	3 Rata-rata peningkatan produksi pangan strategis nasional	%	5,9
	a Produksi cabai	Ton	2,245,440
	b Produksi bawang merah	Ton	1,608,766
Tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai kebutuhan (SS8)	4 Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan (pra dan pasca panen)	%	66,3
	a Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (alsintan) berdasarkan	%	90

SASARAN STRATEGIS (Kode SS)	IKSS/IKSP	Satuan	Target 2018
	kebutuhan pascapanen hortikultura		
Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI serta penyakit pada hewan (SS9)	5 Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam	%	11,05
	a Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman hortikultura	%	5

1.4. Strategi

Strategi yang dikembangkan dalam mewujudkan tujuan pembangunan hortikultura 2015 – 2019 diuraikan secara lebih rinci sebagai berikut:

1. Peningkatan penyediaan benih aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lain:
 - 1.1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih;
 - 1.2. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih;
 - 1.3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih;
 - 1.4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih;

- 1.5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih;
2. Peningkatan produksi aneka jeruk, tanaman buah lain, serta florikultura melalui :
 - 2.1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon, tanaman terna dan tanaman merambat, serta florikultura;
 - 2.2. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon, tanaman terna dan tanaman merambat, serta florikultura;
 - 2.3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon, tanaman terna dan tanaman merambat, serta florikultura;
 - 2.4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon, tanaman terna dan tanaman merambat, serta florikultura;
3. Peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah, sayuran lain dan tanaman obat,
 - 3.1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat;
 - 3.2. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat;
 - 3.3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang

- merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat;
- 3.4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat;
- 3.5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat;
4. Pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura,
- 4.1. pengelolaan data dan informasi organisme pengganggu tumbuhan;
- 4.2. peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- 4.3. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, serta dampak perubahan iklim dan bencana alam;
- 4.4. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, serta dampak perubahan iklim dan bencana alam;
- 4.5. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, serta dampak perubahan iklim dan bencana alam;
- 4.6. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran

dan tanaman obat, serta dampak perubahan iklim dan bencana alam;

5. Peningkatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura

5.1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;

5.2. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;

5.3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;

5.4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;

5.5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;

5.6. koordinasi perumusan dan harmonisasi standar serta penerapan standar mutu di bidang hortikultura.

6. Peningkatan kualitas aparatur dan akuntabilitas layanan kelembagaan dalam Pengembangan Hortikultura

1.1. koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama di bidang hortikultura;

1.2. pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;

- 1.3. evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik;
- 1.4. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang hortikultura.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan dalam Laporan Tahunan Ditjen Hortikultura Tahun 2018 adalah kinerja pembangunan hortikultura baik terhadap ekonomi makro maupun capaian kinerja kegiatan pengembangan hortikultura tahun 2018. Hasil evaluasi ini merupakan salah satu bahan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan hortikultura pada tahun yang akan datang.

II. KINERJA MAKRO SUBSEKTOR HORTIKULTURA TAHUN 2018

2.1. Produksi

Produksi komoditas hortikultura tahun 2018 didasarkan pada angka sementara yang bersumber dari Direktorat Jenderal Hortikultura dan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) sedangkan target berdasarkan Renstra Kementerian Pertanian Revisi II (lampiran 1). Untuk lebih jelasnya, rincian komoditas untuk peningkatan produksi, komoditas ekspor dan substitusi impor disajikan pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Target dan Realisasi Produksi Komoditas Hortikultura Tahun 2018

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Target	Realisasi*	%
1.	Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis tanaman hortikultura			
	a. Produksi cabai	2.245.440	2.523.929	112,40
	b. Produksi bawang merah	1.608.766	1.498.659	93,16
2.	Terpenuhinya kebutuhan tanaman buah dan florikultura untuk ekspor dan substitusi impor (ton)			
	a. Mangga (ton)	1.991.004	2.585.854	129,88
	b. Nenas (ton)	1.481.131	1.683.577	113,67
	c. Manggis (ton)	175.136	228.547	130,50
	d. Salak (ton)	778.779	892.075	114,55
	e. Pisang (ton)	7.105.914	6.865.555	96,62
	f. Jeruk (substitusi impor/ton)	2.301.651	2.279.796	99,05
	g. Krisan (tangkai)	441.367.161	498.227.249	112,88
3	Terpenuhinya tanaman sayuran dan tanaman obat untuk komoditas ekspor dan substitusi impor			
	a. Kentang (ton)	1.471.828	1.278.771	86,88
	b. Jamur (ton)	40.176	31.280	77,86
	c. Jahe (ton)	343.753	434.355	126,36
	d. Bawang putih (substitusi impor/ton)	109.494	39.238	35,84

Sumber : Ditjen Hortikultura dan BPS RI, 2019

Keterangan : *) Angka Sementara 2018

Berdasarkan Tabel 1, rata-rata realisasi produksi melebihi target, baik komoditas untuk peningkatan produksi maupun pada komoditas ekspor dan substitusi impor. Namun, data yang disajikan pada Tabel 1 adalah angka sementara sehingga masih ada kemungkinan untuk berubah. Komoditas untuk peningkatan produksi yaitu bawang merah dan aneka cabai yang juga merupakan pengendali inflasi. Oleh karenanya, pengembangan dua komoditas tersebut dengan menerapkan manajemen pola tanam guna menjaga stabilitas produksi dan harga terutama pada Hari Besar Keagamaan Nasional dan Tahun Baru sangat penting.

Peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat untuk komoditas kentang, jahe dan jamur didukung oleh swadaya pelaku usaha. Tingginya kebutuhan konsumsi dan besarnya permintaan ekspor untuk komoditas kentang, jahe dan jamur merupakan suatu peluang untuk dilakukan peningkatan produksi. Dengan melihat peluang tersebut, pelaku usaha melakukan budidaya secara swadaya sehingga produksi komoditas tersebut dapat meningkat dan dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Peningkatan produksi untuk komoditas kentang, jahe dan jamur tidak lepas dari dukungan pemerintah melalui aspek regulasi dan kemitraan yang mendukung berkembangnya usahatani sayuran dan tanaman obat serta pembinaan dan monitoring dari pemerintah.

Capaian kinerja sasaran strategis yang masuk dalam kategori sangat berhasil atau memenuhi target adalah produksi cabai (112,40%), mangga (129,88%), nenas (113,67%), manggis (130,50%), salak (114,55%), krisan (112,88%), dan jahe (126,36%), sementara komoditas yang berhasil atau mendekati target adalah indikator kinerja produksi bawang merah (93,16%). Disamping itu, untuk target kinerja sasaran strategis berkembangnya komoditas bernilai tambah dan berdaya saing juga belum sepenuhnya tercapai sesuai harapan. Indikator kinerja yang mendekati target atau berhasil adalah produksi pisang (96,62%), jeruk (99,05%), dan kentang (86,88%). Sementara, indikator produksi yang jauh di bawah target yang ditetapkan/cukup berhasil adalah bunga tabur (78,47%), dan jamur (77,86%), sedangkan indikator kinerja yang kurang berhasil adalah produksi bawang putih (35,84%).

Realisasi produksi bawang putih rendah dikarenakan pengembangan kawasan bawang putih melalui fasilitasi dana APBN hanya 5.493 Ha dan terealisasi 5.434 Ha. Sementara itu, apabila mengacu pada *Roadmap Pengembangan Bawang Putih 2016-2045* untuk dapat mencapai target produksi sebesar 109.494 ton maka luas tanam harus mencapai 11.000 Ha dengan produktivitas rata-rata 11,82 ton/ha.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengembangan kawasan bawang putih melalui fasilitasi dana APBN belum dapat terealisasi 100% karena mengalami beberapa kendala, diantaranya ketersediaan benih, sehingga di beberapa satker dilakukan lelang ulang. Adanya lelang ulang menyebabkan mundurnya realisasi tanam, dimana beberapa daerah melakukan realisasi tanam pada akhir bulan Desember dan bahkan ada yang mundur sampai bulan Januari karena menunggu musim hujan. Selain itu, pertanaman yang dilakukan importir ada kemungkinan tidak tercatat.

Faktor lain penyebab tidak tercapainya target produksi buah, sayuran, tanaman obat dan tanaman hias adalah masih adanya dampak perubahan iklim yang tidak menentu dengan frekuensi curah hujan yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan proses pembungaan terhambat dan rontok sebelum menjadi buah. Selain itu, adanya serangan OPT juga menyebabkan produksi turun.

2.2. Luas Panen

Kegiatan ekstensifikasi melalui pengembangan kawasan dilakukan di daerah sentra produksi dan daerah potensi. Hal ini untuk menjaga stabilitas produksi dan harga di seluruh daerah di Indonesia. Berdasarkan angka sementara, luas panen komoditas untuk peningkatan produksi, komoditas ekspor dan substitusi impor disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Perbandingan Luas Panen Komoditas Untuk Peningkatan Produksi, Komoditas Ekspor, dan Substitusi Impor Tahun 2018 dan 2017.

No.	Komoditas	Luas Panen (Ha)		Pertumbuhan (%)
		2018 *	2017	
1.	Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis tanaman hortikultura			
	a. Cabai	305.623	310.147	- 1.46
	b. Bawang merah	156.151	158.172	- 1.28
2.	Terpenuhinya kebutuhan tanaman buah dan florikultura untuk ekspor dan substitusi impor (ton)			
	a. Mangga	200.219	201.080	- 0.43
	b. Nenas	19.472	21.274	- 8.47
	c. Manggis	20.974	18.058	16.15
	d. Salak	19.005	23.887	- 20.44
	e. Pisang	80.975	89.615	- 9.64
	f. Jeruk (substitusi impor)	46.118	56.758	- 18.75
	g. Krisan	885	1.164	- 23.97
3	Terpenuhinya tanaman sayuran dan tanaman obat untuk komoditas ekspor dan substitusi impor			
	a. Kentang	67.906	75.611	- 10.19
	b. Jamur	434	475	- 8.63
	c. Jahe	30.055	10.556	184.72
	d. Bawang putih (substitusi impor)	5.000	2.146	132.99

Sumber : Ditjen Hortikultura dan BPS RI, 2019

Keterangan: *) Angka Sementara 2018

Berdasarkan Tabel 2 komoditas untuk peningkatan produksi yang menurun pertumbuhan luas panennya adalah cabai sebesar 1,46 % dan bawang merah sebesar 1,28%. Komoditas promosi ekspor yang pertumbuhan luas panen turun adalah mangga (0,43%), nenas (8,47%), salak (20,44%), pisang (9,64%), krisan (23,97%), kentang (10,19%) dan jamur (8,63%), sedangkan komoditas substitusi impor yang pertumbuhan luas panennya naik adalah bawang putih (132,99%) dan jeruk pertumbuhan luas panennya turun sebesar 18,75%.

2.3. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto yang digunakan disini adalah Produk Domestik Bruto Subsektor Hortikultura. Produk Domestik Bruto dibagi dua yaitu Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Perbedaan keduanya adalah Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku digunakan untuk menghitung kontribusi sedangkan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Pada laporan tahunan ini digunakan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018. Data Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) berdasarkan angka sangat sementara. Untuk melihat kontribusi subsektor hortikultura dibanding subsektor lain terhadap sektor pertanian Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Kontribusi Subsektor Hortikultura dibanding Subsektor Lain Terhadap Sektor Pertanian Tahun 2018

No.	Subsektor	Miliar (Rp)*	Kontribusi (%)
1	Tanaman Pangan	449.822	24,02
2	Tanaman Hortikultura	218.712	11,68
3	Tanaman Perkebunan	489.249	26,12
4	Peternakan	231.711	12,37
5	Kehutanan	97.338	5,20
6	Perikanan	385.936	20,61
	Sektor Pertanian	1.464.432	100,00

Sumber : BPS RI, 2019

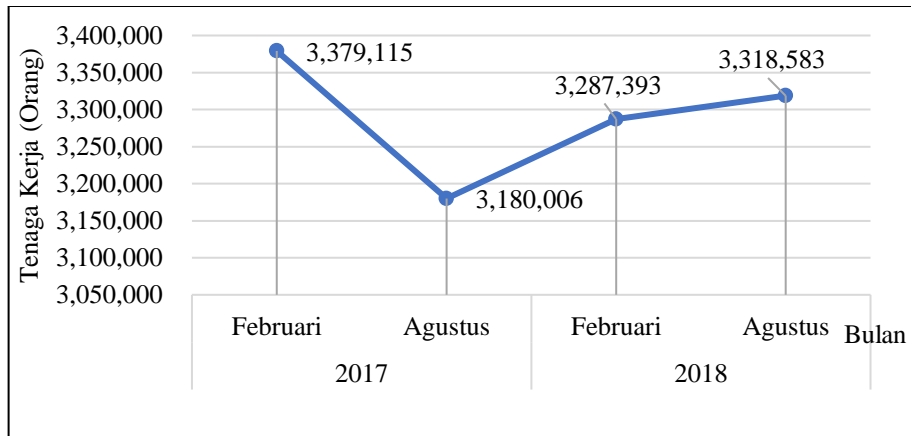
Keterangan: *) Angka Sangat Sementara 2018

Berdasarkan Tabel 3, kontribusi subsektor hortikultura (11,68%) menempati peringkat kelima dari enam subsektor di sektor pertanian setelah tanaman perkebunan (26,12%), tanaman pangan (24,02%), perikanan (20,61%), dan peternakan (12,37%). Masih rendahnya kontribusi subsektor hortikultura disebabkan oleh masih kurangnya promosi untuk komoditas ekspor sehingga berdampak pada rendahnya pendapatan di subsektor hortikultura. Selain itu, yang tak kalah pentingnya untuk meningkatkan PDB subsektor hortikultura adalah dengan mengurangi impor.

Dalam beberapa tahun terakhir kegiatan lebih ditekankan pada peningkatan produksi guna memenuhi kebutuhan dalam negeri seperti pada komoditas cabai dan bawang merah. Sementara, untuk komoditas promosi ekspor seperti mangga, manggis, nenas, salak, pisang, kentang, jamur, jahe dan krisan perlu mendapat perhatian khusus dalam meningkatkan produksinya. Caranya dengan melakukan kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi serta dengan melakukan pembinaan kepada petani tentang cara berbudi daya yang baik dan benar sesuai SOP.

2.4. Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang dimaksud disini adalah tenaga kerja yang bekerja di subsektor hortikultura. Untuk data tenaga kerja, BPS RI setiap tahun melakukan dua kali pencatatan yaitu bulan Februari dan Agustus. Khusus tahun 2018, penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja di subsektor hortikultura pada bulan Agustus 2018 sebesar 3.318.583 orang dibanding bulan Februari 2018 sebesar 3.287.393 orang atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,95%. Apabila dibandingkan secara *year to year* bulan Februari 2018 terhadap bulan Februari 2017 mengalami pertumbuhan sebesar -2,71%. Tetapi, bulan Agustus 2018 terhadap bulan Agustus 2017 mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar 4,36%. Rincian lengkapnya bisa dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS RI, 2019

Gambar 1. Tenaga Kerja Hortikultura

2.5. Ekspor dan Impor Komoditas Pertanian

Ekspor dan impor komoditas subsektor hortikultura mencakup produk segar dan olahan. Data ekspor dan impor menggunakan kode *Harmonized System* (HS) tahun 2018 dengan komoditas ekspor utama yaitu mangga, manggis, nenas, pisang, salak, kentang, jamur, jahe dan krisan. Sedangkan data impor meliputi komoditas jeruk dan bawang putih, kedua komoditas ini merupakan komoditas substitusi impor. Untuk melihat volume dan nilai ekspor dan impor komoditas sub sektor hortikultura tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Ekspor dan Impor Komoditas Hortikultura Tahun 2017 dan 2018

No.	Komoditas	2017		2018		Pertumbuhan (%)	
		Vol (Ton)	Nilai (US\$)	Vol (Ton)	Nilai (US\$)	Volume	Nilai
	Ekspor						
1	Mangga	2.655	2.045.833	2.518	2.511.095	-5,16	22,74
2	Manggis	9.190	4.035.901	32.170	27.953.516	250,07	592,62
3	Nanas	210.026	241.988.457	211.316	178.362.986	0,61	-26,29
4	Pisang	18.193	8.878.504	26.935	13.228.502	48,05	48,99
5	Salak	966	1.546.533	1.148	1.306.071	18,83	-15,55
6	Kentang	5.210	4.342.693	4.746	4.278.523	-8,91	-1,48
7	Jamur	3.029	6.181.318	3.872	6.722.803	27,84	8,76
8	Jahe	24.359	13.954.416	3.071	3.361.783	-87,39	-75,91
9	Krisan	61	866.553	57	780.716	-6,65	-9,91
	Impor						
1	Jeruk	120.355	175.358.956	95.967	153.310.740	-20,26	-12,57
2	Bawang Putih	559.728	596.005.423	587.942	507.701.456	5,04	-14,82

Sumber : BPS RI, 2019

Keterangan: *) Angka Sementara 2018

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa komoditas yang mengalami penurunan pertumbuhan volume ekspor adalah mangga (5,16%), kentang (8,91%), jahe (87,39%), dan krisan (6,65%). Sementara komoditas substitusi impor yang menurun pertumbuhan volume impornya adalah jeruk (20,26%). Menurunnya volume dan nilai ekspor komoditas hortikultura antara lain dipengaruhi oleh nilai tukar, pertumbuhan ekonomi dunia, harga komoditas dunia dan kebijakan perdagangan suatu negara. Namun, menurunnya nilai tukar tidak langsung dapat meningkatkan nilai ekspor jika kualitas produk tidak dapat ditingkatkan sesuai dengan permintaan pasar ekspor. Dalam rangka meningkatkan nilai ekspor, pemerintah Indonesia harus melakukan peningkatan kualitas dan variasi produk serta mencari pangsa pasar baru. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan subsidi kepada komoditas ekspor.

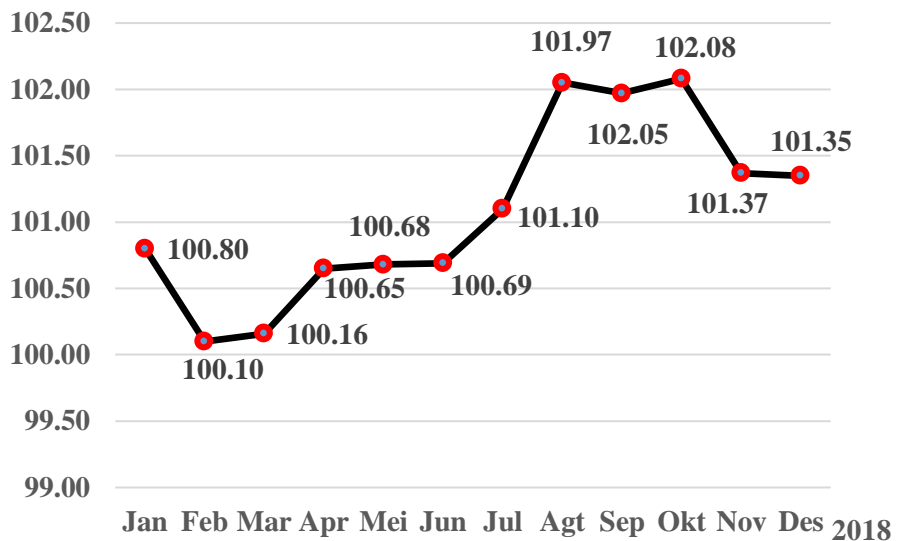
Direktorat Jenderal Hortikultura selain berusaha meningkatkan ekspor komoditas hortikultura, juga berusaha menurunkan impor untuk 2 (dua)

komoditas yaitu jeruk dan bawang putih. Untuk jeruk mengalami penurunan sebesar 20,26 % pada tahun 2018 seiring dengan semakin meningkatnya produksi jeruk dalam negeri sebagai komoditas substitusi impor. Peningkatan produksi jeruk dilakukan dengan melakukan pengembangan kawasan jeruk sehingga dapat mencukupi kebutuhan dan konsumsi masyarakat Indonesia, sekaligus sebagai substitusi impor.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi impor produk hortikultura adalah dengan membina petani untuk membudidayakan komoditas impor, pemberian subsidi dan adanya jaminan harga jual sangat diharapkan dalam mendorong petani untuk membudidayakan komoditas hortikultura. Pemberlakuan sistem kuota impor juga sangat membantu petani dalam menghadapi serbuan produk impor yang jauh lebih murah dibanding produk dalam negeri.

2.6. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk dapat mengukur tingkat kesejahteraan petani. NTP adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks yang dibayarkan petani (Ib) dalam persentase. Secara konseptual, NTP adalah pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani dengan barang/jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian. Untuk lebih jelasnya, NTP tahun 2018 seperti pada Gambar 2 berikut.



Sumber : BPS RI 2019, diolah

Gambar 2. Nilai Tukar Petani Hortikultura Tahun 2018

Nilai tukar petani dari bulan Januari sampai Desember 2018 cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani meningkat seiring dengan meningkatnya nilai tukar petani hortikultura.

2.7. Konsumsi

Konsumsi komoditas hortikultura yang dimaksud adalah konsumsi per kapita buah dan sayur dalam rumah tangga setahun. Data konsumsi diperoleh dari BPS melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Rincian data konsumsi per kapita buah dan sayur tahun 2018 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 5. Konsumsi per Kapita Buah dan Sayur dalam Rumah Tangga Tahun 2018

Buah	2018	Sayur	2018
Jeruk		Bayam	
- Kuantitas (Kg)	3,34	- Kuantitas (Kg)	3,29
		Kangkung	
Mangga		- Kuantitas (Kg)	3,96

Buah	2018	Sayur	2018
- Kuantitas (Kg)	0,57	Kol/kubis	
		- Kuantitas (Kg)	1,45
Alpoket		Sawi Putih(Petsai)	
- Kuantitas (Kg)		- Kuantitas (Kg)	1,05
Rambutan		Sawi Hijau	
- Kuantitas (Kg)	5,42	- Kuantitas (Kg)	1,43
Duku		Buncis	
- Kuantitas (Kg)	5,48	- Kuantitas (Kg)	0,92
Durian		Kacang Panjang	
- Kuantitas (Kg)	2,14	- Kuantitas (Kg)	2,35
Salak		Tomat sayur	
- Kuantitas (Kg)	2,03	- Kuantitas (Kg)	0,24
Nanas		Wortel	
- Kuantitas (Kg)		- Kuantitas (Kg)	1,30
Pisang Ambon		Mentimun	
- Kuantitas (Kg)	2,03	- Kuantitas (Kg)	1,97
Pisang Raja		Daun Ketela Pohon	
- Kuantitas (Kg)		- Kuantitas (Kg)	2,77
Pisang lainnya		Terong	
- Kuantitas (Kg)	57,88	- Kuantitas (Kg)	2,67
Pepaya		Tauge	
- Kuantitas (Kg)	2,76	- Kuantitas (Kg)	3,14
		Labu	
Jambu		- Kuantitas (Kg)	-
- Kuantitas (Kg)		- Jagung muda kecil	
		- Kuantitas (Kg)	-
Sawo			
- Kuantitas (Kg)		- Sayur sop/cap cay	
		- Kuantitas (Bungkus)	8,54
Buah	2018	Sayur	2018
Belimbing			
- Kuantitas (Kg)		- Sayur asam/lodeh	
		- Kuantitas (Bungkus)	4,58
Semangka			
- Kuantitas (Kg)	1,46	Nangka muda	
		- Kuantitas (Kg)	0,55

Buah	2018	Sayur	2018
Nangka			
- Kuantitas (Kg)		- Pepaya muda	
		- Kuantitas (Kg)	1,09
		Jamur	
		- Kuantitas (Ons)	-
		Petai	
		- Kuantitas (Ons)	-
		Jengkol	
		- Kuantitas (Kg)	0,44
		Bawang merah	
		- Kuantitas (Kg)	2,76
		Bawang putih	
		- Kuantitas (Kg)	1,72
		Cabe merah	
		- Kuantitas (Kg)	0,18
		Cabe hijau	
		- Kuantitas (Kg)	0,04
		Cabe rawit	
		- Kuantitas (Kg)	0,18
		Sayur dalam kaleng	
		- Kuantitas (Kg)	-
		Lainnya sayur-sayuran	
		- Kuantitas (Kg)	2,29

Sumber : BPS RI, 2019

Tabel 5 menunjukkan bahwa konsumsi per kapita rumah tangga dalam setahun untuk buah seperti jeruk (3,34 kg), mangga (0,57 kg), salak (2,03 kg), sedangkan konsumsi per kapita rumah tangga dalam setahun untuk sayur seperti bawang merah (2,76 kg), bawang putih (1,72 kg), cabe merah (0,18 kg), cabai hijau (0,04 kg) dan cabai rawit (0,18 kg).

III. CAPAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN HORTIKULTURA TAHUN 2018

3.1. Capaian Kegiatan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat

Pengukuran realisasi indikator kinerja Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 6. Hasil Pencapaian Kinerja Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target* (Ton)	Realisasi** (Ton)	(%)	Kategori
1. Terpenuhiya kebutuhan tanaman hortikultura strategis nasional	1. Produksi Cabai (Ton)	2.245.440	2.523.929	112,40	Sangat Berhasil
	2. Produksi Bawang Merah (Ton)	1.608.766	1.498.659	93,16	Berhasil
2. Terpenuhiya kebutuhan tanaman sayuran dan tanaman obat untuk komoditas ekspor dan pengendali impor	3. Produksi kentang untuk komoditas ekspor (Ton)	1.471.828	1.278.771	86,88	Berhasil
	4. Produksi jahe untuk komoditas ekspor (Ton)	343.753	434.355	126,36	Sangat Berhasil
	5. Produksi jamur untuk komoditas ekspor (Ton)	40.176	31.280	77,86	Cukup Berhasil
	6. Produksi bawang putih untuk komoditas substitusi impor (Ton)	109.494	39.238	35,84	Kurang Berhasil

Sumber: Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, 2019

Keterangan: *) Berdasarkan angka dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dit. Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2018 revisi-3

**) Berdasarkan angka sementara 2018

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian kinerja Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat dapat dikatakan berhasil dari 6 (enam) indikator kinerja Tahun 2018, menghasilkan capaian kinerja sebesar 99,77%. Hasil pencapaian peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat dilakukan melalui dukungan dana APBN melalui Tugas Pembantuan Provinsi dan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota, pelaku usaha dan swadaya masyarakat.

Peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat yang telah difasilitasi melalui dukungan dana APBN terutama untuk pengembangan kawasan aneka cabai, kawasan bawang merah, kawasan sayuran lainnya, serta kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan. Rincian realisasi target pengembangan kawasan melalui dukungan dana APBN dapat dilihat pada Tabel 7 dan sesuai PK Revisi 3 (lampiran 2).

Peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat untuk komoditas kentang, jahe dan jamur didukung oleh swadaya pelaku usaha. Tingginya kebutuhan konsumsi dan besarnya permintaan ekspor untuk komoditas kentang, jahe dan jamur merupakan suatu peluang untuk dilakukan peningkatan produksi. Melihat peluang tersebut pelaku usaha melakukan budidaya secara swadaya sehingga produksi komoditas tersebut dapat meningkat dan dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Peningkatan produksi untuk komoditas kentang, jahe dan jamur tidak lepas dari dukungan pemerintah melalui aspek regulasi dan kemitraan yang mendukung berkembangnya usahatani sayuran dan tanaman obat serta pembinaan dan monitoring dari pemerintah.

Produksi cabai pada tahun 2018 sebesar 2.523.929 ton atau 112,40 % dari target sebesar 2.245.440 ton, sehingga dapat dikatakan sangat berhasil. Produksi bawang merah terealisasi 1.498.659 ton atau 93,16% dari target 1.608.766 ton, sehingga dapat dikatakan berhasil. Produksi kentang untuk komoditas ekspor terealisasi 1.278.771 ton atau 86,88% dari target 1.471.828 ton, sehingga dapat dikatakan berhasil. Produksi

jahe untuk komoditas ekspor terealisasi 434.355 ton atau 126,36% dari target 343.753 ton, sehingga dapat dikatakan sangat berhasil. Produksi jamur untuk komoditas ekspor terealisasi 31.280 ton atau 77,86% dari target 40.176 ton, sehingga dapat dikatakan cukup berhasil. Produksi bawang putih untuk komoditas substitusi impor terealisasi 39.238 ton atau 35,84% dari target 109.494 ton, sehingga dapat dikatakan kurang berhasil.

Realisasi target produksi bawang putih rendah dikarenakan pengembangan kawasan bawang putih melalui fasilitasi dana APBN hanya 5.949 Ha dan terealisasi 5.451 Ha. Sementara itu, apabila mengacu pada *Roadmap* Pengembangan Bawang Putih 2016-2045 untuk dapat mencapai target produksi sebesar 109.494 ton luas tanam harus mencapai 11.000 Ha dengan produktivitas rata-rata 11,82 ton/ha.

Dalam pelaksanaannya kegiatan pengembangan kawasan bawang putih melalui fasilitasi dana APBN belum dapat terealisasi 100% karena mengalami beberapa kendala, diantaranya ketersediaan benih, sehingga di beberapa satker dilakukan lelang ulang. Adanya lelang ulang menyebabkan mundurnya realisasi tanam, dimana beberapa daerah melakukan realisasi tanam pada akhir bulan Desember dan bahkan ada yang mundur sampai bulan Januari karena menunggu musim hujan. Selain itu, pertanaman yang dilakukan importir ada kemungkinan tidak tercatat.

Apabila dibandingkan dengan data SPH Tahun 2017 maka produksi bawang putih mengalami kenaikan yang cukup signifikan, pada tahun 2017 produksi bawang putih sebesar 19.510 Ton sedangkan pada tahun 2018 naik menjadi 39.238 ton. Produksi pada tahun 2018 berasal dari luas panen sebesar 5.000 Ha dan apabila dibandingkan dengan data 2017 luas panen tersebut naik 2 (dua) kali lipat dimana luas panen tahun 2017 adalah seluas 2.146 Ha. Sedangkan luas tanam pada tahun 2018 adalah seluas 8.015 Ha, dimana naik lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan luas tanam tahun 2017 yaitu seluas 3.274 Ha.

Pada tahun 2018 produksi naik namun produktivitas tidak setinggi tahun 2017 karena banyaknya daerah pengembangan baru, dan sebagian besar petani merupakan petani baru yang belum terbiasa menanam bawang putih sehingga produktivitasnya sangat beragam. Pada tahun 2017 pengembangan kawasan bawang putih melalui fasilitasi dana APBN hanya ada di 5 kabupaten/kota, sedangkan pada tahun 2018 pengembangan kawasan bawang putih melalui fasilitasi dana APBN ada di 70 kabupaten/ kota.

Tabel 7. Realisasi Rencana Kerja Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator	Target awal* (Ha)	Target setelah refocusing (Ha)	Realisasi (Ha)	(%)
Terpenuhinya kebutuhan konsumsi aneka cabai, bawang merah, sayuran lainnya	1. Kawasan Aneka Cabai	13.500 (Cabai Besar 6.125 Ha, Cabai Rawit Merah 7.375 Ha)	13.055	13.005	99,62
	2. Kawasan Bawang Merah	600 Ha (Benih Umbi 5.800 Ha, Benih Biji 200 Ha)	5.493	5.434	98,93
	3. Kawasan Sayuran Lainnya	7.017 Ha (Bawang Putih)			
	a. Bawang Putih		5.949	5.451	91,62
	b. #Bekerja Berbasis Hortikultura		1.764	1.243,27	70,48
	Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat di Wilayah Perbatasan	500	25	25	100

Sumber : Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, 2018

Keterangan: *) Berdasarkan RKT Dit. Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2018

3.1.1 Pengembangan Kawasan Aneka Cabai

Pengembangan kawasan aneka cabai tahun 2018 terdapat pada 33 (tiga puluh tiga) Satker Provinsi dan 266 (dua ratus enam puluh enam) Satker Kabupaten (lampiran 3). Target pengembangan kawasan aneka cabai pada tahun 2018 adalah 13.055 Ha dan realisasinya mencapai 13.005 Ha.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian kinerja Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat menunjukkan indikator keberhasilan “Berhasil” karena realiasi output kawasan aneka cabai yang dicapai adalah 99,62%. Khusus untuk Provinsi Kep. Bangka Belitung, pengembangan kawasan cabai besar seluas 50 Ha yang dialokasikan ke Kab. Belitung 20 Ha, Kab. Bangka 10 ha dan Kab. Bangka Tengah 20 Ha, tidak dilaksanakan karena terjadi gagal lelang dan sudah kehabisan waktu untuk melelang kembali.

Beberapa kegiatan yang mendukung pengembangan kawasan aneka cabai yang dilaksanakan oleh Pusat adalah:

1. Koordinasi Peningkatan Produksi Kawasan Aneka Cabai, dilaksanakan pada tanggal 6-9 Februari 2018 di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.
2. Koordinasi Ketersediaan Cabai Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, dilaksanakan pada tanggal 1-2 November 2018 di Kota Yogyakarta, DI.Yogyakarta.

Pengembangan kawasan aneka cabai masih sangat perlu ditingkatkan untuk meningkatkan produksi cabai nasional. Tujuannya adalah untuk mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat terutama dalam menghadapi hari besar keagamaan nasional dan dapat berorientasi ekspor. Berikut beberapa contoh pengembangan kawasan aneka cabai.



Pengembangan Kawasan Cabai di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat



Pengembangan Kawasan Cabai di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung



Pengembangan Kawasan Cabai di Kabupaten Kulon Progo, DIY



Pengembangan Kawasan Cabai di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah



Pengembangan Kawasan Cabai di Kabupaten HSS, Kalimantan Selatan



Pengembangan Kawasan Cabai di Kabupaten Lombok Tengah, NTB

Gambar 3. Pengembangan Kawasan Aneka Cabai

3.1.2 Pengembangan Kawasan Bawang Merah

Target pengembangan kawasan bawang merah pada tahun 2018 sebanyak 5.493 ha, sedangkan realisasinya mencapai 5.434 ha atau 98,93% (lampiran 4).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan konfirmasi yang telah dilakukan langsung ke daerah, pencapaian kinerja Pengembangan Kawasan Bawang Merah dapat dikatakan berhasil dengan capaian 98,93% target output dapat tercapai. Persentase output capaian kinerja pada tahun ini lebih tinggi daripada tahun lalu yang mencapai 97%. Dalam pelaksanaan pengembangan kawasan bawang merah masih dihadapkan pada kendala di lapangan seperti harga benih yang sempat tinggi sehingga Satker di luar Pulau Jawa menanggung beban ongkos kirim yang cukup tinggi. Pengembangan kawasan bawang merah dianggap sangat perlu untuk meningkatkan produksi bawang merah nasional. Tujuannya adalah untuk ketersediaan produksi bawang merah merata sepanjang tahun sehingga kebutuhan konsumsi masyarakat tercukupi, adanya kestabilan harga di tingkat produsen dan konsumen dan peningkatan ekspor.

Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat mendorong pengembangan bawang merah biji (TSS). Untuk kegiatan pengembangan bawang merah biji diharapkan mendapat pendampingan khusus dikarenakan petani bawang merah masih terbiasa menggunakan benih umbi.



Kawasan Bawang Merah di Kabupaten Bangli Menjelang Panen



Bawang Merah Siap Panen di Kabupaten Solok



Bawang Merah Biji Varietas Lokananta Umur 21 HST



Hasil Panen Bawang Merah Biji di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi

Gambar 4. Pengembangan Kawasan Bawang Merah

3.1.3 Pengembangan Kawasan Sayuran Lainnya

Target pengembangan kawasan sayuran lainnya adalah sebesar 7.713 Ha. Program pengembangan kawasan sayuran lainnya terdiri dari program pengembangan kawasan bawang putih dan program #Bekerja Berbasis Hortikultura. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan konfirmasi yang telah dilakukan langsung ke daerah realisasi kawasan bawang putih mencapai 5.451 Ha atau 91,62% dan program #Bekerja mencapai 1.243,27 Ha atau

70,48%. Berikut rincian per komoditas untuk pengembangan kawasan sayuran lainnya.

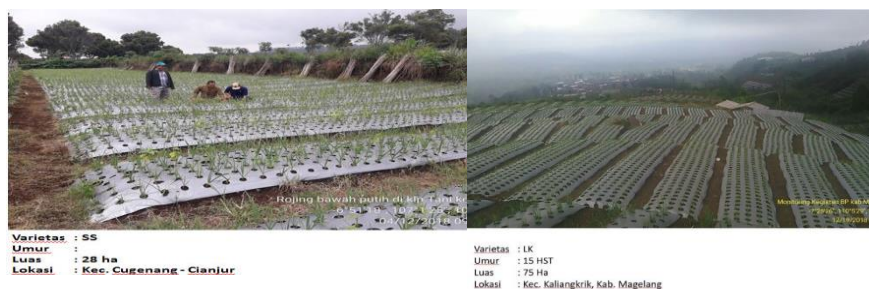
1) Bawang Putih

Pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan bawang putih secara umum terkendala ketersediaan benih, sehingga di beberapa satker dilakukan lelang ulang. Adanya informasi dugaan benih oplosan yang terjadi di Cilacap, Donggala, dan Bener Meriah membuat tingkat kehati-hatian Dinas Pertanian lebih tinggi. Selain itu, beberapa daerah seperti Timor Tengah Selatan (NTT), Tegal (Jawa Tengah) dan Bantaeng (Sulawesi Selatan) mengembalikan sebagian anggaran karena sudah melewati musim tanam dan benih tidak sesuai dengan spesifikasi teknis (lampiran 5).



Kawasan Bawang Putih di Kabupaten Bandung

Kawasan Bawang Putih di Kabupaten Solok



Kawasan Bawang Putih di Kabupaten Cianjur

Kawasan Bawang Putih di Kabupaten Magelang

Gambar 5. Pengembangan Kawasan Bawang Putih

2) Program #Bekerja (Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera)

Program #Bekerja Berbasis Hortikultura tahun 2018 diberikan pada 190.000 RTM-P di 10 (sepuluh) Satker Provinsi dan 22 (dua puluh tiga) Satker Kabupaten (lampiran 6). Target pengembangan buah 2.356 Ha dan sayuran 1.764 Ha dan dengan total keseluruhan 4.120 Ha.

Alokasi bantuan program #BEKERJA berbasis hortikultura mengacu pada lokasi Program #BEKERJA Kementerian Pertanian TA. 2018 yaitu di 10 provinsi pada 22 kabupaten. Kegiatan Ditjen Hortikultura terintegrasi dengan kegiatan dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) selaku *leading sector* program bekerja. Target RTM penerima manfaat sebanyak 190.000 RTM. Bantuan yang diberikan kepada RTM berupa sarana produksi (benih dan pupuk) untuk pengembangan kawasan hortikultura seluas 4.120 ha yang terdiri dari pengembangan buah seluas 2.356 ha dan sayuran seluas 1.764 ha. Sampai dengan akhir Desember 2018 capaian realisasi fisik pengembangan hortikultura seluas 2.740,94 ha (66,53%) terdiri dari pengembangan buah seluas 1.497,67 ha (63,57%) dan pengembangan sayuran seluas 1.243,27 ha (70,48%).

Capaian realisasi fisik tidak memenuhi target yang ditetapkan, hal ini disebabkan sebagai berikut :

1. Program #BEKERJA berbasis hortikultura tidak dilaksanakan oleh 4 kabupaten yaitu: Indramayu, Banyumas, Purbalingga dan Jember. Hal ini disebabkan Dinas Pertanian yang menangani hortikultura kondisi internalnya yang tidak kondusif, sehingga kurang merespon program bekerja hortikultura dan terbatasnya SDM.

2. Program dimulai pada pertengahan tahun sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan benih buah bersertifikat yang jumlahnya terbatas khususnya komoditi pisang.
3. Pengembangan hortikultura memerlukan persyaratan untuk tanaman tumbuh optimal, yaitu ketersediaan air, lahan dan agroklimat.
4. Keterbatasan waktu untuk proses lelang terutama untuk kabupaten yang dikelola oleh satker provinsi. Untuk lelang cepat juga terkendala di aplikasi dan SDM di Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.



Program #Bekerja di Jawa Barat Program #Bekerja di Jawa Tengah

Gambar 6. Program #Bekerja

3) Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat di Wilayah Perbatasan

Target pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan pada awalnya adalah seluas 500 Ha di 6 Provinsi. Namun pada bulan Juli dilakukan *refocusing* anggaran dimana anggaran untuk Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat di Wilayah Perbatasan dialihkan menjadi Program #Bekerja sehingga target yang semula 500 Ha turun

menjadi 25 Ha yang dilaksanakan di satu provinsi. Provinsi tersebut adalah Sulawesi Utara dengan lokasi kegiatan di Kabupaten Sangihe Talaud, dimana sebelum dilakukan *refocusing*, Kabupaten Sangihe Talaud sudah melaksanakannya sehingga anggarannya tidak dialihkan untuk Program #Bekerja. Untuk provinsi atau kabupaten yang mendapat anggaran perbatasan karena belum melaksanakan maka anggaran yang ada dialihkan untuk Program #Bekerja. Adapun realisasi kegiatan pengembangan Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat di Wilayah Perbatasan Kabupaten Sangihe Talaud sebesar 25 Ha atau 100%.

3.2. Capaian Kegiatan Direktorat Buah dan Florikultura

3.2.1 Pengembangan Kawasan Jeruk

Target pengembangan kawasan jeruk pada tahun 2018 sebanyak 1.870 ha, sedangkan realisasinya mencapai 100%. Secara rinci, pengembangan kawasan jeruk tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Capaian Output Kegiatan Pengembangan Kawasan Jeruk per Lokasi Tahun 2018

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Target (ha)	Realisasi (ha)	(%)	Kategori
1	Aceh	Aceh Tengah	25	25	100	Berhasil
		Bener Meriah	25	25	100	Berhasil
2	Sumatera Utara	Karo	25	25	100	Berhasil
3	Sumatera Barat	Agam	35	35	100	Berhasil
		Lima Puluh Kota	35	35	100	Berhasil
4	Lampung	Lampung Selatan	25	25	100	Berhasil
		Pesawaran	25	25	100	Berhasil

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Target (ha)	Realisasi (ha)	(%)	Kategori
		Lampung Barat	25	25	100	Berhasil
		Mesuji	25	25	100	Berhasil
5	Bengkulu	Kepahiyang	40	40	100	Berhasil
		Rejang Lebong	25	25	100	Berhasil
6	Kepulauan Bangka Belitung	Bangka Tengah	25	25	100	Berhasil
7	Jawa Barat	Bandung Barat	35	35	100	Berhasil
		Bandung	25	25	100	Berhasil
8	Jawa Tengah	Blora	25	25	100	Berhasil
9	Jawa Timur	Banyuwangi	35	35	100	Berhasil
		Tuban	25	25	100	Berhasil
10	Kalimantan Barat	Sambas	1.100	1.100	100	Berhasil
11	Bali	Buleleng	40	40	100	Berhasil
12	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	25	25	100	Berhasil
13	Sulawesi Utara	Minahasa	35	35	100	Berhasil
14	Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan	40	40	100	Berhasil
15	Maluku Utara	Halmahera Tengah	25	25	100	Berhasil
		Tidore Kepulauan	25	25	100	Berhasil
		Halmahera Barat	25	25	100	Berhasil
16	Gorontalo	Pohuwato	25	25	100	Berhasil
17	Papua	Nabire	25	25	100	Berhasil
		Mimika	25	25	100	Berhasil
TOTAL			1.870	1.870	100	Berhasil

Sumber: Direktorat Buah dan Florikultura, 2018

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja Direktorat Buah dan Florikultura khususnya dalam pengembangan kawasan jeruk dapat dikatakan berhasil karena target output tercapai 100%. Seluruh kabupaten yang mendapatkan alokasi anggaran untuk pengembangan kawasan jeruk melaksanakan kegiatan dengan baik tanpa kendala yang berarti. Salah satu tujuan pengembangan kawasan jeruk adalah untuk meningkatkan produksi jeruk nasional, agar dapat mencukupi kebutuhan dan konsumsi masyarakat Indonesia, sekaligus sebagai substitusi impor. Dengan adanya pengembangan

jeruk tahun 2018, diharapkan kawasan jeruk dapat bertambah luas dan dengan pengelolaan kebun yang lebih baik sesuai prinsip GAP, sehingga produksinya meningkat dengan mutu yang lebih baik dan berdaya saing dalam mengurangi impor jeruk.



Pengembangan Kawasan Jeruk di Kabupaten Garut, Jawa Barat Pengembangan Kawasan Jeruk di Kabupaten Malang, Jawa Timur

Gambar 7. Pengembangan Kawasan Jeruk

3.2.2. Mangga

Tabel 9. Capaian Output Kegiatan Pengembangan Kawasan Mangga Per Lokasi Tahun 2018

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Target (ha)		Realisasi (ha)	%	Kategori
			Reguler	#Bekerja			
1	Jawa Barat	Sumedang	50		50	100	Berhasil
		Cirebon	-	275	50	18.18	Kurang Berhasil
		Majalengka	75	-	75	100	Berhasil
		Indramayu		250	0	0	Kurang Berhasil
2	Jawa Tengah	Pemalang	75		75	100	Berhasil
		Wonogiri	35		35	100	Berhasil
		Batang	25		25	100	Berhasil
3	Jawa Timur	Probolinggo	85		85	100	Cukup Berhasil
		Situbondo	60		60	100	Berhasil
		Lamongan	25		25	100	Berhasil
		Gresik	75		75	100	Berhasil
		Lumajang	250		250	100	Berhasil
4	DIY	Gunung Kidul	45		45	100	Berhasil
5	Bali	Karangasem	25		25	100	Berhasil
6	NTT	Rote Ndao	30		30	100	Berhasil
		Sumba Barat Daya	50		50	100	Berhasil

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Target (ha)		Realisasi (ha)	%	Kategori
			Reguler	#Bekerja			
		Belu	35		35	100	
7	Sulawesi Tengah	Donggala	25		25	100	Berhasil
8	Sulawesi Selatan	Takalar	100		100	100	Berhasil
		Bone	100		78	78	Berhasil
		Jeneponto	60		60	100	Berhasil
		Bantaeng	75		75	100	Berhasil
		Soppeng	150		150	100	Berhasil
9	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Utara	50		50	100	
10	Papua	Jayapura	35		35	100	Berhasil
11	Papua Barat	Teluk Bintuni	35		35	100	Berhasil
Total			2.095		1.598	76,28	Cukup Berhasil

Sumber : Direktorat Buah dan Florikultura, 2018 (data diolah)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja Direktorat Buah dan Florikultura untuk pengembangan kawasan mangga dapat dikatakan cukup berhasil. Namun, kegiatan pengembangan kawasan mangga yang merupakan program #Bekerja di Kabupaten Cirebon dan Indramayu tidak dapat dilaksanakan 100%. Kendala di Kabupaten Cirebon adalah adanya keterbatasan lahan dan keterbatasan rumah tangga miskin (RTM) di salah satu desa untuk mengembangkan mangga program Bekerja sehingga untuk pengembangan kawasan mangga hanya dapat terpenuhi seluas 50 ha. Sedangkan kendala di Kabupaten Indramayu adalah tidak tersedianya lahan di lokasi RTM yang sudah ditentukan sehingga tidak dapat terlaksana.

Mangga juga merupakan salah satu komoditas yang berpotensi untuk ekspor. Dengan adanya pengembangan kawasan mangga tahun 2018, diharapkan pengembangan kawasan mangga dapat terbentuk dan semakin berkembang luas. Dengan terbentuknya kawasan mangga, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan lokal dan peningkatan ekspor.



Benih Kegiatan Pengembangan Kawasan Mangga di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur



Benih Kegiatan Pengembangan Kawasan Mangga di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat

Gambar 8. Pengembangan Kawasan Mangga

3.2.3 Manggis

Tabel 10. Capaian Output Kegiatan Pengembangan Kawasan Manggis per Lokasi Tahun 2018

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Target (ha)		Realisasi (ha)	%	Kategori
			Reguler	#Bekerja			
1	Jawa Barat	Ciamis	65	-	65	100	Berhasil
		Tasikmalaya	314	-	314	100	Berhasil
		Garut	-	497	340	68.41	Cukup Berhasil
2	Jawa Timur	Banyuwangi	75	-	75	100	Berhasil
3	Sumatera Barat	Lima Puluah Kota	40	-	40	100	Berhasil
4	Lampung	Tanggamus	80	-	80	100	Berhasil
5	Bali	Tabanan	25	-	25	100	Berhasil
6	Banten	Pandeglang	-	69	69	100	Berhasil
Total			1.165		1.008	86.52	Berhasil

Sumber : Direktorat Buah dan Florikultura, 2018 (data diolah)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja Direktorat Buah dan Florikultura khususnya dalam pengembangan kawasan manggis dapat dikatakan berhasil. Salah satu kabupaten yang tidak dapat merealisasikan seluruh luas area kawasan adalah Kabupaten Garut, dimana hanya terealisasi sebanyak 340 ha dari target 497 ha (68,41%). Pengembangan manggis di Kabupaten Garut merupakan program Bekerja. Kendala yang dialami adalah kondisi lokasi RTM, dimana tidak semua lokasi RTM sesuai untuk

pengembangan manggis karena ketinggiannya lebih dari 1.000 meter dpl, dan hanya terdapat 340 ha yang sesuai untuk pengembangan manggis.

Manggis menjadi salah satu komoditas unggulan Indonesia karena kekhasannya dan dikenal sebagai *the queen of tropical fruit*. Selama ini manggis telah banyak diekspor ke berbagai negara seperti Malaysia, Thailand, Hongkong, Uni Emirat Arab dan Perancis dengan volume ekspor per tahunnya yang cenderung meningkat. Peluang ekspor untuk komoditas ini semestinya dapat dimanfaatkan melalui peningkatan produksi dan mutu, salah satunya dengan dukungan pengembangan kawasan manggis melalui APBN.



Gambar 9. Pengembangan Kawasan Manggis

3.2.4 Pisang

Tabel 11. Capaian Output Kegiatan Pengembangan Kawasan Pisang per Lokasi Tahun 2018

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Target (Ha)		Realisasi (Ha)	%	Kategori
			Reguler	#Bekerja			
1	Jawa Barat	Ciamis	45	-	45	100	Berhasil
		Cianjur	-	1	1	100	Berhasil
2	Sulawesi Selatan	Bone	-	54	0	0	Kurang berhasil
3	Sulawesi Utara	Minahasa Utara	25	-	25	100	Berhasil
4	Jawa Tengah	Purworejo	25	-	25	100	Berhasil
		Banyumas	-	39	0	0	Kurang berhasil
		Purbalingga	-	44	44	100	Berhasil
		Brebes	-	122	0	0	Kurang Berhasil
5	Sulawesi Tengah	Donggala	25	-	25	100	Berhasil
6	Sumatera Utara	Langkat	-	16	16	100	Berhasil
7	Lampung	Provinsi	20	-	20	20	Berhasil
Total			140	276	201	48,32	Kurang berhasil

Sumber : Direktorat Buah dan Florikultura, 2018 (data diolah)

Pengembangan kawasan pisang Tahun 2018 terdiri dari pengembangan kawasan reguler seluas 140 Ha dan Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (#BEKERJA) Berbasis Hortikultura seluas 276 Ha. Bantuan pengembangan kawasan reguler dialokasikan kepada kelompok tani, sedangkan bantuan Program #Bekerja dialokasikan kepada rumah tangga miskin-petani (RTMP). Pengembangan kawasan pisang reguler seluas 20 Ha di Provinsi Lampung merupakan lanjutan pemeliharaan kebun komersial yang diinisiasi mulai tahun 2016 dan dibiayai hingga tahun 2019.

Pengembangan kawasan pisang reguler seluruhnya dapat terealisasi. Sedangkan untuk pengembangan kawasan pisang #Bekerja hanya terealisasi sebanyak 22,10%. Sehingga secara keseluruhan, pengembangan kawasan pisang tahun 2018 yang terealisasi adalah sebanyak 48,32%. Pengembangan kawasan pisang yang tidak terealisasi adalah pengembangan kawasan pisang program #Bekerja di Kabupaten Bone, Brebes dan Banyumas. Hal tersebut disebabkan oleh gagalnya pengadaan kegiatan #Bekerja khususnya untuk pengadaan benih pisang bersertifikat. Beberapa kondisi seperti waktu pengadaan untuk benih pisang bersertifikat yang terlalu singkat serta tidak adanya pihak ketiga yang mengikuti lelang menyebabkan terjadinya gagal lelang.



Pengembangan Kawasan Pisang di Kabupaten Ciamis



Penyerahan Benih Pisang pada Poktan di Kabupaten Donggala



Penanaman Benih Pisang oleh kelompok tani penerima bantuan di Kabupaten Purworejo



Benih Pisang Barangan bantuan pengembangan kawasan regular di Kabupaten Minahasa Utara

Gambar 10. Pengembangan Kawasan Pisang TA. 2018

Pisang merupakan komoditas buah yang produksinya paling tinggi di Indonesia. Budidaya pisang sangat mudah dan dapat dibudidayakan sepanjang tahun. Produksi pisang yang tidak mengenal musim diharapkan dapat menjadikan pisang sebagai salah satu komoditas ekspor.

Perluasan kawasan atau ekstensifikasi melalui alokasi pengembangan kawasan pisang baik reguler maupun program #Bekerja merupakan salah satu upaya pengembangan pisang guna menyediakan buah sepanjang tahun. Peningkatan mutu dan produktivitas dilakukan melalui upaya intensifikasi dan penerapan budidaya yang benar (GAP). Upaya tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat dengan mendorong pelaksanaan registrasi kebun oleh dinas pertanian provinsi. Pada tahun 2018, jumlah kebun pisang teregistrasi sebanyak 128 kebun. Dengan mendukung peningkatan produksi, mutu serta produktivitas pisang diharapkan Indonesia dapat membuka akses pasarnya ke luar negeri.

3.2.5 Pengembangan Kawasan Buah Lainnya

Pengembangan kawasan buah lainnya meliputi durian, salak, duku, lengkeng, srikaya, sukun, nenas, dan pepaya. Berikut rincian per komoditas untuk pengembangan kawasan buah lainnya.

1) Durian

Durian dianggap sebagai *king of tropical fruit* dan merupakan salah satu kekayaan alam tropis Indonesia dengan beragam varietas lokal yang tersebar di seluruh Indonesia, seperti Bawor, Petruk, Bokor, Tembaga, dsb. Tahun 2018, alokasi pengembangan durian hanya untuk 2 kabupaten, yaitu Kebumen dan Trenggalek.

Tabel 12. Capaian Output Kegiatan Pengembangan Kawasan Durian per Lokasi Tahun 2018

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Target kawasan reguler (ha)	Realisasi (ha)	%	Kategori
1	Jawa Tengah	Kebumen	10	10	100	Berhasil
2	Jawa Timur	Trenggalek	10	10	100	Berhasil
Total			20	20	100	Berhasil

Sumber : Direktorat Buah dan Florikultura, 2018 (data diolah)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja Direktorat Buah dan Florikultura khususnya pengembangan kawasan durian dapat dikatakan **berhasil** dimana 100% target output yang telah ditetapkan dapat terealisasi. Supaya berdaya saing di pasar domestik dan internasional, maka perlu pengembangan varietas-varietas yang lebih unggul. Adanya pengembangan kawasan durian tahun 2018, diharapkan pengembangan kawasan durian dapat terbentuk dan semakin berkembang luas sehingga mampu mendorong berkembangnya durian unggulan nusantara yang memiliki daya saing dengan durian dari negara lain.

2) Salak

Salak merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia dimana negara tujuan ekspor terbesar adalah Cina, Singapura, Hongkong, Timur Tengah (Uni Emirat Arab) dan Kamboja. Permintaan pasar untuk salak pondoh cukup besar yang mana sentra utamanya di Kabupten Magelang dan Sleman. Pada tahun 2018, Ditjen Hortikultura mengalokasikan anggaran untuk pengembangan salak di Kabupaten Magelang.

Tabel 13. Capaian Output Kegiatan Pengembangan Kawasan Salak di Kabupaten Magelang Tahun 2018

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Target kawasan regular (ha)	Realisasi (ha)	%	Kategori
1	Jawa Tengah	Magelang	25	0	0	Kurang Berhasil
Total			25	0	0	Kurang Berhasil

Sumber : Direktorat Buah dan Florikultura, 2018 (data diolah)

Pencapaian kinerja dalam pengembangan kawasan salak mencapai 0% dan dapat dikatakan **kurang berhasil**. Permasalahan yang menyebabkan target output dalam kegiatan pengembangan kawasan salak di Kabupaten Magelang tidak dapat terealisasi karena tidak tersedianya benih salak bersertifikat. Pengadaan benih tidak dapat dilakukan karena penangkar yang ada belum terdaftar di BPSB.

3) Duku

Duku merupakan tanaman tropis Indonesia, dan hanya tumbuh di beberapa daerah. Sentra utama duku di Provinsi Sumatera Selatan. Pengembangan duku pada tahun 2018 merupakan program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (#Bekerja) berbasis Hortikultura untuk Rumah Tangga Miskin (RTM).

Tabel 14. Capaian Output Kegiatan Pengembangan Kawasan Duku di Ogan Komering Ilir Tahun 2018

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Target #Bekerja (ha)	Realisasi (ha)	%	Kategori
1	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	100	0	0	Kurang Berhasil
Total			100	0	0	Kurang Berhasil

Sumber : Direktorat Buah dan Florikultura, 2018 (data diolah)

Pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan duku dalam rangka mendukung Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (#Bekerja) hanya difokuskan di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan kawasan sentra duku. Jadi penerima bantuannya adalah Rumah Tangga Miskin (RTM). Namun kegiatan ini tidak dapat terlaksana, karena tidak tersedianya benih bersertifikat. Dinas Pertanian Kabupaten ogan Komering Ilir sudah berusaha mencari benih duku berkualitas, namun BPSB tidak dapat menjamin bahwa benih tersebut terbebas dari penyakit sehingga tidak memberikan jaminan sertifikat. Oleh karena itu, Pencapaian Kinerja Direktorat Buah dan Florikultura dalam pengembangan kawasan duku dapat dikatakan **kurang berhasil**.

4) Lengkeng

Dalam rangka mengurangi lengkeng impor, pada tahun 2018 Ditjen Hortikultura telah mengeluarkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dengan mengatur jadwal masuknya lengkeng yaitu selain bulan Juli dan Agustus. Hal ini berdasarkan hasil identifikasi di lapangan bahwa musim panen lengkeng di sentra-sentra produksi terjadi pada bulan Juli-Agustus. Lengkeng akan menjadi salah satu prioritas dalam pengembangan buah di masa mendatang, dengan mengurangi komoditas-komoditas yang sudah mulai surplus neraca perdagangannya seperti mangga dan manggis.

Pengembangan kawasan lengkeng dari dana APBN tahun 2011 hingga 2018 baru mencapai 313 Ha, namun demikian berdasarkan hasil identifikasi di lapangan, pengembangan lengkeng secara swadaya telah mencapai 300.000 pohon atau setara dengan 1.500 Ha.

Pada tahun 2018, pengembangan lengkeng dialokasikan untuk 4 kabupaten di 2 provinsi seluas 50 ha.

Tabel 15. Capaian Output Kegiatan Pengembangan Kawasan Lengkeng per Lokasi Tahun 2018

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Target Kawasan Reguler (ha)	Realisasi (ha)	%	Kategori
1	Jawa Tengah	Jepara	10	10	100	Berhasil
		Wonogiri	10	10	100	Berhasil
		Blora	10	10	100	Berhasil
2	Jawa Timur	Tuban	20	20	100	Berhasil
Total			50	50	100	Berhasil

Sumber : Direktorat Buah dan Florikultura, 2018 (data diolah)

Pencapaian kinerja Direktorat Buah dan Florikultura khususnya dalam pengembangan kawasan lengkeng dapat dikatakan **berhasil**. Pengembangan kawasan lengkeng diharapkan dapat meningkatkan produksi lengkeng nusantara sehingga dapat mengurangi impor (substitusi impor). Dengan adanya pengembangan kawasan lengkeng TA. 2018, diharapkan kawasan lengkeng dapat terbentuk dan semakin berkembang luas.

Tantangan dalam pengembangan lengkeng kedepan diantaranya terkait dengan penyediaan benih bermutu, inovasi teknologi dalam budidaya lengkeng untuk menghasilkan buah yang bermutu dan produktivitas tinggi, teknologi pascapanen untuk memperpanjang daya simpan, sistem pemasaran yang efisien dan harga yang bersaing, namun tetap menguntungkan petani serta perlu dilakukan identifikasi daerah-daerah yang sesuai untuk pengembangan lengkeng.



Pengembangan Kawasan Lengkeng di Kabupaten Tuban-Jawa Timur



Pengembangan Kawasan Lengkeng di Kabupaten Blora, Jawa Tengah

Gambar 11. Pengembangan Kawasan Lengkeng

5) Srikaya

Srikaya merupakan buah tropis yang sudah mulai langka, namun dengan adanya pengembangan teknologi terutama dalam aspek pemuliaan, saat ini sudah mulai dikembangkan srikaya tanpa biji. Oleh karena itu, srikaya sangat potensial untuk dikembangkan. Pada tahun 2018, pengembangan srikaya melalui APBN dialokasikan untuk Kabupaten Gresik seluas 10 ha.

Tabel 16. Capaian Output Kegiatan Pengembangan Kawasan Srikaya di Gresik Tahun 2018

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Target kawasan reguler (ha)	Realisasi (ha)	%	Kategori
1	Jawa Timur	Gresik	10	10	100	Berhasil
Total			10	10	100	Berhasil

Sumber : Direktorat Buah dan Florikultura, 2018 (data diolah)

Pencapaian kinerja Direktorat Buah dan Florikultura untuk pengembangan kawasan srikaya dapat dikatakan **berhasil**. Pada tahun 2018, srikaya hanya dikembangkan di Kabupaten Gresik melalui APBN. Pengembangan tersebut

bisa dijadikan stimulasi sebagai upaya pengembangan kawasan srikaya yang lebih luas dalam meningkatkan keberagaman buah nusantara.



Pengembangan Kawasan Srikaya di Kabupaten Gresik

Gambar 12. Pengembangan Kawasan Srikaya

6) Sukun

Buah sukun banyak dikembangkan di daerah Papua dan Papua Barat, sebagai sumber pangan masyarakat. Pada Tahun 2018, alokasi anggaran untuk pengembangan sukun di Kota Sorong dialihkan ke Kabupaten Sorong.

Tabel 17. Capaian Output Kegiatan Pengembangan Kawasan Sukun di Sorong Tahun 2018

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Target kawasan reguler (ha)	Realisasi (ha)	%	Kategori
1	Papua Barat	Sorong	20	20	100	Berhasil
Total			20	20	100	Berhasil

Sumber : Direktorat Buah dan Florikultura, 2018 (data diolah)

Pencapaian kinerja Direktorat Buah dan Florikultura untuk pengembangan kawasan sukun dapat dikatakan **berhasil**. Pengembangan kawasan sukun

tersebut diharapkan dapat menstimulasi pengembangan kawasan yang lebih luas sehingga dapat menambah keberagaman buah nusantara.



Distribusi Bantuan Pengembangan Kawasan Sukun di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat

Gambar 13. Pengembangan Kawasan Sukun

7) Nenas

Indonesia sebagai produsen nenas terbesar di Asia, memiliki peluang besar untuk memenuhi permintaan pasar ekspor. Beberapa negara seperti Amerika sudah mulai melakukan peninjauan terhadap nenas Indonesia untuk diimpor. Pada tahun 2018, pengembangan kawasan nenas dialokasikan untuk Kota Prabumulih seluas 25 ha.

Tabel 18. Capaian Output Kegiatan Pengembangan Kawasan Nenas di Prabumulih Tahun 2018

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Target Kawasan Reguler (Ha)	Realisasi (Ha)	%	Kategori
1	Sumatera Selatan	Kota Prabumulih	25	25	100	Berhasil
Total			25	25	100	Berhasil

Sumber : Direktorat Buah dan Florikultura, 2018 (data diolah)

Target pengembangan kawasan nenas tahun 2018 seluas 25 Ha yang merupakan pengembangan kawasan reguler terealisasi 100%. Pengembangan kawasan nenas tahun 2018 hanya dilakukan di 1 (satu) wilayah yaitu Kota Prabumulih dikarenakan terbatasnya anggaran pengembangan nenas.

Dilihat dari trend pasar nenas internasional, saat ini permintaan pasar global terhadap nenas segar mengalami peningkatan. Sebagai salah satu produsen nenas terbesar di Asia, Indonesia memiliki potensi untuk memanfaatkan peluang tersebut. Dengan adanya pengembangan kawasan nenas tahun 2018, diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan produksi nenas nasional. Selain itu, melalui penerapan teknologi budidaya dan pascapanen di daerah sentra nenas, diharapkan kedepannya Indonesia dapat memanfaatkan peluang pasar internasional sebagai pemasok nenas segar.



Gambar 14. Pengembangan Kawasan Nenas TA. 2018

Pengembangan kawasan nenas Indonesia tidak hanya didorong melalui ekstensifikasi atau perluasan kawasan, namun juga melalui intensifikasi dengan mengacu pada cara berbudidaya yang baik (*Good Agricultural Practices/GAP*). Pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya di

kawasan sentra nenas serta mendorong registrasi kebun sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan penerapan GAP.

Pada tahun 2018, sebanyak 27 kebun nenas telah diregistrasi. Registrasi kebun ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membuka akses pasar ke berbagai negara, salah satunya pasar Amerika Serikat. Pada tahun 2018, pemerintah Amerika Serikat melakukan penjajakan terhadap nenas segar Indonesia untuk diimpor ke negaranya dan telah melakukan kunjungan lapang ke kebun nenas Indonesia yang telah diregistrasi. Adanya registrasi kebun diharapkan kebun tersebut telah melakukan budidaya yang baik sehingga nenas segar Indonesia bisa diterima pasar Amerika Serikat.

8) Pepaya

Pepaya merupakan komoditas buah yang memiliki potensi untuk dikembangkan karena dapat berbuah sepanjang tahun sehingga dapat menjamin ketersediaannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, varietas pepaya yang bervariasi, seperti varietas Calina, menjadikannya sebagai komoditas buah yang cukup diminati. Alasan tersebut mendorong pemerintah untuk mendukung pengembangan pepaya melalui ekstensifikasi atau perluasan kawasan. Pada tahun 2018, pengembangan kawasan pepaya untuk mendukung program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (#Bekerja), yang dikembangkan pada skala pekarangan oleh Rumah Tangga Miskin (RTM), sehingga hasilnya dapat dikonsumsi untuk bahan pangan sehat, sekaligus dapat dijual untuk menambah pendapatan rumah tangga miskin. Pengembangan kawasan pepaya TA. 2018 dilaksanakan di 4 (empat) provinsi yaitu Provinsi Lampung, Banten, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat yang mencakup 5 (lima) kabupaten yaitu Lampung Selatan, Pandeglang, Cirebon, Tasikmalaya dan Lombok Tengah, dengan target luasan seluruhnya 100 ha.

Tabel 19. Capaian Output Kegiatan Pengembangan Kawasan Pepaya per Lokasi Tahun 2018

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Target kawasan #Bekerja	Realisasi (Ha)	%	Kategori
1	Lampung	Lampung Selatan	20	20	100	Berhasil
2	Banten	Pandeglang	9	9	100	Berhasil
3	Jawa Barat	Cirebon	18	14	77,78	Cukup Berhasil
		Tasikmalaya	27	27	100	Berhasil
4	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	26	26	100	Berhasil
Total Pepaya			100	96	96	Berhasil

Sumber : Direktorat Buah dan Florikultura, 2018 (data diolah)

Pencapaian kinerja Direktorat Buah dan Florikultura untuk pengembangan kawasan pepaya dapat dikatakan berhasil, hanya di Cirebon yang realisasinya hanya mencapai 77,78%.



Benih Pepaya untuk dibagikan kepada RTMP di Kabupaten Tasikmalaya



Benih Pepaya untuk dibagikan kepada RTMP di Kabupaten Pandeglang

Gambar 15. Pengembangan Kawasan Pepaya TA. 2018

3.2.6. Kawasan Florikultura

Pada tahun 2018, pengembangan kawasan florikultura dialokasikan untuk 10 kabupaten di 6 provinsi, dengan komoditas yang memiliki potensi ekspor seperti krisan, anggrek, dracaena, dan melati serta tanaman pot dan lanskap untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Target dan realisasi pengembangan kawasan florikultura pada tahun 2018 disajikan pada tabel berikut :

a. Krisan

Tabel 20. Capaian Output Kegiatan Pengembangan Kawasan Krisan per Lokasi Tahun 2018

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Target Kawasan Reguler (m2)	Realisasi (m2)	%	Kategori
1	Jawa Barat	Cianjur	1.500	1.500	100	Berhasil
		Bandung Barat	1.000	1.000	100	Berhasil
2	Jawa Timur	Batu	1.000	1.000	100	Berhasil
3	Sulawesi Selatan	Gowa	1.500	1.500	100	Berhasil
		Bantaeng	1.100	1.100	100	Berhasil
4	Sulawesi Utara	Kota Tomohon	1.500	1.500	100	Berhasil

Sumber : Direktorat Buah dan Florikultura, 2018 (data diolah)

Pengembangan kawasan krisan dilakukan melalui ekstensifikasi dengan membangun rumah lindung yang baru untuk budidaya krisan, maupun melakukan optimalisasi kebun dengan perbaikan rumah lindung yang sudah rusak, seperti atap plastik UV yang sudah sobek karena terkena angin dan hujan, atau *screen net*/dinding rumah lindung, maupun untuk melengkapi fasilitas kebun yang dibutuhkan untuk optimalisasi lahan agar dapat melakukan budidaya sesuai dengan prinsip GAP.

Capaian kinerja Direktorat Buah dan Florikultura dalam pengembangan kawasan krisan dapat dikatakan berhasil, dari target luasan 7.600 m² terealisasi 7.600 m² (100%), dan beberapa kelompok tani yang menerima bantuan seperti di Cianjur dan Tomohon, sudah berproduksi saat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, sehingga mendapat harga yang lebih tinggi dibanding hari-hari biasa.



Gambar 16. Dokumentasi Pengembangan Kawasan Krisan

b. Florikultura Lainnya

Tabel 21. Capaian Output Kegiatan Pengembangan Kawasan Florikultura Lainnya per Lokasi Tahun 2018

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Komoditas	Target Kawasan Reguler (m2)	Realisasi (m2)	%	Kategori
1	Jawa Barat	Sukabumi	Dracaena	1.500	1.500	100	Berhasil
2	Jawa Tengah	Batang	Melati	10.000	10.000	100	Berhasil
3	Banten	Tangerang Selatan	Anggrek	2.000	2.000	100	Berhasil
4	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	Tanaman Pot dan Lanskap	1.000	1.000	100	Berhasil

Sumber : Direktorat Buah dan Florikultura, 2018 (data diolah)

Pengembangan kawasan dracaena dialokasikan untuk kelompok tani Alamanda di Kabupaten Sukabumi dalam mendorong pengembangan ekspor. Bantuan yang diberikan antara lain dalam bentuk *screen net*, benih dracaena, mulsa dan pupuk. Capaian kinerja untuk pengembangan dracaena berhasil memenuhi target 100%.

Pengembangan kawasan melati pada tahun 2018, dialokasikan untuk kelompok tani Serbaguna seluas 4.000 m² dan kelompok tani Ngantingan seluas 6.000 m² di Kabupaten Batang sebagai salah satu sentra melati. Bantuan yang diberikan antara lain benih melati, pupuk, fungisida, insektisida dan *handsprayer*. Peluang pasar ekspor untuk melati cukup besar. Capaian kinerja untuk pengembangan melati berhasil memenuhi target 100%.

Pengembangan kawasan anggrek pada tahun 2018, dialokasikan untuk KWT. Seruni di Kabupaten Tangerang Selatan. Bantuan dalam bentuk rumah lindung dan benih anggrek. Capaian kinerja untuk pengembangan anggrek berhasil memenuhi target 100%.

Pengembangan kawasan pot dan lanskap pada tahun 2018, dialokasikan untuk kelompok tani Puspa Pesona Anggrek, Perintis, Selasih, Citra di Kota Makassar, masing-masing seluas 250 m². Pengembangan kawasan tanaman pot dan lanskap di Kota Makassar terutama ditujukan untuk menyediakan kebutuhan taman perkotaan. Capaian kinerja untuk pengembangan tanaman pot dan lanskap berhasil memenuhi target 100%.



Gambar 17. Dokumentasi Pengembangan Kawasan Florikultura Lainnya

3.2.7. Fasilitasi Teknis Dukungan Produksi Buah dan Florikultura

Fasilitasi teknis dukungan produksi buah dan florikultura dilaksanakan oleh Direktorat Buah dan Florikultura baik dalam bentuk pembinaan, pendampingan, bimbingan teknis dalam penerapan GAP, Penyusunan

Pedoman maupun pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Kegiatan bimbingan teknis yang telah dilaksanakan antara lain untuk komoditas krisan di Kulonprogo dan Bandung Barat, komoditas pisang di Buleleng dan komoditas nenas di Prabumulih.

Pedoman yang telah disusun antara lain : Buku Saku Pisang, Buku Panduan Pengembangan Kawasan Lengkeng, Buku Data Statistik Buah dan Florikultura, serta pencetakan ulang buku Tanaman Hias Potensial Penyerap Polutan.

3.3. Capaian Kegiatan Direktorat Perbenihan Hortikultura

3.3.1 Jumlah Benih Cabai yang Tersedia (batang)

Tujuan dari kegiatan ini adalah memasyarakatkan penggunaan benih cabai bermutu dari varietas unggul. Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya penggunaan benih cabai bermutu dari varietas unggul dalam mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman cabai. Pengadaan atau penanaman benih cabai dalam *polybag*/wadah harus dari varietas yang telah dilepas/didaftar oleh Menteri Pertanian.

Produksi benih cabai dilaksanakan oleh BBH di 32 provinsi melalui dana Tugas Pembantuan. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan ketersediaan benih cabai bermutu dalam rangka mendukung pengembangan kawasan cabai. Sebagaimana diatur dalam petunjuk pelaksanaan, output kegiatan ini dilaksanakan melalui bimbingan atau pembinaan, koordinasi serta pengadaan benih cabai dapat bekerja sama dengan penangkar benih setempat yang kompeten

dengan kesepakatan secara tertulis dan BBH tetap memenuhi target output yang telah ditetapkan.

Target output produksi benih cabai ditetapkan tahun 2018 sebesar 1.000.000 batang yang dilaksanakan di 32 satker provinsi. Dari sebanyak 1 juta batang benih cabai tersebut terealisasi sebesar 975.000 batang atau sekitar 97,50%. Capaian angka yang menyentuh 97,50 % dikarenakan terdapat provinsi yang merealisasikan kegiatan tidak mencapai 100% yaitu Provinsi Banten dan Kalimantan Barat.

3.3.2 Jumlah Benih Bawang Merah yang Tersedia (kg)

Produksi benih bawang merah dilaksanakan oleh BBH di 19 provinsi melalui dana dekonsentrasi. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan ketersediaan benih bawang merah bermutu dalam rangka mendukung pengembangan kawasan bawang merah. Sebagaimana diatur dalam petunjuk pelaksanaan, output kegiatan ini dilaksanakan melalui bimbingan atau pembinaan, koordinasi serta pengadaan benih sumber (benih yang digunakan untuk perbanyakan/produksi benih).

Perbanyakan benih bawang merah dapat bekerja sama dengan penangkar benih setempat yang kompeten dengan kesepakatan secara tertulis dan BBH tetap memenuhi target output yang telah ditetapkan.

Target output produksi benih bawang merah yang ditetapkan dalam PK Revisi terakhir tahun 2018 adalah sebesar 597.000 kg yang dilaksanakan di 19 Satker Provinsi. Dari target sebanyak 597.000 kg tersebut terealisasi sebesar 525.857 kg atau sekitar 88,08%.

Perbanyakan benih bawang merah tidak dapat mencapai target karena kegiatan perbanyakan benih bawang merah yang dilaksanakan di kegiatan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi di beberapa provinsi

tidak terlaksana karena keterbatasan waktu pelaksanaan serta akibat koordinasi internal di satker daerah yang terlambat dalam proses penyediaan dokumen seperti yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Hal lain yang juga menjadi penyebab tidak terlaksananya capaian output kegiatan ini disebabkan masih rendahnya penguasaan teknologi dan kompetensi SDM perbanyak benih bawang merah serta kurang tersedianya fasilitas penyimpanan benih bawang merah di daerah penerima seperti yang terjadi di Kalimantan Tengah.

3.3.3. Jumlah Benih Jeruk yang Tersedia (batang)

Tujuan kegiatan adalah meningkatkan ketersediaan benih jeruk bermutu dari varietas unggul untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman jeruk.

Sasaran kegiatan adalah meningkatnya ketersediaan benih jeruk bermutu untuk mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman jeruk.

Target output jumlah benih jeruk yang tersedia yang ditetapkan dalam PK revisi tahun 2018 adalah sebesar 640.300 batang yang meliputi pengadaan di satker pusat 15.000 batang dan 18 satker provinsi sebanyak 625.300 batang. Realisasi pengadaan di satker pusat adalah 15.000 batang (100%) dan di daerah sebanyak 635.300 batang (101,52%).

Total realisasi satker pusat dan daerah adalah 650.300 batang. Dengan demikian, apabila dibandingkan antara target volume yang ada di dokumen PK revisi terakhir sebanyak 640.300 batang dengan realisasi sebesar 650.300 batang maka target benih jeruk mencapai 101,48 %.

Meskipun realisasinya sudah mencapai >100 % dari target, namun demikian masih ada sebagian kecil satker daerah yang sebenarnya mampu memproduksi lebih besar lagi, namun karena adanya alasan tertentu akhirnya tidak mampu direalisasikan produksi benih jeruknya seperti di Provinsi Bengkulu yang tidak melanjutkan proses produksi benihnya sejumlah 5.000 batang karena tidak tersedianya batang atas. Selain itu, di Kabupaten Jeneponto sebanyak 3.000 batang tidak direalisasikan karena varietas yang tersedia tidak sesuai dengan agroklimat dari daerah tersebut.

Kegiatan fasilitasi bantuan benih jeruk yang dilaksanakan di pusat sebesar 15.000 batang sebagai pelaksana kegiatan Direktorat Perbenihan Hortikultura terealisasi 100%. Kabupaten penerima bantuan yakni Kabupaten Bone. Varietas jeruk yang diperbantukan untuk Kabupaten Bone yakni jeruk varietas Pamelon Nambangan.

3.3.4. Jumlah Benih Mangga yang Tersedia (Batang)

Tujuan kegiatan adalah meningkatkan ketersediaan benih mangga bermutu untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman mangga.

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya ketersediaan benih mangga untuk mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman mangga.

Adapun target output benih mangga adalah sebanyak 607.502 batang dengan rincian di pusat yakni 45.000 batang dan di daerah sebanyak 562.502 batang. Dari target 607.502 tersebut terealisasi sebanyak 571.500 batang atau sekitar 94,07 %.

Untuk penyediaan benih mangga di pusat, sebanyak 45.000 batang terealisasi 100%. Benih-benih mangga tersebut meliputi varietas

unggul nasional seperti Arumanis 143, Manalagi 69, Lalijiwo 61, Gadung 21 dan Garifta Merah. Benih-benih ini disebar di 9 kabupaten/kota.

Sedangkan untuk penyediaan benih mangga oleh satker di daerah tidak dapat direalisasikan seperti di Sulawesi Selatan sebanyak 1.000 batang, di Bangka Belitung 15.000 batang, Jawa Timur 15.000 batang dan di Jenepono sebanyak 2.000 batang. Ketidaktersediaan benih untuk digunakan sebagai batang bawah maupun benih yang sesuai dengan permintaan CPCL di wilayah setempat menjadi alasan tidak terlaksananya kegiatan ini seperti yang terjadi di Bangka Belitung dan Sulawesi Selatan. Adanya miss koordinasi di internal Satker Provinsi juga menjadi alasan tidak dilaksanakannya kegiatan ini. Seperti di Jawa Timur, pihak pelaksana /PPK yang ditunjuk KPA provinsi yaitu dalam hal ini BPSB TPH provinsi merasa bahwa output benih lainnya berupa pengadaan benih bukanlah TUSI-nya sehingga dikhawatirkan melanggar aturan yang ada. Sedangkan di Jenepono, penyediaan benih mangga tidak direalisasikan dikarenakan varietas yang akan dikembangkan dianggap tidak sesuai dengan agroklimat dari daerah tersebut.

3.3.5 Jumlah Benih Manggis yang Tersedia (Batang)

Tujuan kegiatan adalah meningkatkan ketersediaan benih bermutu manggis untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman manggis.

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya ketersediaan benih manggis untuk mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman manggis.

Adapun target output benih manggis adalah sebanyak 245.000 batang dengan rincian di pusat yakni 36.000 batang dan di daerah sebanyak 209.000 batang. Dari target 245.000 tersebut terealisasi sebanyak 215.000 batang atau sekitar 87,76 %.

Untuk penyediaan benih manggis di pusat, sebanyak 36.000 batang terealisasi 100%. Benih manggis yang disediakan di pusat adalah varietas Kaligesing yang disebar di 11 kabupaten/kota.

Sejumlah satker daerah tidak mampu merealisasikan target penyediaan benih manggis ini seperti di Satker Provinsi Jawa Timur sebanyak 12.000 batang dan di Satker Provinsi Bengkulu sebanyak 18.000 batang. Seperti halnya kegagalan penyediaan benih mangga, kegagalan penyediaan benih manggis disebabkan adanya miss koordinasi di internal satker provinsi. Sedangkan kegagalan yang terjadi di Bengkulu diakibatkan harga satuan benih yang ada di POK tidak mencukupi untuk penyediaan benih manggis bermutu di wilayah setempat.

3.3.6 Jumlah Benih Pisang yang Tersedia (batang)

Tujuan kegiatan adalah meningkatkan ketersediaan benih pisang bermutu untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman pisang.

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya ketersediaan benih pisang untuk mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman pisang.

Adapun target output benih pisang adalah sebanyak 340.000 batang dengan rincian di pusat sebanyak 12.000 batang dan di daerah sebanyak 328.000 batang. Dari target 340.000 batang tersebut terealisasi sebanyak 304.000 batang atau sekitar 89,41 %.

Untuk penyediaan benih pisang di pusat, sebanyak 12.000 batang terealisasi 100%. Benih pisang yang disediakan di pusat adalah varietas Rajabulu Kuning yang dikirim ke Kabupaten Bone.

Sejumlah satker daerah tidak dapat merealisasikan target penyediaan benih pisang seperti sebanyak 13.000 batang di Sulawesi Selatan dan 20.000 batang di Satker Provinsi Jawa Timur. Di Provinsi Jawa Timur, kegagalan penyediaan benih pisang disebabkan adanya miss koordinasi di internal satker provinsi yang menjadi alasan tidak dilaksanakannya kegiatan ini. Sedangkan kegagalan yang terjadi di Sulawesi Selatan lebih disebabkan tidak adanya benih pisang bersertifikat yang varietasnya sesuai dengan CPCL di wilayah setempat.

3.3.7 Jumlah Benih Buah Lainnya yang Tersedia (Batang)

Tujuan kegiatan adalah meningkatkan ketersediaan benih bermutu tanaman buah lainnya untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman buah lainnya.

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya ketersediaan benih buah lainnya untuk mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman buah lain.

Adapun target output benih buah lainnya adalah sebanyak 332.161 batang dengan rincian di pusat 81.000 batang dan daerah sebanyak 251.161 batang. Dari target 332.161 batang tersebut terealisasi sebanyak 322.561 batang atau sekitar 97,11 %. Benih buah lainnya yaitu durian, lengkeng, duku, alpukat, salak, sukun dan jambu kristal. Untuk penyediaan benih buah lainnya di pusat, sebanyak 81.000 batang terealisasi 100%. Benih buah lainnya yang disediakan di pusat adalah Duku varietas Matesih dan Palembang yang dikirim untuk 3 kabupaten

sebanyak 10.000 batang, Alpukat varietas Wina sebanyak 16.000 batang untuk 9 kabupaten, Salak varietas Gula Pasir sebanyak 6.000 batang untuk 1 kabupaten, Durian varietas Otong sebanyak 28.000 batang untuk 9 kabupaten serta lengkeng varietas Kateki dan Diamond River sebanyak 21.000 batang yang dikirim untuk 7 kabupaten.

Diketahui beberapa kabupaten tidak melaksanakan kegiatan fasilitasi benih buah lainnya seperti di Kabupaten Kebumen dan Jeneponto. Di Kabupaten Kebumen untuk komoditas lengkeng 7.600 batang tidak dilaksanakan karena tidak cukup waktunya untuk lelang. Sedangkan fasilitasi benih lainnya di Kabupaten Jeneponto untuk komoditas durian sebanyak 2.000 batang tidak direalisasikan karena komoditas dan varietas yang akan dikembangkan dianggap tidak sesuai dengan agroklimat di daerah tersebut.

3.3.8 Jumlah Benih Bawang Putih (sayuran lainnya) yang Tersedia (kg)

Tujuan kegiatan adalah meningkatkan ketersediaan benih sayuran lainnya, khususnya benih bawang putih.

Sasaran kegiatan adalah meningkatnya ketersediaan benih bawang putih untuk mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk bawang putih.

Produksi benih sayuran lainnya, dalam hal ini benih bawang putih, dilaksanakan di 3 provinsi dan 4 kabupaten/kota melalui dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui perbanyakan dan pengadaan benih. Kelompok penerima manfaat diutamakan kelompok yang mendapat alokasi APBN 2018 untuk kawasan sayuran lainnya.

Target output produksi benih sayuran lainnya (bawang putih) yang ditetapkan dalam PK Revisi terakhir tahun 2018 sebesar 190.000 kg dan terealisasi sebesar 113.000 kg atau sekitar 59,47%. Capaian output ini merupakan yang paling rendah dibanding capaian output-output lainnya pada kegiatan pengembangan sistem perbenihan tahun 2018.

Beberapa satker yang realiasi target output benih bawang putih-nya rendah seperti Provinsi Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Solok. Beberapa hal menjadi penyebab tidak tercapainya output kegiatan benih bawang putih ini yaitu : (1) masih minimnya ketersediaan benih sumber bawang putih bermutu, (2) adanya miss koordinasi antara satker dan pelaksana daerah yang menyebabkan waktu pelaksanaan menjadi sangat terbatas dan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan seperti terjadi di Kabupaten Magelang, (3) minimnya kelompok tani yang bersedia menanam bawang putih dan bersedia menjadi penangkar benih bawang putih sehingga Dinas Pertanian tidak berhasil merealisasikan output benih bawang putih seperti di Satker Kabupaten Solok.

3.3.9 Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia

Dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan benih bermutu varietas unggul secara memadai dan berkesinambungan, diperlukan kerjasama yang erat antar instansi terkait yang menangani plasma nutfah, pemuliaan, produksi dan penyedia benih, distribusi, pengendalian mutu dan pengawasan peredaran benih, serta pengguna benih. Peran Balai Benih Hortikultura (BBH) sebagai ujung tombak dalam penyediaan benih bermutu sangat penting sehingga upaya peningkatan sumber daya manusia perlu dilakukan. Untuk memperkuat peranan produsen benih baik milik pemerintah maupun

swasta dalam memproduksi benih bermutu, pemerintah memfasilitasi sarana prasarana produksi benih hortikultura yang memadai.

Tujuan kegiatan adalah memfasilitasi sarana prasarana produksi benih hortikultura untuk memperkuat peran produsen benih hortikultura. Sasaran kegiatan adalah meningkatnya kapasitas produsen benih hortikultura dalam memproduksi benih bermutu.

Target output sarana dan prasarana Perbenihan Hortikultura yang ditetapkan dalam PK Revisi terakhir tahun 2018 sebesar 61 unit, terealisasi sebesar 46 unit atau sekitar 75,41 %.

Capaian angka tersebut terjadi karena di beberapa provinsi tidak melaksanakan lelang, akibat waktu lelang yang memasuki batas akhir tahun anggaran 2018. Sateru dengan realisasi output sarana dan prasarana benih yang rendah adalah Provinsi Jawa Tengah. Di provinsi ini, sejumlah sarana dan prasarana diantaranya berupa *screen house* yang direncanakan di Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo tidak terealisasi karena koordinasi internal yang kurang optimal.

3.3.10 Sertifikasi Benih Hortikultura

Benih hortikultura bermutu merupakan salah satu kunci keberhasilan budidaya hortikultura. Dalam Permentan Nomor 48 tahun 2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura disebutkan bahwa benih bermutu diperoleh melalui proses sertifikasi :

- a. Pengawasan pertanaman dan pasca panen oleh BPSB;
- b. Sistem Manajemen Mutu (SMM) oleh LSSM terakreditasi KAN dengan ruang lingkup perbenihan; dan
- c. Terhadap produk benih oleh LSPro terakreditasi KAN.

Sertifikasi benih hortikultura (sertifikasi benih) adalah proses pemberian sertifikat terhadap kelompok benih melalui serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian, serta memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal. Sertifikasi benih melalui pengawasan pertanaman dan pascapanen meliputi pemeriksaan lapangan, pengujian mutu benih di laboratorium dan/atau pemeriksaan mutu benih di gudang, penerbitan sertifikat benih, dan pelabelan.

Sertifikasi benih dimaksudkan sebagai pelayanan terhadap produsen benih/instansi pemerintah yang mempunyai tupoksi bidang hortikultura. Tujuan sertifikasi adalah untuk menjamin mutu benih (mutu genetik, mutu fisik, mutu fisiologis, dan kesehatan benih).

Kegiatan sertifikasi dalam PK revisi terakhir tahun 2018 ditargetkan sebanyak 1.680 unit sertifikasi dan realisasi capaian sertifikasi sampai akhir tahun 2018 mencapai 5.233 unit sertifikasi atau sebesar 311,49 % dari yang telah ditargetkan untuk tahun 2018. Capaian sertifikasi ini 3 kali lebih besar dari target yang telah ditetapkan untuk tahun 2018. Provinsi yang memiliki capaian sertifikasi tertinggi yaitu Provinsi Jawa Tengah dengan realisasi sertifikasi sebesar 1.124 unit sertifikasi, capaian ini jauh lebih tinggi dari target sertifikasinya yang hanya sebesar 100 unit sertifikasi.

3.3.11 Fasilitasi Teknis Dukungan Perbenihan Hortikultura

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.010/8/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian menyatakan bahwa Direktorat Perbenihan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di

bidang peningkatan penyediaan benih hortikultura. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Perbenihan Hortikultura menyelenggarakan fungsi: (a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk dan tanaman hortikultura lainnya serta kelembagaan perbenihan, (b) pelaksanaan kebijakan dan rekomendasi teknis di bidang peningkatan penyediaan benih aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk dan tanaman hortikultura lainnya serta kelembagaan perbenihan, (c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penyediaan benih aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk dan tanaman hortikultura lainnya serta kelembagaan perbenihan (d) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan penyediaan benih aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk dan tanaman hortikultura lainnya serta kelembagaan perbenihan; (e) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbenihan Hortikultura.

Untuk mendukung kinerja Direktorat Perbenihan Hortikultura dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya diperlukan kegiatan Koordinasi Perencanaan Perbenihan Hortikulturan untuk mensinkronisasikan dan menyediakan panduan/norma dalam pelaksanaan kegiatan di Direktorat Perbenihan Hortikultura (Pusat), Balai Benih Hortikultura (BBH), Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH), dan TP kabupaten/kota.

3.4. Capaian Kegiatan Direktorat Perlindungan Hortikultura

3.4.4. Desa Pertanian Organik (DPO)

Tahun 2018 output DPO bidang hortikultura merupakan tahun pertama pelaksanaan oleh Direktorat Perlindungan Hortikultura dengan target 250 desa. Pada tahun 2016 penyelenggaraannya oleh Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat dan Direktorat Buah dan Florikultura, dengan jumlah desa yang sama. Sedangkan pada 2017, pelaksanaannya terhenti sementara, karena tidak ada alokasi anggaran. Pada tahun 2018 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan 2016, lokasi dan kelompok taninya. Namun demikian terjadi perubahan sebagai dampak stagnannya alokasi anggaran pada tahun 2017, sehingga terjadi pergeseran lokasi, karena banyak kelompok tani kembali ke sistem pertanian konvensional. Alokasi anggaran DPO pada Tahun 2018 untuk 250 Desa di 24 Provinsi sebesar Rp. 12.500.000.000 dengan capaian realisasi Rp. 12.055.290.209 (96,44%). Hal ini karena tidak terlaksananya kegiatan DPO di Provinsi Kepulauan Riau, yang disebabkan oleh keterbatasan manajemen SDM.



Gambar 18. Desa Pertanian Organik Bidang Hortikultura Tahun 2018

Fasilitas bantuan yang disalurkan bernilai Rp. 50.000.000 per desa dengan komponen bantuan berupa bahan input yang bersertifikat organik dan atau bahan input yang dihasilkan oleh LPHP/LAH/Klinik PHT dengan justifikasi penyedia bahwa bahan baku tidak mengandung unsur kimia. Pada lokasi yang tidak ditemukan benih/bibit bersertifikat organik, petani telah memberikan perlakuan dengan pencucian atau perendaman dengan air hangat untuk menghilangkan kontaminan pada benih sesuai dengan bimbingan teknis yang dilakukan oleh petugas pendamping/fasilitator. Selain itu, komponen bantuan juga disediakan berupa sarana atau peralatan sederhana untuk memproduksi bahan input organik.

Hasil re-identifikasi calon petani dan calon lokasi pelaksanaan Kegiatan Desa Pertanian Organik (DPO) tahun 2018, menunjukkan bahwa sejumlah 142 desa merupakan kelompok tani/desa baru, dan 108 desa merupakan desa lama sesuai dengan alokasi kegiatan pada tahun 2016.

Tabel 22. Realisasi Fisik dan Keuangan DPO 2018

No	Provinsi	Σ (Desa)	Anggaran (Rp. 000)	Realisasi		Keterangan
				Fisik (%)	Keuangan (Rp. 000)	
1	Aceh	3	150.000	100	149.660	Berhasil
2	Sumatera Barat	20	1.000.000	100	999.772	Berhasil
3	Jambi	2	100.000	100	99.890	Berhasil
4	Kepulauan Riau	2	100.000	0	5.810	Tdk Berhasil
5	Bengkulu	4	200.000	100	200.000	Berhasil
6	Bangka Belitung	4	200.000	100	171.620	Berhasil
7	Lampung	12	600.000	100	597.822	Berhasil
8	Banten	5	250.000	100	248.205	Berhasil
9	Jawa Barat	36	1.800.000	100	1.799.910	Berhasil
10	Jawa Tengah	37	1.850.000	100	1.784.624	Berhasil
11	DI Yogyakarta	14	700.000	100	669.307	Berhasil
12	Jawa Timur	40	2.000.000	100	1.959.890	Berhasil
13	Kalimantan Selatan	5	250.000	100	248.830	Berhasil
14	Kalimantan Barat	6	300.000	100	298.647	Berhasil

No	Provinsi	Σ (Desa)	Anggaran (Rp. 000)	Realisasi		Keterangan
				Fisik (%)	Keuangan (Rp. 000)	
15	Kalimantan Timur	2	100.000	100	99.990	Berhasil
16	Kalimantan Tengah	5	250.000	100	248.040	Berhasil
17	Sulawesi Selatan	13	650.000	100	649.195	Berhasil
18	Sulawesi Tengah	2	100.000	100	99.378	Berhasil
19	Sulawesi Tenggara	5	250.000	100	250.000	Berhasil
20	Gorontalo	5	250.000	100	249.120	Berhasil
21	Sulawesi Utara	5	300.000	100	299.057	Berhasil
22	Bali	14	700.000	100	603.754	Berhasil
23	Nusa Tenggara Barat	6	300.000	100	295.518	Berhasil
24	Nusa Tenggara Timur	2	100.000	100	97.350	Berhasil
	Jumlah	250	12.500.000	99.20	12.125.391	Berhasi

Sumber : Direktorat Perlindungan Hortikultura, 2019

3.4.4. Pengendalian OPT Cabai dan Bawang Merah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Undang-Undang No. 22 tentang Pemerintahan di Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman, pengendalian OPT menjadi tanggungjawab petani, sedangkan peranan pemerintah sebagai fasilitator dan regulator berwenang membantu dalam kasus eksplosif. Dalam implementasinya, pengelolaan OPT hortikultura dilakukan secara ramah lingkungan, sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.

Gerakan Pengendalian OPT dilaksanakan dengan menggunakan bahan dan cara pengendalian OPT yang ramah lingkungan, dengan melibatkan petani/keompok tani/PPAH dan Klinik PHT secara langsung. Gerakan Pengendalian (Gerdal) OPT diawali dengan pertemuan koordinasi untuk memadukan (integrasi), serta menyelaraskan pelaksanaan pengendalian OPT di lapangan. Gerakan pengendalian OPT antara lain dilaksanakan dengan penyediaan sarana prasarana pengendalian OPT, pembinaan teknis, monitoring dan pelaporan.

Dilaksanakan dengan menggunakan bahan dan cara pengendalian OPT yang ramah lingkungan, dengan melibatkan petani/kelompok tani/PPAH dan Klinik PHT secara langsung. Diawali dengan pertemuan koordinasi untuk memadukan (integrasi), serta menyelaraskan pelaksanaan pengendalian OPT di lapangan. Gerakan pengendalian OPT antara lain dilaksanakan dengan penyediaan sarana prasarana pengendalian OPT, pembinaan teknis, monitoring dan pelaporan.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Pengendalian OPT Hortikultura adalah Rp. 35.664.158.000, dengan sasaran 1.754 ha. Dari alokasi anggaran tersebut dirinci menjadi Rp. 31.337.500.000 melalui dana dekonsentrasi di Dinas Pertanian Provinsi dengan target 1.689 ha yang tersebar di 33 provinsi, sedangkan di pusat sebesar Rp. 4.326.658.000 termasuk dialokasikannya sebagai penyediaan/fasilitasi bahan Pengendalian OPT Cabai dan Bawang Merah seluas 65 ha yang dimanfaatkan untuk mengantisipasi terjadi serangan OPT yang bersifat eksplosif serta adaptasi, mitigasi DPI dan Bencana Alam. Dalam hal ini, bantuan pemerintah merupakan dukungan yang bersifat stimulan berupa sarana, peralatan dan atau dukungan operasional kegiatan.

Pengendalian OPT Cabai Bawang di tingkat provinsi, dilaksanakan oleh jajaran UPTD BPTPH, LPHP/LAH/ Klinik PHT, PPAH/Pos IPA, guna mendukung terlaksananya pengembangan kawasan hortikultura di tingkat lapang. Komponen kegiatan berupa pembinaan/supervisi, bimbingan teknis, monitoring serta fasilitasi sarana prasarana pengendalian OPT hortikultura ramah lingkungan. Pelaksanaan gerakan pengendalian OPT hortikultura diarahkan pada daerah serangan endemis, daerah sumber infeksi, daerah serangan baru, serta daerah eksplosif serangan OPT.

**Tabel 23. Realisasi Pelaksanaan Pengendalian OPT Cabai dan Bawang
TA. 2018**

No	Provinsi	Target (ha)	Realisasi (ha)	%	Pagu Anggaran (Rp.000)	Realisasi Anggaran (Rp.000)	%	Kategori
1	Aceh	50	50	100	875.000	844.900	96,56	Berhasil
2	Sumatera Utara	65	65	100	1.137.500	1.115.535	98,07	Berhasil
3	Sumatera Barat	65	65	100	1.137.500	1.124.977	98,9	Berhasil
4	Riau	45	45	100	787.500	710.309	90,2	Berhasil
5	Kepulauan Riau	20	20	100	350.000	226.929	64,84	Berhasil
6	Jambi	60	60	100	1.050.000	1.048.636	99,87	Berhasil
7	Bengkulu	50	50	100	875.000	875.000	100	Berhasil
8	Sumatera Selatan	58	58	100	1.015.000	988.776	97,42	Berhasil
9	Lampung	55	55	100	962.500	958.117	99,54	Berhasil
10	Jawa Barat	95	95	100	2.190.500	2.181.174	99,57	Berhasil
11	Jawa Tengah	95	95	100	2.242.500	2.114.311	94,28	Berhasil
12	DI Yogyakarta	40	40	100	700.000	672.155	96,02	Berhasil
13	Jawa Timur	85	85	100	2.015.500	1.914.045	94,97	Berhasil
14	Bali	45	45	100	787.500	766.446	97,33	Berhasil
15	Banten	40	40	100	700.000	699.450	99,92	Berhasil
16	Bangka Belitung	35	35	100	612.500	516.326	84,3	Berhasil
17	Nusa Tenggara Barat	70	70	100	1.225.000	1.209.364	98,72	Berhasil
18	Nusa Tenggara Timur	45	45	100	787.500	762.872	96,87	Berhasil
19	Kalimantan Barat	40	35	87,50	700.000	687.084	98,15	Berhasil
20	Kalimantan Tengah	40	35	87,50	700.000	628.285	89,76	Berhasil
21	Kalimantan Selatan	60	60	100	1.050.000	1.023.126	97,44	Berhasil
22	Kalimantan Timur	45	45	100	787.500	778.232	98,82	Berhasil
23	Sulawesi Utara	50	50	100	875.000	871.752	99,63	Berhasil
24	Sulawesi Tengah	51	51	100	892.500	891.912	99,93	Berhasil
25	Sulawesi Selatan	70	70	100	1.225.000	1.210.484	98,81	Berhasil
26	Sulawesi Tenggara	40	40	100	844.000	837.912	99,28	Berhasil
27	Sulawesi Barat	33	33	100	577.500	576.260	99,79	Berhasil
28	Maluku	55	55	100	962.500	962.300	99,98	Berhasil
29	Maluku Utara	37	37	100	647.500	647.500	100	Berhasil
30	Papua	45	45	100	787.500	785.050	99,69	Berhasil
31	Papua Barat	45	45	100	787.500	781.500	99,24	Berhasil
32	Gorontalo	45	45	100	787.500	781.921	99,29	Berhasil
33	Kalimantan Utara	15	15	100	262.500	159.053	60,59	Berhasil
34	Pusat	65	65	100	4.326.658	4.278.889	60,59	Berhasil
Total		1754	1744	94,33	35.664.158	34.630.582	94,36	

Sumber : Direktorat Perlindungan Hortikultura, 2019

Pengendalian OPT Cabai dan Bawang di tingkat pusat yang dialokasikan pada Direktorat Perlindungan Hortikultura/Pusat berupa sarana prasarana pengendalian OPT cabai dan bawang merah serta hortikultura

lainnya seluas 65 hektar dengan anggaran sebesar Rp. 197.500.000 pengadaan sarana antisipasi dan penanggulangan DPI/BA seluas 7 hektar dengan anggaran sebesar Rp. 52.500.000. Sarana prasarana pengendalian OPT tersebut adalah antraktan ME cair dan padat, insektisida, perangkat likat kuning, perangkat lampu portabel, feromon sex, trichoderma, dan pompa air terealisasi 100% pada tanggal 15 Oktober 2018. Sarana prasarana pengendalian OPT tersebut sebagian besar sudah didistribusikan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Champion cabai dari 33 kabupaten sentra cabai seluruh Indonesia, terdiri dari: 400 antraktan ME padat (20 hektar) dan 400 lembar perangkat likat kuning (10 hektar);
- b. UPTD BPTP Provinsi DI Yogyakarta, terdiri dari 34 liter antraktan ME cair (34 hektar) dan 100 lembar likat kuning (2,5 hektar);
- c. UPTD BPTPH Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari 3 pompa air (3 hektar);
- d. Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Kidul, terdiri dari 2 pompa air (2 hektar).

Beberapa sarana prasarana pengendalian OPT yang masih tersimpan di gudang Direktorat Perlindungan diperuntukkan sebagai bahan persediaan/cadangan. Selanjutnya, pendistribusiannya menunggu permintaan bantuan sarana prasarana pengendalian OPT dari Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/kelompok tani/Gapoktan/pelaku usaha hortikultura.

Selain itu dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Pengendalian OPT di tingkat Pusat dilaksanakan juga kegiatan pengadaan cadangan bahan pengendali OPT hortikultura dalam keadaan mendesak dengan nilai anggaran sebesar Rp. 200.000.000 untuk pelaksanaan Gerakan

Pengendalian OPT Cabai sebanyak 4 kali dengan satuan biaya Rp. 50.000.000.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian pada kegiatan pengadaan cadangan bahan pengendali OPT hortikultura dalam keadaan mendesak sudah dilaksanakan sebesar 100% dan sudah didistribusikan untuk:

- a. Kegiatan Korporasi Bawang Merah berbasis kawasan hortikultura untuk Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah sentra produksi hortikultura di Jawa Timur yang tersebar di beberapa kecamatan. Pada tahun 2018, Kecamatan Ngantang dan Pujon terpilih untuk menjadi *Pilot Project* Kawasan Bawang Merah berbasis korporasi. Bantuan tersebut diserahkan melalui Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Malang, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Perangkat Likat kuning 820 lembar
 - 2) Sex Feromon 820 buah
 - 3) Perangkat lampu portable 62 buah
- b. Pengendalian Lalat Buah pada Salak di DI Yogyakarta. Pengendalian lalat buah akan efektif apabila dilakukan secara massal, serentak, dalam area luas, dan kontinyu. Untuk membuat *action plan* penanganan lalat buah 3 tahun ke depan diselenggarakan dengan tujuan untuk menghimpun masukan-masukan dalam penanganan lalat buah dari pakar, praktisi, pelaku usahatani, dan petani. Adanya serangan lalat buah (*Bactrocera papaye* dan *B.carambola*) pada salak telah menyebabkan dihentikannya ekspor buah salak ke Australia dan New Zealand. Beberapa upaya pengendalian lalat buah telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat (Direktorat Perlindungan Hortikultura) ke Kecamatan Turi, Pakem, dan Tempel. Bantuan tersebut diserahkan

melalui petugas UPTD BPTPH Provinsi DI Yogyakarta, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Antraktan ME Cair 28 liter
- 2) Antraktan ME (padat) 1,885 buah

Kegiatan pengendalian OPT di daerah dilaksanakan oleh jajaran UPTD BPTPH di 33 provinsi, yang merupakan stimulan untuk mendukung terlaksananya Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura di lapang. Pelaksanaannya dalam bentuk : pembinaan/supervisi, bimbingan teknis, fasilitasi sarana prasarana pengendalian OPT hortikultura yang ramah lingkungan kepada kelompok tani. Pelaksanaan gerakan pengendalian OPT hortikultura di lapang, diarahkan pada daerah serangan endemis, daerah sumber infeksi, daerah serangan baru, dan daerah eksplosif dengan melibatkan petani/kelompok tani/PPAH/Pos IPAH dan Klinik PHT binaan LPHP/LAH secara langsung sebagai upaya pengelolaan OPT agar tidak menimbulkan kerugian secara nyata.

3.4.4. Fasilitas Teknis Dukungan Perlindungan Hortikultura

1. Pelaksanaan Bimbingan Teknis/Pendampingan/Sosialisasi

Komponen ini telah dilaksanakan mulai Januari - Desember 2018 dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura 2018. Kegiatan ini meliputi koordinasi, penyelenggaraan tertib administrasi dan dokumentasi, inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) lingkup Direktorat Perlindungan Hortikultura, peningkatan pelayanan ketata usahaan, serta penyediaan sarana penunjang lainnya.

2. Penyusunan Pedoman

Komponen ini telah dilaksanakan pada triwulan pertama tahun 2018, untuk menyediakan dan mendistribusikan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sistem

Perlindungan Hortikultura 2018 sebagai acuan jajaran UPTD BPTPH Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai pelaksana kegiatan di daerah.

3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - a. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi keberadaan lalat buah pada salak melalui forum *Focus Group Discussion* (FGD). Pertemuan ini dilakukan sebagai upaya penanganan serangan lalat buah (*B. papayae* dan *B. carambolae*) pada salak yang menyebabkan dihentikannya ekspor buah salak ke Australia dan New Zealand. Beberapa upaya pengendalian lalat buah telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura dan Dinas Pertanian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta Dinas Pertanian Kabupaten Sleman yang merupakan sentra produksi salak yang diekspor.

Rekomendasi dari FGD tersebut adalah:

1. Pengendalian lalat buah secara massal dan serentak dari seluruh *stakeholder*, petani, pedagang pengumpul.
2. Gerakan pengendalian lalat buah ramah lingkungan dengan pemasangan perangkap, sanitasi kebun, pembuangan/ penanganan buah salak busuk yang merupakan sumber infeksi dan penyebaran lalat buah.
3. Dukungan Pemerintah Pusat, Daerah, dan eksportir dalam memotivasi dan menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam gerakan pengendalian lalat buah.
4. Sosialisasi cara pengendalian lalat buah pada salak kepada petani, pengepul.

5. Beberapa teknologi pengendalian lalat buah yang dapat diterapkan, yaitu: pemusnahan serangga jantan secara massal (pemasangan perangkap ME) umpan protein, dan sanitasi, pemberdayaan dan konservasi musuh alami, teknik serangga jantan mandul menggunakan irradiasi sinar gamma, dan perlakuan buah dengan menggunakan irradiasi sinar gamma (perlakuan pasca panen).
- b. Menyelenggarakan FGD manggis sebagai upaya penanganan kutu putih dan semut. Adanya kendala ekspor manggis Indonesia dikarenakan oleh beberapa hal, diantaranya: a) Perubahan persyaratan fitosanitari dan strategi dagang negara tujuan ekspor; b) Adanya OPT kutu putih dan semut; c) Jumlah kebun yang teregistrasi masih terbatas; d) Rumah kemas yang teregistrasi belum terdapat di setiap sentra produksi manggis; e) Jalur transportasi langsung ke negara tujuan utama ekspor tidak terdapat diseluruh sentra produksi buah manggis.

Rekomendasi dari FGD manggis adalah:

1. Pemangkasan tajuk untuk mencegah bertemunya tajuk terutama dengan tanaman inang utama kutu putih yaitu kabocha, sirsak, dan jambu biji.
2. Mencegah tumpang sari dengan tanaman kakao, kobucha, sirsak dan jambu biji.
3. Penggunaan lem perangkap pada batang manggis
4. Menjaga kebersihan kebun karena semut membuat sarangnya dari seresah-seresah yang ada di sekitar kebun.
5. Untuk penanganan semut di gudang, dilakukan dengan beberapa jenis umpan yang dikombinasikan pestisida berbahan aktif

fipronil, antara lain umpan ikan tuna (sebagai sumber protein), umpan gula, abon kelapa dan madu. Hasilnya menunjukkan bahwa umpan ikan tuna dengan campuran fipronil (konsentrasi 0,001%) cukup efektif untuk mengendalikan semut karena fipronil dapat memandulkan ratu semut dan membunuh semut yang berada di dalam sarangnya.

6. Fumigasi dengan menggunakan *Ethyl formate* 25 g/m³ yang dikombinasikan dengan 50% CO₂ mampu mengeradikasi semut hitam dan *mealybugs*.

Perkembangan registrasi kebun manggis dan rumah kemas dalam rangka ekspor ke China, sebagai berikut:

1. Melibatkan Dinas Pertanian, Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD), Barantan dan *General Administration of People's Republic of China* (GACC);
 2. Pendaftaran eksportir ke GACC 1 kali per musim panen, waktu persetujuan bisa mencapai 2 minggu;
 3. Rumah kemas di Sumatera Utara dan Yogyakarta berminat untuk diregistrasi dan didaftarkan ke GACC, China.
- c. Komponen Evaluasi Sistem Perlindungan Hortikultura 2018 dan Koordinasi persiapan Kegiatan 2019 dilaksanakan di Denpasar-Bali pada tanggal 14-17 November 2018. Pertemuan dihadiri oleh Kepala UPTD BPTPH dari 32 (tiga puluh dua) provinsi dan perwakilan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara, Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dari 34 provinsi seluruh Indonesia, BBPOPT Jatisari, serta pejabat struktural dan fungsional lingkup Direktorat Perlindungan Hortikultura. Pertemuan dibuka oleh Direktur Perlindungan

Hortikultura, yang dilanjutkan dengan diskusi terbuka terkait pelaksanaan kegiatan 2018 dan persiapan pelaksanaan 2019. Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan kunjungan lapang ke lokasi Sub Terminal Agribisnis (STA) Sari Buah dan *Packing House* PT. Manggis Elok Utama.

3.4.4. Dukungan Pengendalian OPT Hortikultura Lainnya

Salah satu peran perlindungan hortikultura selain mengamankan produksi dari serangan OPT dan DPI adalah menjamin produksi, mutu, dan keamanan pangan. Keberhasilan perlindungan tanaman dicerminkan dengan menurunnya kerusakan dan kehilangan hasil tanaman karena serangan OPT dan DPI serta menurunnya residu pestisida pada produk hortikultura sehingga memenuhi persyaratan aman konsumsi dan ekspor.

Upaya meningkatkan produksi dan mutu hasil hortikultura yang aman untuk dikonsumsi, ramah lingkungan, serta memenuhi persyaratan ekspor, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan pendukung gerakan pengendalian OPT antara lain:

1. Sinergisme sistem perlindungan hortikultura untuk pemenuhan persyaratan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS)-*World Trade Organization* (WTO)

Dalam proses pelaksanaan ekspor produk hortikultura, salah satu persyaratan teknis (*Technical Information*) yang harus dipenuhi adalah tersedianya daftar OPT (*pest list*) produk yang akan diekspor serta jaminan keamanan pangan dalam bentuk produk hortikultura bebas dari residu pestisida serta logam berat.

International Plant Protection Convention (IPPC) mempersyaratkan agar setiap negara anggota WTO termasuk Indonesia untuk

menyusun, menyediakan, dan memperbaharui secara berkala daftar OPT (*pest list*) untuk masing-masing jenis komoditas yang diekspor. *Pest list* tersebut akan digunakan sebagai bahan pembanding oleh negara tujuan ekspor untuk mencegah masuknya OPTK. *Pest list* tersebut disusun berdasarkan hasil pelaksanaan surveilans sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan di dalam *International Standard Phytosanitary Measure* (ISPM) No. 6. Untuk memenuhi hal tersebut, Direktorat Perlindungan Hortikultura telah melaksanakan surveillans OPT komoditas potensi ekspor pada komoditas buah dan sayuran. Surveilans dilaksanakan pada daerah sentra produksi dengan melibatkan pakar dari perguruan tinggi, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Litbangtan), Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati (PKTKHN), Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian (BUTTMKP), Dinas Pertanian provinsi/kabupaten, UPTD BPTPH, dan LPHP/LAH.

Capaian yang dihasilkan pada tahun 2018 adalah tersusunnya 4 (empat) *draft pestlist* komoditas potensi ekspor yaitu *draft pestlist* OPT nenas, *Polyscias* sp. bawang merah, dan paprika.

Dalam rangka dibukanya kembali pasar ekspor manggis ke China, serta untuk memberikan justifikasi ilmiah terkait penolakan ekspor salak ke Australia dan New Zealand karena adanya lalat buah, maka Direktorat Perlindungan Hortikultura selaku anggota *National Plant Protection Organization* (NPPO) melaksanakan FGD pengelolaan lalat buah pada salak dan FGD pengelolaan semut dan kutu putih pada manggis yang melibatkan pakar (perguruan tinggi/Badan litbangtan), instansi terkait (PKTKHN, Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/UPTD BPTPH, eksportir, petani salak dan manggis). Capaian yang dihasilkan adalah disepakatinya *Action plan*

3 (tiga) tahun ke depan terkait pengelolaan lalat buah pada salak serta kutu putih dan semut pada manggis.

Untuk memberikan pemahaman terhadap petugas perlindungan hortikultura dan petani terkait standar teknis persyaratan ekspor, Direktorat Perlindungan Hortikultura juga melaksanakan pendampingan teknis dalam rangka persiapan ekspor di *on farm* (kebun) maupun *off farm* (pascapanen). Pelaksanaan pendampingan teknis ditekankan pada pengelolaan OPT di kebun, pascapanen (*collecting house* dan *packing house*). Fokus pendampingan teknis adalah petugas, petani/kelompok tani komoditas manggis, buah naga, *Polyscias* sp., mangga, nenas, pisang, salak, bawang merah, cabai, paprika, jahe.

Untuk memberikan jaminan keamanan pangan produk hortikultura terkait adanya kandungan residu pestisida, Direktorat Perlindungan Hortikultura telah melaksanakan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan OPT hortikultura ramah lingkungan serta penggunaan pestisida yang baik dan benar. Selain itu, dilakukan pengambilan sampel produk hortikultura (buah dan sayuran) untuk dianalisa kandungan residu pestisidanya. Capaian yang dihasilkan adalah hasil analisa residu pestisida di bawah Batas Maksimum Residu (BMR) Pestisida. Hasil Pengujian Residu Pestisida pada Komoditas Buah disajikan pada Tabel 24 sedangkan hasil pengujian analisa residu pestisida pada komoditas cabai, bawang merah dan sayuran lainnya pada lampiran 7.

Tabel 24. Hasil Pengujian Residu Pestisida pada Komoditas Buah Tahun 2018

No	Komoditas	Bahan Aktif	Sampel Terdeteksi			TD	Ket
			<BMR	>BMR	BD (*)		
1	Strawberry	Sipermetrin	-	-	-	1	BP = 0.050 mg/kg)
		Difenokonazole	-	-	-	1	BP = 0.050 mg/kg)
		Azoksistobin	-	-	-	1	BP = 0.050 mg/kg)
2	Jeruk Dekapon	Sipermetrin	-	-	-	1	BP = 0.050 mg/kg)
		Difenokonazole	-	-	-	1	BP = 0.050 mg/kg)
		Azoksistobin	-	-	-	1	BP = 0.050 mg/kg)
3	Jeruk Nipis	Profenofos	-	-	-	1	BP = 0.050 mg/kg)
4	Jeruk Siam Bali	Difenokonazole	-	-	-	1	BP = 0.025 mg/kg)
		Azoksistobin	-	-	-	1	BP = 0.025 mg/kg)
5	Mangga Gedong	Sipermetrin	-	-	-	1	BP = 0.002 mg/kg)
		Metomil	-	-	-	1	BP = 0.00001%)
6	Jeruk Siem	Abamektin	-	-	-	1	BP = 0.0011 mg/kg)
		Difenokonazole	-	-	-	1	BP = 0.002 mg/kg)
7	Mangga Gedong	Abamektin	-	-	-	1	BP = 0.0011 mg/kg)
8	Mangga Gedong	Azoxistobin	-	-	-	1	BP = 0.050 mg/kg)
		Difenokonazole	-	-	-	1	BP = 0.050 mg/kg)
9	Mangga Arumanis	Imidakloprid	-	-	-	1	BP = 0.050 mg/kg)
		Lamda	-	-	-	1	BP = 0.020 mg/kg)
		Sihalotrin	-	-	-	1	BP = 0.020 mg/kg)
10	Mangga Cengkir	Metil tiofanat	-	-	-	1	BP = 0.050 mg/kg)
	Jumlah	19 Bahan aktif	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	19 (100%)	

Sumber : Direktorat Perlindungan Hortikultura, 2019

Keterangan:

BD (*) = Belum Ditetapkan dengan Nilai BMR kandungan bahan Bahan aktif pada komoditas tersebut belum ditetapkan oleh Menteri Pertanian (Permentan No.55/Permentan/KR.040/11/2016) tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan.

TD = Tidak Terdeteksi

BP = Batas Penetapan

Dari 19 (sembilan belas) sampel bahan aktif yang diuji pada 10 (sepuluh) sampel buah dengan menggunakan uji kromatografi gas, kromatografi cair kinerja tinggi, *Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry* (LCMSMS) tidak ada satupun yang terdeteksi atau dengan kata lain 100% sampel tidak terdeteksi.

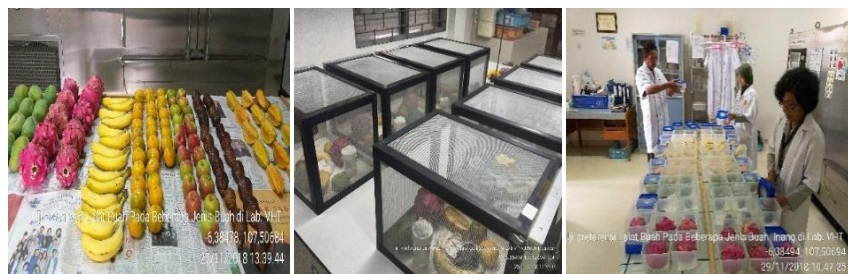
2. Peramalan OPT Hortikultura

Peramalan OPT Hortikultura dilaksanakan di Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT) Jatisari, dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan pengelolaan OPT yang mencakup peramalan OPT, pergeseran spesies OPT, antisipasi munculnya OPT “baru”, disinfestasi lalat buah, perawatan koleksi referensi OPT hortikultura, serta operasional laboratorium *Vapor Heat Treatment* (VHT). Rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan tersebut, selanjutnya dimanfaatkan oleh petani hortikultura dalam mengantisipasi terjadinya serangan OPT di lahan usaha taninya.

- a. Kegiatan perbanyakan (*rearing*) lalat buah merupakan kegiatan rutin hortikultura dilaksanakan di laboratorium VHT BBPOPT Jatisari yang bertujuan untuk menyediakan populasi lalat buah dalam jumlah yang cukup, baik kualitas maupun kuantitas untuk keperluan berbagai pengujian. Jenis lalat buah yang diperbanyak secara massal ada 4 spesies yaitu *Bactrocera papayae*, *B. carambolae*, *B. cucurbitae*, dan *B. Albistrigata*. Populasi lalat buah yang diperbanyak (*rearing*) secara masal untuk masing-masing spesies lebih dari 10.000 ekor. Selanjutnya dilakukan *rearing* lalat buah yang berasal dari buah inang untuk tujuan mengklarifikasi spesies lalat buah yang muncul dari buah inang.
- b. Selain itu, juga telah dilakukan uji preferensi lalat buah pada beberapa jenis buah. Kegiatan ini dilaksanakan di Laboratorium VHT, BBPOPT Jatisari pada tahun 2018. Buah uji yang digunakan sebanyak 7 (tujuh) jenis buah yaitu buah naga, salak, mangga Harumanis, belimbing, pisang, jeruk dan apel, yang sudah terbebas dari infeksi lalat buah. Lalat buah yang digunakan adalah 3 spesies

yaitu *B. cucurbitae*, *B. carambolae*, dan *B. papayae*, hasil perbanyakan (*rearing*) di Laboratorium VHT.

- c. Berdasarkan hasil pengujian preferensi inang dari lalat buah didapat bahwa *B. cucurbitae* lebih tertarik meletakkan telur pada buah naga. Spesies *B. papayae* hampir semua komoditas buah terinfestasi lalat buah kecuali buah naga. Komoditas yang paling tinggi terinfestasi lalat buah *B. papayae* adalah pisang (535,25 ekor), diikuti mangga (352,00 ekor), belimbing (212 ekor), apel (70,00 ekor), salak (62,00 ekor) dan jeruk (13,25 ekor). Hal tersebut diduga dalam pemilihan inang lalat buah bergantung ukuran, bentuk buah, warna buah, aroma dan mungkin juga kandungan kimia buah. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa lalat buah spesies *B. cucurbitae* dan *B. carambolae* lebih tertarik meletakkan telur pada buah naga, sedangkan *B. papayae* lebih tertarik pada buah pisang, mangga dan belimbing.



Gambar 19. Uji Preferensi Buah Inang Lalat Buah (*Bactrocera papayae*, *B. cucurbitae* dan *B. carambolae*) di Laboratorium VHT BBPOPT Jatisari, 2018

d. Uji perkembangan larva lalat buah pada buah naga

Kajian perkembangan larva lalat buah pada buah naga bertujuan untuk mengetahui perkembangan larva lalat buah pada buah naga dengan ukuran yang seragam. Lalat buah yang digunakan adalah 4 (empat) spesies yaitu *B. carambolae*, *B. papayae*, *B. cucurbitae*, dan *B. albistrigata*.



Gambar 20. Uji Perkembangan Larva Lalat Buah pada Buah Naga

e. Uji pupasi lalat buah

Kajian ini dilaksanakan dengan 3 (tiga) jenis media yaitu serbuk kayu/gergaji, pasir dan tanah. Lalat buah yang digunakan adalah spesies *B. papayae*. Hasil kajian menunjukkan bahwa pada kedalaman 30 cm, 40 cm dan 50 cm untuk media serbuk kayu dan pasir, pupa lalat buah masih dapat menjadi imago, sedangkan untuk media tanah pada semua kedalaman seluruh pupa mati. Hasil kajian tersebut dapat dijadikan sebagai informasi bahwa pengendalian lalat buah dengan pembenaman, sebaiknya ditimbun dengan tanah atau pada tanah berpasir, ditanamkan dengan kedalaman lebih dari 50 cm.



Gambar 21. Kajian Pupasi Lalat Buah pada Berbagai Jenis Media Pupasi (serbuk kayu/gergaji, pasir dan

f. Identifikasi lalat buah hasil pengambilan sampel dari lapangan

Identifikasi dilakukan dengan pengambilan sampel lalat buah di Yogyakarta dan Banjarnegara, Jawa Tengah, yang bertujuan untuk konfirmasi tanaman inang beserta spesiesnya di tingkat lapang. Pelaksanaannya meliputi pengambilan sampel buah yang diduga terserang lalat buah dari kebun buah salak. Buah salak sebagai sampel yang diduga terserang lalat buah diambil dan dibawa ke Laboratorium VHT BBPOPT Jatisari untuk diinkubasi hingga muncul lalat buah dewasa. Kemudian lalat buah dewasa di *rearing* untuk diidentifikasi secara morfologi dengan pedoman buku identifikasi. Berdasarkan hasil identifikasi lalat buah yang ditemukan pada buah salak dari Sleman, Yogyakarta adalah spesies *Bactrocera papayae*. Oleh karena itu, dinyatakan buah salak merupakan inang dari lalat buah (*Host plant status*).



Lalat buah pada buah salak (hasil identifikasi spesies *Bactrocera papayae*) lokasi Sleman, Yogyakarta,

Monitoring (pemasangan trap) Sleman, Yogyakarta, 2018

Gambar 22. Identifikasi Lalat Buah Hasil Pengambilan Sampel Dari Lapangan

g. Pengembangan model peramalan OPT hortikultura

Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan model peramalan OPT hortikultura yang meliputi pengumpulan data dan informasi keadaan OPT, rekapitulasi data dan analisis data. Keluaran/Output kegiatan ini adalah tersedianya model peramalan OPT hortikultura spesifik lokasi.

Peramalan dilaksanakan pada setiap akhir musim tanam agar digunakan sebagai bahan perencanaan pengelolaan OPT pada musim tanam selanjutnya. Data yang digunakan untuk meramal luas serangan yang akan terjadi pada musim yang akan datang berdasarkan luas serangan yang terjadi pada 1 musim atau 2 musim yang lalu.

Adapun tahapan penyusunan model peramalan serangan OPT yang dilakukan di DI. Yogyakarta dan Jawa Barat adalah pengumpulan data dari petugas lapang per musim tanam, pengolahan data, analisa data peramalan OPT tanaman hortikultura dan perkiraan serangan musim yang akan datang musim kering dan musim hujan, uraian tentang kemungkinan terjadinya serangan OPT di lapangan dan antisipasi pengendalian OPT.

Pengembangan model peramalan ini telah dilaksanakan di DI. Yogyakarta dan Jawa Barat dengan hasil model peramalan sebagai berikut:

DI. Yogyakarta

1. Model ramalan Antraknose (*Colletotrichum capsici*) pada tanaman cabai. Serangan antraknose pada cabai saat musim hujan dapat diprediksi atau diperkirakan pada musim kemarau/musim sebelumnya dengan kontribusi sebesar 64%,

sedangkan serangan antraknose pada cabai saat musim kemarau dapat diprediksi atau diperkirakan pada musim hujan/musim sebelumnya dengan kontribusi sebesar 73%.

2. Model ramalan lalat buah (*Bactrocera* spp.) pada tanaman cabai musim hujan dan musim kemarau. Serangan lalat buah pada cabai saat musim hujan dapat diprediksi atau diperkirakan pada musim kemarau/musim sebelumnya dengan kontribusi sebesar 72%, sedangkan serangan lalat buah pada cabai saat musim kemarau dapat diprediksi atau diperkirakan pada musim hujan/musim sebelumnya dengan kontribusi sebesar 77%.

Provinsi Jawa Barat

1. Model ramalan Antraknose (*Colletotrichum capsici*) pada tanaman cabai. Serangan antraknose pada cabai saat musim hujan dapat diprediksi atau diperkirakan pada musim kemarau/musim sebelumnya dengan kontribusi sebesar 77%, sedangkan serangan antraknose pada cabai saat musim kemarau dapat diprediksi atau diperkirakan pada musim hujan/musim sebelumnya dengan kontribusi sebesar 62%.
2. Model ramalan lalat buah (*Bactrocera* spp) pada tanaman cabai. Serangan lalat buah pada cabai saat musim hujan dapat diprediksi atau diperkirakan pada musim kemarau/musim sebelumnya dengan kontribusi sebesar 79%, sedangkan serangan lalat buah pada cabai saat musim kemarau dapat diprediksi atau diperkirakan pada musim hujan/musim sebelumnya dengan kontribusi sebesar 75%.
3. Model ramalan Trips (*Scirtothrips dorsalis*) pada tanaman cabai. Serangan trips pada cabai saat musim hujan dapat

diprediksi atau diperkirakan pada musim kemarau/musim sebelumnya dengan kontribusi sebesar 85%, sedangkan serangan trips pada cabai saat musim kemarau dapat diprediksi atau diperkirakan pada musim hujan/musim sebelumnya dengan kontribusi sebesar 87%.

h. Adaptasi/Mitigasi Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan Bencana Alam (BA)

Perubahan iklim menimbulkan pola curah hujan dan kejadian iklim yang ekstrem, peningkatan suhu udara dan peningkatan muka air laut yang dapat mempengaruhi produksi pertanian dan kondisi sosial ekonomi petani. DPI pada sektor pertanian yaitu hilangnya atau rusaknya keanekaragaman dalam lingkungan, hilangnya tanah subur di sekitar pantai akibat naiknya air laut, meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem yang menimbulkan bencana banjir dan kekeringan, serta dapat menyebabkan meningkatnya serangan OPT. Perubahan iklim yang menyebabkan perubahan pola curah hujan dan tidak menentu musim kemarau seringkali menyebabkan kacanya pola tanam dan aktivitas petani. Untuk membantu petugas/petani memahami penentuan awal musim tanam dan menentukan pola tanam pada komoditas hortikultura diperlukan koordinasi dengan sejumlah pihak seperti pemerintah daerah.

Kegiatan yang telah dilakukan terkait adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim antara lain :

1. Merangkum informasi dan membuat rekomendasi terkait analisis curah hujan dari BMKG

2. Merangkum informasi dan membuat rekomendasi terkait analisis ketersediaan air tanah dari BMKG.
 3. Merangkum informasi dan membuat rekomendasi terkait iklim dan lingkungan dari BMKG
 4. Menyebarkan informasi ke pemerintah daerah dan rekomendasinya terkait prakiraan curah hujan dan sifat hujan dari BMKG.
- i. Penguatan Kelembagaan OPT

Kelembagaan Perlindungan Hortikultura merupakan garda terdepan penerapan budidaya ramah lingkungan sesuai prinsip PHT dalam mendukung pengamanan produksi komoditas strategis hortikultura. Pengembangan kelembagaan OPT di daerah diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terutama dalam hal penyediaan teknologi pengendalian OPT spesifik lokasi, serta sebagai pusat pengembangan agens hayati ramah lingkungan. Kegiatan Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP), Laboratorium Agensia Hayati (LAH), difokuskan untuk mendukung gerakan pengendalian OPT meliputi eksplorasi, pengembangan agens hayati dan perbanyakan bahan standard/stater/biang agens hayati yang akan diperbanyak oleh Klinik PHT dan Pos Pelayanan Agens Hayati (PPAH). Pendampingan penguatan kelembagaan dilakukan pada LPHP/LAH pada sentra produksi pengembangan kawasan hortikultura yang pada tahun 2018 dilaksanakan pada 150 LPHP/LAH dan Klinik PHT di 31 UPTD BPTPH. Untuk meningkatkan pelayanan sistem manajemen mutu LPHP, maka

tahun 2018 telah dilakukan penguatan kelembagaannya sesuai ISO 9001: 2015, melalui sertifikasi LPHP/LAH di 11 LPHP/LAH, yaitu:

1. LPHP Bandar Buat, Sumatera Barat
2. LPHP Gadingrejo, Lampung
3. LAH Gorontalo
4. LAH Kalasey, Sulawesi Utara
5. LPHP/LAH Biromaru, Sulawesi Tengah
6. LPHP Celuk, Bali
7. LPHP Madiun, Jawa Timur
8. LPHP Narmada, NTB
9. LPHP Cianjur, Jawa Barat
10. LPHP Sungai Tabuk, Kalimantan Selatan
11. LPHP Passo, Maluku

Pada tahun 2018 juga telah dilaksanakan re-sertifikasi pada 3 LPHP/LAH yaitu LPHP Maros, LPHP Bukittinggi dan LPHP Banyumas. Selain itu pada tahun 2018 juga telah dilakukan surveillans untuk mendapatkan perpanjangan sertifikasi 2 LPHP yaitu LPHP Temanggung dan LPHP Bantul.

Tabel 25. Realisasi Sertifikasi LPHP/LAH 2018*)

No.	Provinsi/Satker	Target (LPHP)	Realisasi (LPHP)	%	Kategori
1	Sumatera Barat	1	1	100	Berhasil
2	Lampung	1	1	100	Berhasil
3	Gorontalo	1	1	-	Belum
4	Sulawesi Utara	1	1	-	Belum
5	Sulawesi Tengah	1	1	100	Berhasil
6	Bali	1	1	-	Belum
7	Jawa Timur	1	1	100	Berhasil
8	Nusa Tenggara Barat	1	1	100	Berhasil
9	Jawa Barat	1	1	100	Berhasil
10	Kalimantan Selatan	1	1	-	Belum
11	Maluku	1	1	-	Belum

*) Realisasi sertifikasi LPHP/LAH s.d Februari 2019



Gambar 233. LPHP Narmada, Nusa Tenggara Barat dan Bandar Buat, Sumatera Barat yang telah disertifikasi ISO 9001 : 2015

j. Penyebarluasan informasi

Teknologi pengendalian OPT hortikultura telah banyak dihasilkan oleh lembaga penelitian, perguruan tinggi, serta kajian teknologi dari instansi terkait dimanfaatkan sebagai bahan referensi dalam penyusunan informasi teknis dalam bentuk buku, leaflet, dan berita yang dimuat dalam media massa. Pada tahun 2018 informasi teknis yang telah disusun dan disebarluaskan adalah:

1. Leaflet OPT pada Bawang Putih
2. Leaflet OPT Buah dan Florikultura (Pengendalian Hama Lalat Buah Pada Tanaman Salak)
3. Leaflet OPT Buah dan Florikultura (Bagaimana Mengatasi Hama Lalat Buah Pada Tanaman Salak)
4. Teknologi Adaptasi Mitigasi Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam Pada Cabai dan Hortikultura Lainnya.

Kegiatan penyebaran informasi perlindungan hortikultura juga dilakukan dengan publikasi melalui tabloid Sinar Tani edisi bulan April 2018, dengan judul Waspada Penyakit Karat Daun pada Bawang Daun.

3.5. Capaian Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

3.5.1. Sertifikasi Standar, Mutu dan Pemasaran Hortikultura

Kegiatan sertifikasi standar, mutu dan pemasaran hortikultura pada tahun 2018 sebanyak 100 unit, dialokasikan pada 22 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur,

Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bengkulu dan Banten.

Berdasarkan pengukuran kinerja sertifikasi standar, mutu dan pemasaran hortikultura Tahun 2018, dari target output sebanyak 100 unit, dapat dicapai 85 unit (85%).

Beberapa daerah yang tidak dapat merealisasikan kegiatan sertifikasi standar, mutu dan pemasaran hortikultura adalah sebagai berikut :

1. Provinsi DIY tidak dapat merealisasikan targetnya, dari target sebanyak 6 unit, terealisasi 5 unit. Tidak tercapainya target ini, karena ada 1 (satu) kelompok tani yang mengundurkan diri dan tidak siap melaksanakan sertifikasi, menjelang dilaksanakannya sertifikasi. Kelompok tani yang tidak siap disertifikasi organik tersebut adalah Kelompok Tani Kumpul Makmur, Jamblangan, Purwobinangun, Pakem, Sleman.
2. Provinsi Aceh tidak dapat merealisasikan kegiatan sertifikasi standar mutu dan pemasaran hortikultura yang ditargetkan sebanyak 3 unit. Tidak terealisasinya kegiatan sertifikasi standar mutu dan pemasaran hortikultura, karena pada saat mengajukan revisi anggaran, ada perubahan peraturan terbaru, sehingga tidak dapat direvisi. Mutasi jabatan di Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh juga menjadi alasan keterlambatan pelaksanaan revisi anggaran.
3. Provinsi Kalimantan Selatan tidak dapat merealisasikan kegiatan sertifikasi standar mutu dan pemasaran hortikultura sebanyak 4 unit dengan alasan pada saat akan dilaksanakan, kondisi di lapangan sudah melewati masa panen.
4. Kegiatan Sertifikasi Standar, Mutu dan Pemasaran Hortikultura di Provinsi Sulawesi Utara dengan target output sebanyak 5 unit juga

tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut karena keterlambatan pelaksanaan kegiatan, sehingga tidak sempat melaksanakan proses sertifikasi, meski sudah melakukan penyusunan dokumen sistem mutu (doksistu);

5. Kegiatan Sertifikasi Standar, Mutu dan Pemasaran Hortikultura di Provinsi Jawa Tengah dengan target output sebanyak 6 unit juga tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut karena sulit untuk mendapatkan calon petani calon lokasi (cpcl) kelompok tani yang siap untuk disertifikasi organik.

Walaupun begitu, terdapat provinsi yang dapat merealisasikan kegiatan sertifikasi standar, mutu dan pemasaran hortikultura melebihi target yang ditetapkan, yaitu Provinsi Sumatera Selatan. Di Provinsi Sumatera Selatan, dari target sebanyak 5 unit, dapat direalisasikan sebanyak 9 unit.

Tabel 26. Realisasi Kegiatan Sertifikasi Standar, Mutu dan Pemasaran

No	Provinsi/Kab/ Kota	Target (Unit)	Realisasi (Unit)	%
1	Jawa Barat	6	6	100
2	Jawa Tengah	6	0	0
3	DIY	6	5	83,33
4	Jawa Timur	6	6	100
5	Aceh	3	0	0
6	Sumatera Utara	4	4	100
7	Sumatera Barat	6	6	100
8	Jambi	5	5	100
9	Sumatera Selatan	5	9	180
10	Lampung	5	5	100
11	Kalimantan Barat	2	2	100

No	Provinsi/Kab/ Kota	Target (Unit)	Realisasi (Unit)	%
12	Kalimantan Tengah	2	2	100
13	Kalimantan Selatan	4	0	0
14	Kalimantan Timur	3	3	100
15	Sulawesi Utara	5	0	0
16	Sulawesi Tengah	4	4	100
17	Sulawesi Selatan	6	6	100
18	Bali	6	6	100
19	Nusa Tenggara Barat	4	4	100
20	Nusa Tenggara Timur	3	3	100
21	Bengkulu	5	5	100
22	Banten	4	4	100
	Jumlah	100	85	85

Sumber : Aplikasi Simonev dan OmSPAN Kementerian Keuangan, 2019

3.5.2. Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah

Kegiatan Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah di daerah berjumlah 142 unit yang dialokasikan untuk 24 provinsi dan 21 kabupaten/kota. Alokasi dan realisasi kegiatan Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah dapat direalisasikan 100%. Rinciannya pada tabel berikut.

**Tabel 27. Realisasi Kegiatan Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan
Cabai dan Bawang Merah**

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Target (Unit)	Realisasi (Unit)	%
1	Jawa Barat		8	8	100
2		Bandung	4	4	100
3		Sumedang	2	2	100
4		Garut	2	2	100
5		Majalengka	3	3	100
6	Jawa Tengah		9	9	100
7		Grobogan	1	1	100
8		Temanggung	2	2	100
9		Magelang	4	4	100
10		Karanganyar	2	2	100
11	DIY		5	5	100
12	Jawa Timur		5	5	100
13		Banyuwangi	2	2	100
14		Malang	2	2	100
15		Lumajang	3	3	100
16	Aceh		4	4	100
17	Sumatera Utara		4	4	100
18		Simalungun	3	3	100
19	Sumatera Barat		5	5	100
20		Solok	2	2	100
21	Riau		3	3	100
22	Jambi		4	4	100
23	Sumatera Selatan		5	5	100
24	Lampung		6	6	100
25	Kalimantan Barat		2	2	100
26	Kalimantan Tengah		2	2	100
27	Kalimantan Selatan		2	2	100
28	Kalimantan Timur		4	4	100
29		Nunukan	2	2	100
30	Sulawesi Utara		3	3	100
31		Minahasa	2	2	100
32		Donggala	2	2	100
33	Sulawesi Selatan		2	2	100
34		Enrekang	6	6	100
35		Bantaeng	1	1	100
36		Bone	2	2	100

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Target (Unit)	Realisasi (Unit)	%
37	Sulawesi Tenggara		4	4	100
38	Bali		3	3	100
39		Tabanan	2	2	100
40	NTB	Lombok Timur	2	2	100
41	Bengkulu		3	3	100
42	Banten		4	4	100
43	Bangka Belitung		2	2	100
44	Gorontalo		2	2	100
		Jumlah	142	142	100

Sumber : Aplikasi Simonev dan OmSPAN Kementerian Keuangan, 2019

3.5.3. Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya

Kegiatan Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya pada tahun 2018 berjumlah 6 unit yang dialokasikan untuk sarana pascapanen dan pengolahan selain cabai dan bawang merah. Fasilitas pascapanen dan pengolahan hortikultura lainnya dialokasikan di 3 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat (1 unit), Provinsi Kalimantan Timur (1 unit) dan Provinsi Kepulauan Riau (4 unit).

Capaian kegiatan Fasilitas Pascapanen dan pengolahan hortikultura lainnya pada tahun 2018 adalah sebanyak 6 unit atau terealisasi semuanya.

3.5.4. Fasilitas Teknis Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Fasilitas teknis dukungan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura merupakan dukungan teknis untuk pengawalan dan pendampingan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura yang dialokasikan di pusat. Kegiatan fasilitas teknis dukungan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura antara lain dalam bentuk

bimbingan teknis pascapanen, bimbingan teknis pengolahan, bimbingan teknis jaminan mutu komoditas hortikultura strategis, pengawalan dan pendampingan serta monitoring dan evaluasi kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura. Target kegiatan fasilitasi teknis dukungan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura adalah 12 bulan dan dapat direalisasikan selama 12 bulan (100%).

Pencapaian Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018 secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 28. Pengukuran Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target *	Realisasi**	%	Kategori
1 Terpenuhinya standar mutu, nilai tambah dan daya saing produk hortikultura	1. Sertifikasi Standar, Mutu dan Pemasaran Hortikultura	Unit	100	85	85	Berhasil
	2. Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah	Unit	142	142	100	Berhasil
	3. Fasilitas Teknis Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Bulan	12	12	100	Berhasil
	4. Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya	Unit	6	6	100	Berhasil

Sumber : Aplikasi Simonev dan OmSPAN Kementerian Keuangan, 2019

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dapat dikatakan berhasil. Hal

ini dikarenakan adanya komitmen dan upaya keras dari Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura yang dilakukan melalui sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dan *stakeholders* untuk mewujudkan tercapainya kemajuan dan peningkatan kinerja pembangunan hortikultura.

Walaupun begitu terdapat beberapa daerah yang tidak dapat merealisasikan kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura pada tahun 2018. Pengukuran kinerja sertifikasi standar, mutu dan pemasaran hortikultura Tahun 2018, dari target output sebanyak 100 unit, terealisasi 85 unit (85%).

Realisasi anggaran berdasarkan output sebagai berikut :

1. Sertifikasi Standar, Mutu dan Pemasaran Hortikultura dengan jumlah anggaran Rp. 5.495.500.000,- sebanyak 100 unit, terealisasi sejumlah Rp. 4.365.747.218,- (79,44%) sebanyak 85 unit (85%).
2. Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah dengan jumlah anggaran Rp. 15.110.875.000,- dengan target output 142 unit dapat direalisasikan Rp. 14.572.983.627,- (96,44%), dengan realisasi output 142 unit (100%).
3. Fasilitas Teknis Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dengan jumlah anggaran Rp. 2.409.169.000,- dengan target output 12 bulan, dapat direalisasikan Rp. 2.374.440.532,- (98,56%), dengan realisasi output 12 bulan (100%).
4. Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya dengan jumlah anggaran Rp. 598.000.000,- dengan target output 6 unit dapat direalisasikan sebesar Rp. 566.487.750,- (94,73%) dengan realisasi output 6 unit (100%).

Tabel 29. Pengukuran Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018

Indikator Kinerja	Anggaran			Output		
	Anggaran	Realisasi Anggaran	Perse-ntase (%)	Tar-get	Reali-sasi	Perse-ntase
1. Sertifikasi Standar, Mutu dan Pemasaran Hortikultura (Unit)	5.495.500.000	4.365.747.218	79,44	100	85	85
2. Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah (Unit)	15.110.875.000	14.572.983.627	96,44	142	142	100
3. Fasilitas Teknis Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura (Bulan)	2.409.169.000	2.374.440.532	98,56	12	12	100
4. Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya (Unit)	598.000.000	566.487.750	94,73	6	6	100

Sumber : Aplikasi Simonev dan OmSPAN Kementerian Keuangan, 2019

Tabel 30. Realisasi Anggaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2018 Berdasarkan Kewenangan

Kewenangan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1. Pusat	2.409.169.000	2.374.440.532	98,56
2. Daerah	21.294.325.000	19.595.168.595	92,02
Total	23.703.494.000	21.969.609.127	92,69

Sumber : Aplikasi Simonev dan OmSPAN Kementerian Keuangan, 2019

Berdasarkan Tabel 30 dapat diketahui bahwa total realisasi anggaran kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura Rp. 21.969.609.127,- (92,69%) dari target Rp. 23.703.494.000,- (pusat dan daerah). Anggaran di daerah adalah sebesar Rp. 21.294.325.000,- dengan realisasi Rp. 19.595.168.595,- (92,02%). Sedangkan anggaran di pusat adalah sebesar Rp. 2.409.169.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.374.440.532,- (98,56%).

3.6. Capaian Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura

Pada tahun 2018 Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura memiliki tiga sasaran strategis dengan tujuh indikator kinerja sasaran kegiatan. Pencapaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018 secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 31. Pencapaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018

Sasaran Strategis	IKSK		Satuan	Target	Realisasi	Realisasi (%)	Kategori
Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura	1	Nilai AKIP Ditjen Hortikultura berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	Nilai	82,50			
	2	Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 214 tahun 2017)	%	73,75	79,44	107,72	Sangat Berhasil
Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel di lingkungan Direktorat	3	Rasio rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan	%	80	94,74	118,43	Sangat Berhasil

Sasaran Strategis	IKSK		Satuan	Target	Realisasi	Realisasi (%)	Kategori
Jenderal Hortikultura	4	Rasio tindaklanjut kejadian atas temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di lingkup Ditjen Hortikultura terhadap total kejadian atas temuan	%	80	53,72	67,15	Cukup Berhasil
Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura	5	Tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura	Skala likert 1-5	3,75	3,57	95,20	Berhasil
	6	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> eksternal terhadap layanan rekomendasi dan perijinan	Skala likert 1-5	3,75	3,76	100,26	Sangat Berhasil
	7	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan data dan informasi Hortikultura	Skala likert 1-5	3,75	3,63	96,82	Berhasil

Sumber : Aplikasi Simonev dan OmSPAN Kementerian Keuangan, 2019

3.6.1 Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura

Untuk mengukur sasaran kinerja pertama, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang diukur yaitu Nilai AKIP Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan Nilai Kerja (NK) (berdasarkan PMK 249 Tahun 2011).

a. Nilai AKIP

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP.

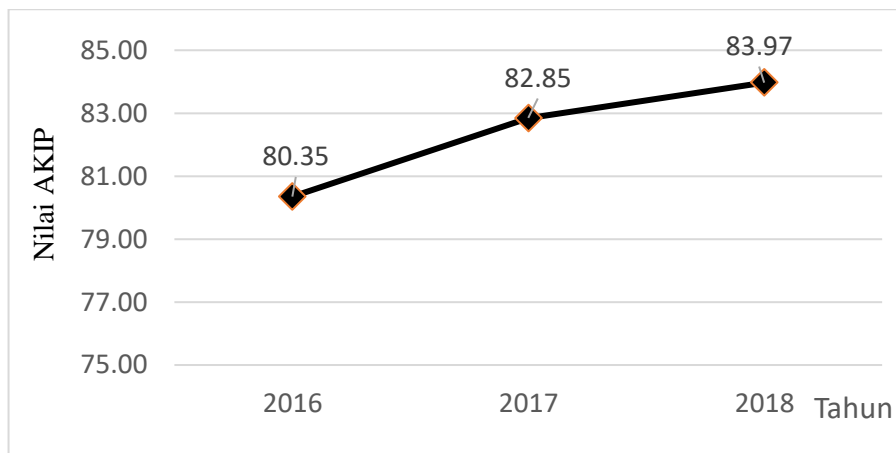
Evaluasi ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan: 1) Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada suatu unit kerja; 2) Menilai akuntabilitas kinerja pada unit kerja; 3) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas; dan 4) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Sasaran Evaluasi yang diharapkan adalah Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian yang berisi rekomendasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di unit kerja Direktorat Jenderal Hortikultura.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018, ditetapkan target indikator kinerja nilai AKIP Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018 berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal adalah 83,50. Berdasarkan

realisasi implementasi SAKIP 2018 yang dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal bulan Maret-April 2019 bahwa nilai AKIP Ditjen Hortikultura adalah 83,97.

Evaluasi ini dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja meliputi perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja, pemanfaatan hasil evaluasi dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada unit kerja Direktorat Jenderal Hortikultura pada 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan hasil yang semakin baik seperti pada gambar 24.



Gambar 24. Grafik Hasil Penilaian AKIP Periode 2016 - 2018

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa nilai AKIP Direktorat Jenderal Hortikultura selama tiga tahun terakhir memperlihatkan tren peningkatan yaitu 80,35 di tahun 2016; 82,85 di tahun 2017; dan 83,97 pada tahun 2018 dengan Kategori A (Sangat Baik). Rata-rata pertumbuhan nilai AKIP 3 tahun terakhir sebesar 2,23%. Hal ini menunjukkan komitmen Direktorat Jenderal Hortikultura untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja dari tahun ke tahun semakin baik.

b. Nilai Kinerja

Nilai Kinerja (NK) merupakan indikator kedua yang menggambarkan terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pada Penyusunan

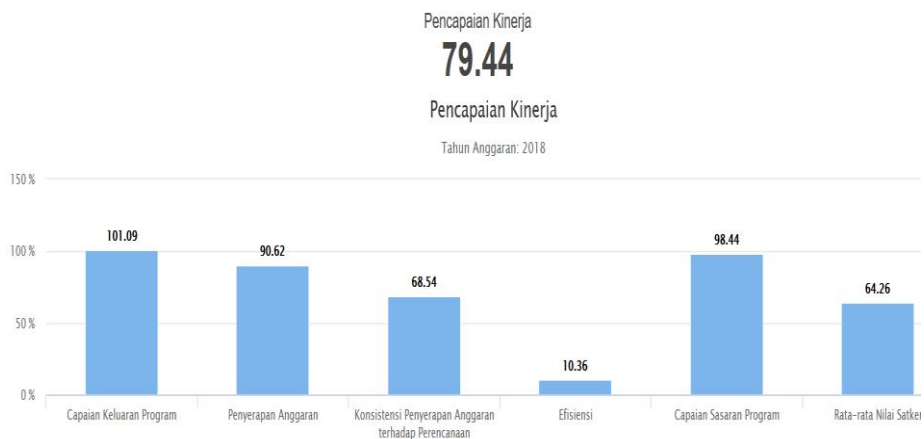
PK, Nilai Kinerja (NK) ditetapkan berdasarkan PMK 249 Tahun 2011. Namun demikian dalam perjalanannya terdapat peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru yang mengatur penilaian kinerja yaitu PMK 214 Tahun 2017. Pada PMK 214 tahun 2017, terdapat 3 level penilaian kinerja yaitu Nilai Kinerja pada level Kementerian/Lembaga, Nilai Kinerja pada level Eselon I/Program, dan Nilai Kinerja pada level Satuan Kerja (Satker).

Nilai Kinerja pada level Satker yang ditampilkan pada aplikasi SMART merupakan capaian Nilai Kinerja pada aspek implementasi yang ditentukan oleh empat parameter dengan bobot yang berbeda-beda yaitu : 1) capaian keluaran/output kegiatan/program dengan bobot 43,5%, 2) efisiensi dengan bobot 28,6%, 3) konsistensi serapan anggaran terhadap perencanaan (DIPA) dengan bobot 18,2%, dan realisasi anggaran dengan bobot 9,7%.

Sedangkan pada Nilai Kinerja level Eselon I/Program merupakan capaian Nilai Kinerja yang ditentukan oleh :

- a. Nilai Kinerja aspek Implementasi (NKI) dengan bobot 33,3% terdiri atas : 1) capaian keluaran/output kegiatan/program dengan bobot 43,5%, 2) efisiensi dengan bobot 28,6%, 3) konsistensi serapan anggaran terhadap perencanaan (DIPA) dengan bobot 18,2%, dan realisasi anggaran dengan bobot 9,7%.
- b. Nilai Kinerja aspek manfaat (*outcome*) atau Capaian Sasaran Program (CSP) dengan bobot 66,7%.
- c. Rata-rata Nilai Kinerja Satker lingkup Eselon I

Berdasarkan tampilan *dashboard* kinerja pada aplikasi SMART diketahui bahwa Direktorat Jenderal Hortikultura mendapatkan nilai kinerja sebesar 79,44 sehingga termasuk kategori penilaian “cukup baik. Capaian keluaran program Direktorat Jenderal Hortikultura pada tahun 2018 ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar 25. Capaian Nilai Kinerja berdasarkan aplikasi SMART

Capaian Nilai Kinerja **“Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura** tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 73,75 dengan capaian realisasi sebesar 107,72% sehingga dikategorikan **“Sangat Berhasil”**. Namun demikian, dari Gambar 25 terlihat bahwa rata-rata Nilai Kinerja Satker lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura masih rendah yaitu sebesar 64,26. Beberapa hal yang mempengaruhi rendahnya rata-rata Nilai Kinerja Satker antara lain karena :

1. Tidak tertibnya petugas pelaporan Satker dalam melaporkan capaian keluaran bulanan (realisasi volume keluaran) dan capaian output kegiatan per semester. Masih banyak Satker yang belum menginput laporan realisasi volume output dan realisasi indikator output kegiatan;
2. Masih banyak daerah yang tidak konsisten antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana;
3. Beberapa Satker daerah memiliki realisasi serapan anggaran yang rendah karena permasalahan teknis dan administrasi;

4. Terdapat beberapa indikator sasaran program yang tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan absensi pelaporan SPH yang belum optimal.

3.6.3 Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel Di Lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura

Pengelolaan keuangan yang akuntabel digambarkan ke dalam dua indikator yaitu: 1) rasio rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan dan 2) Rasio tindaklanjut kejadian atas temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura terhadap total kejadian atas temuan.

1) Rasio Rekomendasi BPK Yang Ditindaklanjuti Terhadap Total Rekomendasi Yang Diberikan

Pada tahun 2018 terdapat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2017. Pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tersebut, Direktorat Jenderal Hortikultura mendapatkan rekomendasi sebanyak 19 rekomendasi. Berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan BPK, sampai dengan 31 Desember 2018 sebanyak 18 rekomendasi dari 19 rekomendasi yang disampaikan BPK telah ditindaklanjuti, sedangkan 1 rekomendasi atau 1 temuan masih dalam proses tindak lanjut yaitu terkait penghapusan/hibah aset tetap. Dengan demikian dapat diperoleh rasio tindak lanjut rekomendasi BPK sebesar 94,74%. Jika dibandingkan dengan target tindak lanjut rekomendasi BPK yaitu sebesar 80%, maka realisasi capaian rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan adalah sebesar 118,43% sehingga dikategorikan “sangat berhasil”.

2) Rasio tindaklanjut kejadian atas temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura terhadap total kejadian atas temuan

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan pada tahun 2017 sebanyak 136 Laporan Hasil Pengawasan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang terdiri dari 33 Laporan Hasil Pengawasan, Laporan Hasil Audit atas Pengadaan Barang/Jasa; 3) Laporan Hasil Reviu RKA-KL; 4)

Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan; 5) Hasil Audit BMN; 6) Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah; 7) Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu, dengan total kejadian sebanyak 640 kejadian/temuan menghasilkan 955 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Dari 955 rekomendasi tersebut, telah ditindaklanjuti sebanyak 513 rekomendasi, sehingga diperoleh rasio tindak lanjut kejadian atas temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar 53,72% atau dengan capaian realisasi sebesar 67,15%. Capaian realisasi tersebut masuk ke dalam kategori “cukup berhasil”. Sedangkan sisa rekomendasi sebanyak 442 rekomendasi akan ditindaklanjuti pada tahun 2019. Salah satu penyebab rendahnya capaian realisasi ini adalah adanya temuan pada satker – satker inaktif, sehingga rekomendasi tidak bisa ditindaklanjuti. Selain itu masih banyak satker yang belum memahami bagaimana menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Jenderal khususnya pada Laporan Hasil Audit Pengawasan. Rincian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan ditampilkan pada Tabel 32.

Tabel 32. Rekapitulasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2018

No	Jenis Pengawasan	Jumlah LHP	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Kejadian	Sudah TL	Sisa TL	%
1	TL BPK	0					
2	PBJ	24	280	238	188	50	67,14
3	Reviu LK	53	421	247	247	0	58,67
4	Reviu RKA KL	8	57	26	19	7	33,33
5	BMN	11	35	28	21	7	60,00
6	LAKIP	2	10	2	2	0	20,00
7	Pengawasan	33	141	89	26	63	18,44
8	Kinerja	0			0	0	
9	Audit Tujuan Tertentu	5	11	10	10	0	90,91
	Jumlah TOTAL LHP	136	955	640	513	127	80,16

3.6.3 Meningkatkan Kualitas Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura

Berdasarkan Permentan No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan

administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura. Pelayanan teknis dan administrasi dilaksanakan melalui unit Eselon III atau bagian yang terdiri dari bagian perencanaan, bagian keuangan dan perlengkapan, bagian umum dan bagian evaluasi dan layanan rekomendasi.

Sasaran kinerja “Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura” diukur dengan tiga indikator yaitu 1) tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura, 2) tingkat kepuasan *stakeholder* eksternal terhadap layanan rekomendasi dan perijinan, 3) tingkat kepuasan *stakeholder* terhadap layanan data dan informasi Hortikultura.

- a. Tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura.

Indikator ini merupakan indikator yang menggambarkan seberapa besar tingkat kepuasan unit Eselon II lingkup Ditjen Hortikultura sebagai pengguna layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura. Indikator ini diukur melalui survey tingkat kepuasan layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura dengan responden pegawai pada unit Eselon II lainnya lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura. Survey menggunakan kuesioner yang mencakup pertanyaan tingkat kepuasan atas layanan bagian perencanaan, bagian keuangan dan perlengkapan, bagian umum dan bagian evaluasi dan layanan rekomendasi dengan menggunakan skala likert 1-5 yaitu 1 = sangat tidak puas, 2 = tidak puas, 3 = cukup puas, 4 = puas, 5 = sangat puas. Masing-masing unit eselon III diberikan bobot penilaian yang sama yaitu 25% dari total layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura.

Untuk menyimpulkan seberapa besar indeks kepuasan pada setiap pertanyaan digunakan perhitungan skor rata-rata digunakan kriteria garis kontinum yang membagi tanggapan responden menjadi lima kategori (Sangat Tidak Puas, Tidak Puas, Cukup Puas, Puas, dan Sangat Puas).

Pengkategorian dilakukan berdasarkan nilai rata-rata jawaban responden dengan cara sebagai berikut :

Skor minimum per item : 1

Skor maksimum per item : 5

Rentang (R) : $5 - 1 = 4$

Banyak kategori (K) : 5

Panjang interval : $R/K = 4/5 = 0,8$

maka diperoleh interval seperti tercantum pada tabel berikut.

Tabel 33. Interpretasi Indeks Kepuasan Rata-rata

Interval Skor Rata-Rata	Kategori
1,00 - 1,80	Sangat Tidak Puas
1,81 - 2,60	Tidak Puas
2,61 - 3,40	Cukup Puas
3,41 - 4,20	Puas
4,21 - 5,00	Sangat Puas

Berdasarkan hasil olah data kuesioner layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura, diperoleh indeks kepuasan atas layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2018 sebesar 3,57 dari 57 responden yang memberikan penilaian. Indeks ini berada pada rentang 3,41 – 4,20 sehingga masuk kategori puas. Jika dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 3,75, maka capaian realisasi atas indikator tingkat kepuasan unit Eselon II terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura belum mencapai target yang telah ditetapkan. Namun jika melihat capaian realisasinya sebesar 95,15% sehingga dikategorikan berhasil. Penilaian atas layanan unit Eselon III lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura ditampilkan pada Tabel 34.

Tabel 34. Indeks Kepuasan Atas Layanan Unit Eselon III lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018

Unit Eselon III	Indeks Kepuasan	Kategori
Bagian Perencanaan	3,60	Puas
Bagian Keuangan dan Perlengkapan	3,55	Puas
Bagian Umum	3,61	Puas
Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi	3,54	Puas

Berdasarkan Tabel 34 diketahui bahwa indeks kepuasan atas layanan pada semua unit Eselon III lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura telah cukup baik dan termasuk dalam kategori memuaskan.

- b. Tingkat kepuasan *stakeholder* eksternal terhadap layanan rekomendasi dan perijinan

Indikator ini diukur juga melalui Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan secara *online*, dimana masyarakat pengguna jasa layanan RIPH mengisi berupa kuesioner elektronik secara online pada saat masuk ke portal RIPH. Survey diikuti oleh 45 responden.

Parameter yang dinilai meliputi 9 unsur, yaitu:

- 1) kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan;
- 2) kemudahan prosedur;
- 3) kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan;
- 4) kewajaran biaya/ tarif dalam pelayanan;
- 5) kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan;
- 6) kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan;
- 7) perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan;

- 8) kualitas sarana dan prasarana; dan
- 9) penanganan pengaduan penggunaan layanan.

Dengan rentang penilaian kualitatif mulai dari Tidak Sesuai/ Tidak Mudah/ Tidak Cepat/ Tidak Kompeten/ Tidak Sopan/ Buruk/ Tidak Ada/ Sangat Mahal sampai dengan Sangat Sesuai/ Sangat Mudah/ Sangat Cepat/ Sangat Kompeten/ Sangat Sopan/ Sangat Baik/ Gratis.

Dari hasil survey tersebut, didapatkan hasil dari masing-masing unsur, yaitu:

1. Unsur Kesatu memiliki nilai kepuasan 72
2. Unsur Kedua memiliki nilai kepuasan 72
3. Unsur Ketiga memiliki nilai kepuasan 67
4. Unsur Keempat memiliki nilai kepuasan 96
5. Unsur Kelima memiliki nilai kepuasan 71
6. Unsur Keenam memiliki nilai kepuasan 74
7. Unsur Ketujuh memiliki nilai kepuasan 73
8. Unsur Kedelapan memiliki nilai kepuasan 65
9. Unsur Kesembilan memiliki nilai kepuasan 87

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai rata-rata nilai kepuasan yaitu 75, dengan nilai terkecil adalah pada unsur ke-8 (sarana dan prasarana) diikuti unsur ke-3 (kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan), sedangkan nilai tertinggi adalah pada unsur ke-9 (penanganan pengaduan penggunaan layanan).

Secara umum penilaian masyarakat atas pelayanan RIPH adalah baik yaitu sebesar 57,78%. Hasil penilaian secara keseluruhan didapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 75,1. Jika disetarakan dengan skala likert 1-5 maka diperoleh IKM dengan nilai 3,76. Hasil ini menunjukkan bahwa capaian kepuasan layanan perizinan telah mencapai target yang ditentukan

dalam PK Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura (3,75) sehingga diperoleh realisasi kinerja sebesar 100,26%.

c. Tingkat kepuasan *stakeholder* terhadap layanan data dan informasi Hortikultura

Indikator ketiga ini diukur juga melalui survey tingkat kepuasan layanan data dan informasi dengan menggunakan alat ukur kuesioner dengan skala likert 1-5 sebagai ukuran kepuasan yaitu 1 = sangat tidak puas, 2 = tidak puas, 3 = cukup puas, 4 = puas, 5 = sangat puas. Parameter yang diukur adalah tingkat kecepatan dan ketepatan penyediaan data statistik hortikultura, keramahan petugas data dan informasi serta keseluruhan layanan penyediaan data statistik hortikultura.

Berdasarkan hasil olah data kuesioner diperoleh rata-rata indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan data dan informasi hortikultura sebesar 3,63. Dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja yaitu 3,75 maka diperoleh realisasi capaian kinerja pada indikator ini sebesar 96,82%.

IV. PENGELOLAAN ANGGARAN DAN SUMBERDAYA MANUSIA

4.1. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura

Realisasi anggaran Ditjen Hortikultura sampai dengan tanggal 22 Januari 2019 sebesar Rp 2.252.021.944.940,- (90,62%) dari pagu anggaran sebesar Rp 2.485.259.588.000,-. Realisasi tersebut berasal dari enam kegiatan utama yang berasal dari satker pusat dan daerah. Rincian realisasi enam kegiatan utama Ditjen Hortikultura dapat dilihat pada Tabel 35 berikut.

Tabel 35. Realisasi Kegiatan Utama Ditjen Hortikultura Tahun 2018

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	877.124.169.000	803.595.343.920	91,62
2.	Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura	106.186.109.000	89.085.826.476	83,90
3.	Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura	49.244.685.000	47.832.398.463	97,13
4.	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	126.583.605.000	118.220.058.871	93,39
5.	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	59.787.732.000	45.307.735.613	75,78
6.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	23.703.494.000	21.969.609.127	92,69
Ditjen Hortikultura		2.485.259.588.000	2.252.021.944.940	90,62

Sumber : Aplikasi Simonev dan OmSPAN Kementerian Keuangan, 2019

Tabel 35 menunjukkan bahwa kegiatan utama yang paling tinggi realisasi anggarannya adalah Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura sebesar Rp 47.832.398.463 atau 97,13%. Sementara, kegiatan yang paling rendah realisasi anggarannya adalah Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura sebesar Rp 45.307.735.613,- atau 75,78%. Kegiatan utama tersebut didukung oleh output-output berikut:

- 1) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat meliputi: pengembangan kawasan bawang merah, kawasan aneka cabai, kawasan

sayuran lainnya, Fasilitas Teknis Dukungan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat, dan Kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan.

- 2) Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura meliputi: Benih Buah Lainnya, Benih Bawang Merah, Benih Jeruk, Sertifikasi Benih Hortikultura, Benih Sayuran Lainnya, Fasilitas teknis Dukungan perbenihan hortikultura, Sarana Prasarana Benih Hortikultura, dan Benih Cabai.
- 3) Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura meliputi: Pengendalian OPT Cabai dan Bawang Merah, Desa Pertanian Organik, dan Fasilitas Teknis Dukungan Perlindungan Hortikultura.
- 4) Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura meliputi: Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, Layanan Internal (*Overhead*) dan Layanan Perkantoran.
- 5) Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura meliputi: Kawasan buah lainnya, Kawasan jeruk, Kawasan florikultura, Fasilitas Teknis Dukungan Produksi Buah dan Florikultura, Kawasan buah di wilayah perbatasan, Kawasan Mangga, Kawasan Manggis dan Kawasan Pisang.
- 6) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura meliputi: Sarana Prasarana Pengolahan, Sertifikasi Standar, Mutu dan Pemasaran Hortikultura, Fasilitas Pasca panen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah, Fasilitas Teknis Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dan Fasilitas Pasca panen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya.

Bila dilihat per kewenangan, maka rincian pagu anggaran dan realisasi keuangan tahun 2018 seperti pada tabel berikut.

Tabel 36. Realisasi per Kewenangan Pusat dan Daerah Tahun 2018

No.	Kewenangan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I.	Pusat	113.956.703.000	105.542.625.330	92,62
II.	Daerah	1.128.673.091.000	1.020.575.015.779	90,42
1	Dekonsentrasi (DK)	120.438.200.000	114.905.975.730	95,41
2	Tugas Pembantuan (TP)	1.008.234.891.000	905.669.040.049	89,83
Total		1.242.629.794.000	1.126.117.641.109	90,62

Sumber : Aplikasi Simonev dan OmSPAN Kementerian Keuangan, 2019

Tabel 36 menunjukkan bahwa alokasi anggaran terbesar untuk Tugas Pembantuan yaitu sebesar Rp 1.008.234.891.000,- sedangkan alokasi anggaran terkecil adalah Pusat sebesar Rp, 113.956.703.000,-. Sementara Dekonsentrasi sebesar Rp. 120.438.200.000,-. Tingginya dana Tugas Pembantuan (TP) dikarenakan banyaknya satker yang dianggarkan yaitu sebanyak 69 satker terdiri dari 34 satker Dekonsentrasi, 36 satker TP Mandiri dan 33 satker TP Provinsi.

4.2. Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Hortikultura

Sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018 sebanyak 353 orang dari berbagai tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang paling banyak adalah S1 sebanyak 170 orang, dan paling sedikit adalah S3 yaitu sebanyak 6 orang. Rincian komposisi sumber daya manusia Direktorat Jenderal Hortikultura menurut tingkat pendidikan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 37. Komposisi Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Hortikultura Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018

NO	GOL/RUANG	S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
1	IV/e	0	0	0			0						0
2	IV/d	0	2	0			0						2
3	IV/c	2	1	1			0						4
4	IV/b	1	11	2			0						14
5	IV/a	2	22	6			0						30
6	III/d	1	29	46			0			1			77
7	III/c	0	9	51			1						61
8	III/b	0	3	38			2			24			67
9	III/a			26			1			18			45
10	II/d						1			18			19
11	II/c						3			12	3		18
12	II/b									4	2	1	7
13	II/a									1	2	3	6
14	I/d											3	3
15	I/c												0
16	I/b												0
17	I/a												0
JUMLAH		6	77	170	0	0	8	0	0	78	7	7	353

Sumber: Ditjen Hortikultura

Tabel 37 di atas menunjukkan bahwa berdasarkan golongan/ruang maka Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ditjen Hortikultura yang paling banyak adalah golongan III/d sebanyak 77 orang sedangkan yang paling sedikit adalah golongan IV/d atau yang tertinggi sebanyak dua orang. Untuk golongan yang paling rendah yaitu I/d sebanyak tiga orang.

V. PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT

5.1. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 adalah:

- 1) Adanya revisi POK/ROK beberapa kegiatan, pergantian KPA dan PPK, penjadwalan pengadaan melalui ULP di beberapa daerah tidak menjadi prioritas, adanya gagal lelang, terbatasnya jumlah SDM kesatkeran, teknis, lapang dan monev dan kurangnya sinergitas antara satker provinsi dan kabupaten/kota pelaksana TP provinsi;
- 2) Pengembangan kawasan aneka cabai dan bawang masih terfokus pada daerah tertentu (khususnya di Pulau Jawa dan Sumatera), berskala kecil dan konvensional, harga benih bawang bermutu relatif mahal dan terbatas, adopsi teknologi budidaya masih terbatas, penerapan GAP/SOP belum optimal dan pengendalian OPT ramah lingkungan spesifik lokasi masih terbatas;
- 3) Masih ditemukan pelaksana kegiatan perbenihan hortikultura di daerah yang belum mengetahui dan memahami peraturan perbenihan hortikultura sehingga menyulitkan pelaksanaan kegiatan;
- 4) Belum tersedianya sistem pelaporan OPT hortikultura dan DPI yang terintegrasi dan sistem peringatan dini/*Early Warning System* (EWS) dalam rangka pengamanan produksi hortikultura dari serangan OPT dan DPI;
- 5) Banyaknya ketidaksesuaian e-proposal dengan SK CPCL dan temuan-temuan pada satker inaktif yang tidak bisa ditindaklanjuti;
- 6) *Reward and punishment* belum optimal serta inventarisasi dan penilaian asset belum sistematis;
- 7) Sosialisasi peraturan perundang-undangan hortikultura belum intensif dan koordinasi antara satker pusat dan daerah masih lemah;

- 8) Terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian ke sarana publik dan alih komoditas menyebabkan terjadinya pengurangan luas pengembangan kawasan buah dan florikultura;
- 9) Terjadinya bencana di beberapa wilayah seperti angin puting beliung, longsor, erupsi dan gempa bumi terutama yang merusak kawasan buah dan florikultura, sehingga terjadi penurunan produksi;
- 10) Sering terjadinya mutasi jabatan di satker daerah menyebabkan terlambatnya pelaksanaan kegiatan;
- 11) Masih banyak CPCL yang tidak mau melaksanakan kegiatan sesuai arahan Dinas Pertanian setempat sehingga kegiatan tidak dilaksanakan.

5.2. Upaya Tindak Lanjut

Upaya dan tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan adalah:

- 1) Menyusun perencanaan yang baik dan mendorong satker dinas pertanian provinsi/kabupaten/kota supaya aktif melakukan koordinasi dengan ULP terkait jadwal dan proses pengadaan;
- 2) Pengembangan kawasan cabai dilakukan secara merata di setiap provinsi di Indonesia dengan membentuk *buffer stock* dan perlunya peran swasta untuk membudidayakan cabai dalam skala besar dan modern sesuai GAP/SOP, memperbanyak penangkar benih bawang, mengikutsertakan petani dalam pelatihan-pelatihan, dan mengedukasi petani tentang pentingnya pertanian ramah lingkungan;
- 3) Meningkatkan kompetensi SDM melalui pembinaan, penyuluhan, pelatihan, sosialisasi, apresiasi, bimbingan teknologi dan pelatihan manajemen baik di tingkat pusat maupun di daerah bekerjasama dengan instansi terkait;

- 4) Menyediakan sistem informasi manajemen (SIM) OPT hortikultura dan DPI yang terintegrasi serta sistem peringatan dini/EWS dalam rangka pengamanan produksi hortikultura dari serangan OPT dan DPI;
- 5) Menyesuaikan e-proposal dengan SK CPCL sehingga tidak terjadi temuan serta penerapan *reward and punishment* dalam mendukung dan menegakkan reformasi birokrasi yang diyakini dapat meningkatkan kinerja petugas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
- 6) Mengintensifkan sosialisasi peraturan perundang-undangan hortikultura dan meningkatkan koordinasi antara satker pusat dan daerah;
- 7) Perlu adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada pemerintah daerah guna menjaga lahan pertanian agar tidak beralih fungsi;
- 8) Perlu adanya MoU antara pemerintah pusat dan daerah terkait mutasi jabatan di satker daerah;
- 9) Penetapan CPCL harus lebih ketat dengan tetap memperhatikan kemampuan petani dalam membudidayakan komoditas tersebut disesuaikan dengan keunggulan komperatif yang dimiliki oleh daerah tersebut.

VI. PENUTUP

Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2018 sebesar Rp1.242.629.794.000,-, dan sampai dengan 22 Januari 2017 terealisasi sebesar Rp1.126.117.641.109,- atau 90,62%. Anggaran tersebut dialokasikan pada 104 satker dengan rincian 1 satker pusat, 34 satker dekonsentrasi, 36 satker TP Mandiri dan 33 satker TP Provinsi.

Meskipun tidak memenuhi target, dalam mendukung pencapaian produksi Direktorat Jenderal Hortikultura melakukan enam kegiatan utama yaitu; 1) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat; 2) Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura; 3) Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura; 4) Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura; 5) Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura; 6) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

Capaian kinerja sasaran strategis yang masuk dalam kategori sangat berhasil atau memenuhi target adalah produksi cabai (112,40%), mangga (129,88%), nenas (113,67%), manggis (130,50%), salak (114,55%), krisan (112,88%), dan jahe (126,36%), sementara komoditas yang berhasil atau mendekati target adalah indikator kinerja produksi bawang merah (93,16%). Disamping itu, untuk target kinerja sasaran strategis berkembangnya komoditas bernilai tambah dan berdaya saing juga belum sepenuhnya tercapai sesuai harapan. Indikator kinerja yang mendekati target atau berhasil adalah produksi pisang (96,62%), jeruk (99,05%), dan kentang (86,88%). Sementara, indikator produksi yang jauh di bawah target yang ditetapkan/cukup berhasil adalah bunga tabur (78,47%), dan jamur (77,86%), sedangkan indikator kinerja yang kurang berhasil adalah produksi bawang putih (35,84%).

Faktor utama penyebab tidak tercapainya target produksi buah, sayuran, tanaman obat dan tanaman hias adalah masih adanya dampak perubahan iklim yang tidak menentu menyebabkan perubahan pola curah hujan sehingga berpengaruh terhadap proses produksi komoditas hortikultura.

Selain itu, serangan OPT juga menyebabkan tanaman tidak berproduksi secara maksimal. Faktor lain penyebab menurunnya produksi adalah alih komoditas dan alih fungsi lahan.

Oleh karenanya, kerjasama yang harmonis, berkelanjutan, dan terintegrasi selalu diharapkan agar pembangunan hortikultura yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian, serta instansi pemerintah lain dapat sejalan dengan peran swasta dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan harapan, hasil *outcome* pembangunan hortikultura ini dapat memberikan kontribusi yang positif pada peningkatan produksi hortikultura, pembangunan ekonomi nasional serta memperbaiki kesejahteraan petani hortikultura khususnya. Selain itu, segala macam saran, kritik dan masukan yang konstruktif untuk perbaikan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura ke depan sangat kami harapkan.

LAMPIRAN

Lampiran 1.Matrik Kinerja dan Pendanaan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2015 – 2019
(berdasarkan Renstra Kementerian Pertanian Revisi II Permentan No.68 Tahun 2017)

No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Ket
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	KEMENTERIAN PERTANIAN						32.811	32.393	37.413	39.106	41.284	
4.	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura						1.129,09	1.148,00	1.312,00	1.446,00	1.591,00	
	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian tanaman hortikultura											
	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian hortikultura			3,00%	2,83%	3,29%						
	Penurunan volume impor untuk produk pertanian hortikultura			8,77	7,38	10,65						
	Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis tanaman hortikultura											
	Produksi cabai (Ton)			2.196.657	2.245.440	2.295.481						
	Produksi bawang merah (Ton)			1.579.772	1.608.766	1.639.724						
	Tersedianya infrastruktur pertanian pasca panen tanaman hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan											
	Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan (pasca panen hortikultura)			90,00	90,00	90,00						

No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Ket
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Terkendalinya penye-baran OPT dan DPI pada tanaman hortikultura											
	Rasio luas serangan OPT terhadap luas tanam hortikultura (%)			5,00	5,00	5,00						
	Rasio luas area terkena DPI yang dapat ditanggulangi terhadap luas tanam hortikultura (%)				0,50	0,50						
	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura						115,69	117,00	128,00	141,00	155,00	
	Terpenuhinya kebutuhan tanaman buah dan florikultura untuk komoditas ekspor dan pengendali impor											
	Produksi mangga untuk komoditas ekspor (Ton)			1.905.267	1.991.004	2.060.689						
	Produksi nenas untuk komoditas ekspor (Ton)			1.431.044	1.481.131	1.537.414						
	Produksi manggis untuk komoditas ekspor (Ton)			168.562	175.136	182.317						
	Produksi salak untuk komoditas ekspor (Ton)			739.202	778.779	824.304						
	Produksi pisang untuk komoditas ekspor (Ton)			7.039.043	7.105.914	7.176.263						
	Produksi krisan untuk komoditas ekspor (Tangkai)			436.564.946	441.367.161	452.401.340						
	Produksi jeruk untuk komoditas substitusi impor (Ton)			2.223.693	2.301.651	2.392.649						

No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Ket
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat						614,87	740,00	814,00	895,00	985,00	
	Terpenuhinya kebutuhan tanaman hortikultura strategis nasional											
	Produksi cabai			2,196,657	2,245,440	2,295,481						
	Produksi bawang merah			1,579,772	1,608,766	1,639,724						
	Terpenuhinya kebutuhan tanaman sayuran dan tanaman obat untuk komoditas ekspor dan pengendali impor											
	Produksi kentang untuk komoditas ekspor			1.437.332	1.471.828	1.508.623						
	Produksi jahe untuk komoditas ekspor			342.043	343.753	345.472						
	Produksi jamur untuk komoditas ekspor			39.292	40.176	41.160						
	Produksi bawang putih untuk komoditas substitusi impor			34.427	109.494	125.951						
	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura							61,00	67,00	74,00	81,00	
	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil tanaman hortikultura untuk komoditas ekspor dan pengendali impor											
	Volume ekspor hortikultura			206,402	212,246	219,226						
	Rasio ketersediaan informasi pasar komoditas hortikultura terhadap informasi yang dibutuhkan			60	70	75						

No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Ket
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur pertanian pasca panen dan pengolahan hortikultura											
	Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) pasca panen tanaman hortikultura berdasarkan kebutuhan (%)			90	90	90						
	Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura						90,71	63,00	70,00	77,00	84,00	
	Terpenuhinya kebutuhan perbenihan cabai dan bawang merah											
	Jumlah benih cabai yang tersedia (Kg)			82.798	81.256	82.543						
	Jumlah benih bawang merah yang tersedia (Kg)			189.228.600	189.640.440	190.268.760						
	Terpenuhinya kebutuhan perbenihan hortikultura untuk komoditas ekspor dan pengendali impor											
	Jumlah benih mangga yang tersedia (Batang)			2.223.705	2.323.269	2.415.793						
	Jumlah benih nenas yang tersedia (Benih)			44.959.063	45.852.813	47.220.938						
	Jumlah benih manggis yang tersedia (Batang)			292.848	301.469	311.671						
	Jumlah benih salak yang tersedia (Anakan)			6.332.700	6.631.900	6.948.700						

No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Ket
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Jumlah benih kentang yang tersedia (Kg)			109.083.150	115.193.100	118.072.350						
	Jumlah benih pisang yang tersedia (Stek)			11.249.150	11.266.475	11.316.938						
	Jumlah benih jahe yang tersedia (Bag log)			20.768.550	20.826.300	20.885.700						
	Jumlah benih krisan yang tersedia (Batang)			438.198.000	442.003.600	442.575.480						
	Jumlah benih jamur yang tersedia (Kg)			246.400	251.900	257.400						
	Jumlah benih jeruk yang tersedia (%)			2.425.060	2.509.155	2.584.285						
	Jumlah benih bawang putih yang tersedia			3.628.240	11.539.440	13.273.920						
	Rasio peningkatan jumlah kelembagaan benih hortikultura (%)			1	1	1						
	Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura						93,05	17,00	68,00	77,00	86,00	
	Terkendalnya serangan OPT dan DPI pada komoditas Hortikultura											
	Rasio luas serangan OPT terhadap luas tanam hortikultura (%)			5	5	5						
	Rasio luas area terkena DPI yang dapat ditanggulangi terhadap luas tanam hortikultura (%)			-	0,5	0,5						
	Jumlah desa pertanian organik yang dibina			0	250	250						

No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Ket
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Peningkatan usaha dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura						165,81	150,00	165,00	182,00	200,00	
	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura											
	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian			82,50	82,50	83,00						
	Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011)			73,50	73,75	74,00						
	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal											
	Nilai AKIP Ditjen Hortikultura berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Nilai)			82,50	82,50	83,00						
	Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) (%)			73,50	73,75	74,00						
	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura											
	Rasio rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan (%)			80,00	80,00	80,00						
	Rasio tindaklanjut kejadian atas temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di lingkup Ditjen Hortikultura terhadap total kejadian atas temuan (%)			80,00	80,00	80,00						

No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Ket
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura											
	Tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura (skala likert 1-5)			3,50	3,75	4,00						
	Tingkat kepuasan stakeholder eksternal terhadap layanan rekomendasi dan perijinan			3,50	3,75	4,00						
	Tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan data dan informasi Hortikultura			3,50	3,75	4,00						

**Lampiran 2. PK Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2018
(Revisi 3)**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Terpenuhinya kebutuhan tanaman hortikultura strategis nasional	1. Produksi Cabai (Ton)	2.245.440
	2. Produksi Bawang Merah (Ton)	1.608.766
2. Terpenuhinya kebutuhan tanaman sayuran dan tanaman obat untuk komoditas ekspor dan pengendali impor	3. Produksi kentang untuk komoditas ekspor (Ton)	1.471.828
	4. Produksi jahe untuk komoditas ekspor (Ton)	343.753
	5. Produksi jamur untuk komoditas ekspor (Ton)	40.176
	6. Produksi bawang putih untuk komoditas substitusi impor (Ton)	109.494

Lampiran 3. Capaian Produksi Cabai Tahun 2018 Per Provinsi

No	Provinsi	Kabupaten/Kota		Kawasan	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	%	KATEGORI
1	Provinsi Jawa Barat				1.340	1.340	100	Berhasil
	<i>TP PROV</i>				575	575	100	Berhasil
		1	Kab. Bogor	Cabai Besar	50	50	100	Berhasil
		2	Kab. Sukabumi	Cabai Rawit	25	25	100	Berhasil
				Cabai Besar	50	50	100	Berhasil
		3	Kab. Subang	Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		4	Kab. Tasikmalaya	Cabai Rawit	75	75	100	Berhasil
				Cabai Besar	75	75	100	Berhasil
		5	Kab. Ciamis	Cabai Rawit	25	25	100	Berhasil
				Cabai Besar	50	50	100	Berhasil
		6	Kab. Cirebon	Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		7	Kab. Kuningan	Cabai Rawit	25	25	100	Berhasil
				Cabai Besar	50	50	100	Berhasil
		8	Kab. Indramayu	Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		9	Kab. Bandung Barat	Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		10	Kab. Pangandaran	Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		11	Kota Tasikmalaya	Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
	<i>TP MANDIRI</i>				765	765	100	Berhasil
		1	Kab. Cianjur	Cabai Rawit	75	75	100	Berhasil
				Cabai Besar	100	100	100	Berhasil
		2	Kab. Bandung	Cabai Rawit	75	75	100	Berhasil
				Cabai Besar	75	75	100	Berhasil
		3	Kab. Sumedang	Cabai Rawit	75	75	100	Berhasil
				Cabai Besar	100	100	100	Berhasil
		4	Kab. Garut	Cabai Rawit	75	75	100	Berhasil
				Cabai Besar	150	150	100	Berhasil
		5	Kab. Majalengka	Cabai Besar	40	40	100	Berhasil

No	Provinsi	Kabupaten/Kota		Kawasan	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	%	KATEGORI
2	Provinsi Jawa Tengah				1.650	1.650	100	Berhasil
	<i>TP PROV</i>				<i>1.025</i>	<i>1.025</i>	100	Berhasil
		1	Kab. Semarang	Cabai Rawit	25	25	100	Berhasil
				Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		2	Kab. Demak	Cabai Rawit	25	25	100	Berhasil
				Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		3	Kab. Tegal	Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		4	Kab. Kudus	Cabai Rawit	25	25	100	Berhasil
				Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		5	Kab. Pemalang	Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		6	Kab. Rembang	Cabai Rawit	25	25	100	Berhasil
				Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		7	Kab. Blora	Cabai Rawit	25	25	100	Berhasil
				Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		8	Kab. Purbalingga	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
				Cabai Besar	75	75	100	Berhasil
		9	Kab. Banjarnegara	Cabai Rawit	75	75	100	Berhasil
				Cabai Besar	50	50	100	Berhasil
		10	Kab. Wonosobo	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
				Cabai Besar	50	50	100	Berhasil
		11	Kab. Purworejo	Cabai Rawit	25	25	100	Berhasil
				Cabai Besar	50	50	100	Berhasil
		12	Kab. Kebumen	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
				Cabai Besar	50	50	100	Berhasil
		13	Kab. Klaten	Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		14	Kab. Boyolali	Cabai Rawit	25	25	100	Berhasil
				Cabai Besar	50	50	100	Berhasil
		16	Kab. Sragen	Cabai Rawit	25	25	100	Berhasil
				Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		17	Kab. Wonogiri	Cabai Besar	50	50	100	Berhasil

No	Provinsi	Kabupaten/Kota		Kawasan	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	%	KATEGORI
	<i>TP MANDIRI</i>				625	625	100	Berhasil
		1	Kab. Grobogan	Cabai Besar	50	50	100	Berhasil
		2	Kab. Batang	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
				Cabai Besar	50	50	100	Berhasil
		3	Kab. Temanggung	Cabai Rawit	125	125	100	Berhasil
				Cabai Besar	75	75	100	Berhasil
		4	Kab. Magelang	Cabai Rawit	125	125	100	Berhasil
				Cabai Besar	100	100	100	Berhasil
		5	Kab. Karanganyar	Cabai Rawit	25	25	100	Berhasil
				Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
3	Provinsi DI Yogyakarta				300	300	100	Berhasil
	<i>TP PROV</i>				300	300	100	Berhasil
		1	Kab. Bantul	Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		2	Kab. Sleman	Cabai Rawit	75	75	100	Berhasil
				Cabai Besar	50	50	100	Berhasil
		3	Kab. Gunungkidul	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
				Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		4	Kab. Kulonprogo	Cabai Rawit	25	25	100	Berhasil
				Cabai Besar	50	50	100	Berhasil
4	Provinsi Jawa Timur				1.450	1.450	100	Berhasil
	<i>TP PROV</i>				850	850	100	Berhasil
		1	Kab. Gresik	Cabai Rawit	75	75	100	Berhasil
				Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		2	Kab. Sumenep	Cabai Rawit	25	25	100	Berhasil
				Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		3	Kab. Situbondo	Cabai Rawit	25	25	100	Berhasil
				Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		4	Kab. Jember	Cabai Rawit	25	25	100	Berhasil

No	Provinsi	Kabupaten/Kota		Kawasan	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	%	KATEGORI
		5	Kab. Pasuruan	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
				Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		6	Kab. Kediri	Cabai Rawit	100	100	100	Berhasil
				Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		7	Kab. Blitar	Cabai Rawit	75	75	100	Berhasil
				Cabai Besar	75	75	100	Berhasil
		8	Kab. Pacitan	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
				Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		9	Kab. Tuban	Cabai Rawit	100	100	100	Berhasil
				Cabai Besar	50	50	100	Berhasil
		10	Kab. Lamongan	Cabai Rawit	25	25	100	Berhasil
				Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
	TP MANDIRI				600	600	100	Berhasil
		1	Kab. Bondowoso	Cabai Rawit	25	25	100	Berhasil
				Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		2	Kab. Banyuwangi	Cabai Rawit	150	150	100	Berhasil
				Cabai Besar	50	50	100	Berhasil
		3	Kab. Malang	Cabai Rawit	150	150	100	Berhasil
				Cabai Besar	50	50	100	Berhasil
		4	Kab. Probolinggo	Cabai Rawit	25	25	100	Berhasil
				Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		5	Kab. Lumajang	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
				Cabai Besar	50	50	100	Berhasil
5	Provinsi Aceh				200	200	100	Berhasil
	TP PROV				200	200	100	Berhasil
		1	Kab. Aceh Besar	Cabai Besar	50	50	100	Berhasil
		2	Kab. Pidie	Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		3	Kab. Aceh Timur	Cabai Besar	25	25	100	Berhasil

No	Provinsi	Kabupaten/Kota		Kawasan	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	%	KATEGORI
		4	Kab. Aceh Tengah	Cabai Besar	50	50	100	Berhasil
		5	Kab. Simeuleu	Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		6	Kab. Aceh Gayo Lues	Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
6	Provinsi Sumatera Utara				155	155	100	Berhasil
	TP PROV				130	130	100	Berhasil
		1	Kab. Deliserdang	Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		2	Kab. Karo	Cabai Besar	50	50	100	Berhasil
		3	Kab. Tapanuli Utara	Cabai Besar	15	15	100	Berhasil
		4	Kab. Tapanuli Selatan	Cabai Besar	15	15	100	Berhasil
		5	Kab. Batubara	Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
	TP MANDIRI				25	25	100	Berhasil
		1	Kab. Simalungun	Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
7	Provinsi Sumatera Barat				275	275	100	Berhasil
	TP PROV				275	275	100	Berhasil
		1	Kab. Agam	Cabai Besar	50	50	100	Berhasil
		2	Kab. Limapuluh Kota	Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		3	Kab. Pesisir Selatan	Cabai Besar	50	50	100	Berhasil
		4	Kab. Tanah Datar	Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		5	Kab. Solok Selatan	Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		6	Kab. Pasaman Barat	Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		7	Kab. Sijunjung	Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		8	Kota Padang Panjang	Cabai Besar	20	20	100	Berhasil
		9	Kota Padang	Cabai Besar	10	10	100	Berhasil
		10	Kota Payakumbuh	Cabai Besar	20	20	100	Berhasil

No	Provinsi	Kabupaten/Kota		Kawasan	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	%	KATEGORI
8	Provinsi Riau				135	135	100	Berhasil
	<i>TP PROV</i>				135	135	100	Berhasil
		1	Kab. Kampar	Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		2	Kab. Indragiri Hulu	Cabai Besar	20	20	100	Berhasil
		3	Kab. Rokan Hulu	Cabai Besar	20	20	100	Berhasil
		4	Kab. Siak	Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		5	Kota Pekanbaru	Cabai Besar	20	20	100	Berhasil
		6	Kota Dumai	Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
9	Provinsi Jambi				310	310	100	Berhasil
	<i>TP PROV</i>				310	310	100	Berhasil
		1	Kab. Tanjung Jabung Barat	Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		2	Kab. Sarolangun	Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		3	Kab. Kerinci	Cabai Besar	75	75	100	Berhasil
		4	Kab. Merangin	Cabai Besar	50	50	100	Berhasil
		5	Kab. Tanjung Jabung Timur	Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		6	Kab. Tebo	Cabai Besar	40	40	100	Berhasil
		7	Kab. Muaro Jambi	Cabai Besar	50	50	100	Berhasil
		8	Kota Jambi	Cabai Besar	10	10	100	Berhasil
		9	Kota Sungai Penuh	Cabai Besar	10	10	100	Berhasil
10	Provinsi Sumatera Selatan				225	225	100	Berhasil
	<i>TP PROV</i>				225	225	100	Berhasil
		1	Kab. Ogan Komering Ulu	Cabai Besar	40	40	100	Berhasil
		2	Kab. Musi Rawas	Cabai Besar	50	50	100	Berhasil
		3	Kab. Ogan Komering Ilir	Cabai Besar	50	50	100	Berhasil
		4	Kab. Banyuasin	Cabai Besar	40	40	100	Berhasil
		5	Kab. Oku Selatan	Cabai Besar	25	25	100	Berhasil

No	Provinsi	Kabupaten/Kota		Kawasan	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	%	KATEGORI
		6	Kab. Musi Rawas Utara	Cabai Besar	10	10	100	Berhasil
		7	Kota Lubuk Linggau	Cabai Besar	10	10	100	Berhasil
11	Provinsi Lampung				600	600	100	Berhasil
	TP PROV				600	600	100	Berhasil
		1	Kab. Lampung Selatan	Cabai Besar	75	75	100	Berhasil
		2	Kab. Lampung Tengah	Cabai Besar	50	50	100	Berhasil
		3	Kab. Lampung Utara	Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		4	Kab. Lampung Barat	Cabai Besar	75	75	100	Berhasil
		5	Kab. Tulang Bawang	Cabai Besar	10	10	100	Berhasil
		6	Kab. Tanggamus	Cabai Besar	100	100	100	Berhasil
		7	Kab. Lampung Timur	Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		8	Kab. Way Kanan	Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		9	Kab. Pesawaran	Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		10	Kab. Pringsewu	Cabai Besar	50	50	100	Berhasil
		11	Kab. Mesuji	Cabai Besar	75	75	100	Berhasil
		12	Kab. Tulang Bawang Barat	Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		13	Kab. Pesisir Barat	Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		14	Kota Bandar Lampung	Cabai Besar	5	5	100	Berhasil
		15	Kota Metro	Cabai Besar	10	10	100	Berhasil
12	Provinsi Kalimantan Barat				355	355	100	Berhasil
	TP PROV				305	305	100	Berhasil
		1	Kab. Sanggau	Cabai Rawit	40	40	100	Berhasil
		2	Kab. Mempawah	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
		3	Kab. Kapuas Hulu	Cabai Rawit	25	25	100	Berhasil
		4	Kab. Ketapang	Cabai Rawit	20	20	100	Berhasil

No	Provinsi	Kabupaten/Kota		Kawasan	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	%	KATEGORI
		5	Kab. Bengkayang	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
		6	Kab. Sekadau	Cabai Rawit	20	20	100	Berhasil
		7	Kab. Kayong Utara	Cabai Rawit	20	20	100	Berhasil
		8	Kab. Kubu Raya	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
		9	Kota Pontianak	Cabai Rawit	10	10	100	Berhasil
		10	Kota Singkawang	Cabai Rawit	20	20	100	Berhasil
	TP MANDIRI				50	50	100	Berhasil
		1	Kab. Sambas	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
13	Provinsi Kalimantan Tengah				225	225	100	Berhasil
	TP PROV				225	225	100	Berhasil
		1	Kab. Kapuas	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
				Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		2	Kab. Kotawaringin Timur	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
				Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		3	Kab. Kotawaringin Barat	Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		4	Kab. Pulang Pisau	Cabai Rawit	25	25	100	Berhasil
		5	Kab. Barito Timur	Cabai Rawit	15	15	100	Berhasil
		6	Kota Palangkaraya	Cabai Rawit	10	10	100	Berhasil
14	Provinsi Kalimantan Selatan				450	450	100	Berhasil
	TP PROV				450	450	100	Berhasil
		1	Kab. Banjar	Cabai Rawit	25	25	100	Berhasil
		2	Kab. Tanah Laut	Cabai Besar	50	50	100	Berhasil
		3	Kab. Tapin	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
		4	Kab. Hulu Sungai Selatan	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil

No	Provinsi	Kabupaten/Kota		Kawasan	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	%	KATEGORI
				Cabai Besar	50	50	100	Berhasil
		5	Kab. Hulu Sungai Tengah	Cabai Besar	50	50	100	Berhasil
		6	Kab. Barito Kuala	Cabai Rawit	25	25	100	Berhasil
		7	Kab. Tabalong	Cabai Besar	50	50	100	Berhasil
		8	Kab. Hulu Sungai Utara	Cabai Rawit	25	25	100	Berhasil
				Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		9	Kota Banjarbaru	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
15	Provinsi Kalimantan Timur				225	225	100	Berhasil
	TP PROV				225	225	100	Berhasil
		1	Kab. Paser	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
		3	Kab. Kutai Timur	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
		4	Kab. Penajam Paser Utara	Cabai Rawit	25	25	100	Berhasil
		5	Kab. Kutai Kertanegara	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
		6	Kota Samarinda	Cabai Rawit	25	25	100	Berhasil
		7	Kota Balikpapan	Cabai Rawit	25	25	100	Berhasil
16	Provinsi Sulawesi Utara				305	305	100	Berhasil
	TP PROV				230	230	100	Berhasil
		1	Kab. Kepulauan Sangihe	Cabai Besar	10	10	100	Berhasil
		2	Kab. Kepulauan Talaud	Cabai Rawit	15	15	100	Berhasil
		3	Kab. Minahasa Selatan	Cabai Rawit	75	75	100	Berhasil
		4	Kab. Minahasa Utara	Cabai Rawit	30	30	100	Berhasil
		5	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
		6	Kota Tomohon	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil

No	Provinsi	Kabupaten/Kota		Kawasan	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	%	KATEGORI
	TP MANDIRI				75	75	100	Berhasil
		1	Kab. Minahasa	Cabai Rawit	75	75	100	Berhasil
17	Provinsi Sulawesi Tengah				350	350	100	Berhasil
	TP PROV				250	250	100	Berhasil
		1	Kab. Toli-Toli	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
		2	Kab. Parigi Moutong	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
		3	Kab. Tojo Una-Una	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
		4	Kab. Sigi	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
		5	Kota Palu	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
	TP MANDIRI				100	100	100	Berhasil
		1	Kab. Donggala	Cabai Rawit	100	100	100	Berhasil
18	Provinsi Sulawesi Selatan				1.075	1.075	100	Berhasil
	TP PROV				700	700	100	Berhasil
		1	Kab. Pinrang	Cabai Rawit	75	75	100	Berhasil
				Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		2	Kab. Gowa	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
				Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		3	Kab. Wajo	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
				Cabai Besar	50	50	100	Berhasil
		4	Kab. Maros	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
				Cabai Besar	50	50	100	Berhasil
		5	Kab. Sinjai	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
				Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		6	Kab. Bulukumba	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
		7	Kab. Takalar	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
		8	Kab. Soppeng	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
		9	Kab. Luwu Utara	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
		10	Kota Palopo	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil

No	Provinsi	Kabupaten/Kota		Kawasan	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	%	KATEGORI
	<i>TP MANDIRI</i>				375	375	100	Berhasil
		1	Kab. Jeneponto	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
				Cabai Besar	50	50	100	Berhasil
		2	Kab. Enrekang	Cabai Rawit	75	75	100	Berhasil
				Cabai Besar	50	50	100	Berhasil
		3	Kab. Bantaeng	Cabai Rawit	25	25	100	Berhasil
				Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		4	Kab. Bone	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
				Cabai Besar	50	50	100	Berhasil
19	Provinsi Sulawesi Tenggara				315	315	100	Berhasil
	<i>TP PROV</i>				315	315	100	Berhasil
		1	Kab. Buton	Cabai Rawit	20	20	100	Berhasil
		2	Kab. Kolaka	Cabai Rawit	20	20	100	Berhasil
		3	Kab. Konawe Selatan	Cabai Rawit	75	75	100	Berhasil
		4	Kab. Bombana	Cabai Rawit	25	25	100	Berhasil
		5	Kab. Kolaka Utara	Cabai Rawit	25	25	100	Berhasil
		6	Kab. Konawe	Cabai Rawit	25	25	100	Berhasil
		7	Kab. Kolaka Timur	Cabai Rawit	125	125	100	Berhasil
20	Provinsi Maluku				200	200	100	Berhasil
	<i>TP PROV</i>				200	200	100	Berhasil
		1	Kab. Maluku Tengah	Cabai Rawit	40	40	100	Berhasil
		2	Kab. Maluku Tenggara	Cabai Rawit	20	20	100	Berhasil
		3	Kab. Maluku Tenggara Barat	Cabai Rawit	25	25	100	Berhasil
		4	Kab. Pulau Buru	Cabai Rawit	35	35	100	Berhasil
		5	Kab. Kepulauan Aru	Cabai Rawit	10	10	100	Berhasil

No	Provinsi	Kabupaten/Kota		Kawasan	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	%	KATEGORI
		6	Kab. Seram Bagian Barat	Cabai Rawit	30	30	100	Berhasil
		7	Kab. Seram Bagian Timur	Cabai Rawit	30	30	100	Berhasil
		8	Kota Ambon	Cabai Rawit	10	10	100	Berhasil
21	Provinsi Bali				225	225	100	Berhasil
	TP PROV				175	175	100	Berhasil
		1	Kab. Buleleng	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
		2	Kab. Klungkung	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
		3	Kab. Gianyar	Cabai Rawit	25	25	100	Berhasil
		4	Kab. Karangasem	Cabai Rawit	25	25	100	Berhasil
		5	Kab. Bangli	Cabai Rawit	25	25	100	Berhasil
	TP MANDIRI				50	50	100	Berhasil
		1	Kab. Tabanan	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
22	Provinsi Nusa Tenggara Barat				700	700	100	Berhasil
	TP PROV				475	475	100	Berhasil
		1	Kab. Lombok Barat	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
				Cabai Besar	50	50	100	Berhasil
		2	Kab. Lombok Tengah	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
				Cabai Besar	50	50	100	Berhasil
		3	Kab. Dompu	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
				Cabai Besar	50	50	100	Berhasil
		4	Kab. Sumbawa Barat	Cabai Rawit	25	25	100	Berhasil
				Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		5	Kab. Lombok Utara	Cabai Rawit	25	25	100	Berhasil
				Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		6	Kota Mataram	Cabai Rawit	75	75	100	Berhasil
	TP MANDIRI				225	225	100	Berhasil
		1	Kab. Sumbawa	Cabai Rawit	25	25	100	Berhasil

No	Provinsi	Kabupaten/Kota		Kawasan	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	%	KATEGORI
				Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		2	Kab. Lombok Timur	Cabai Rawit	100	100	100	Berhasil
				Cabai Besar	75	75	100	Berhasil
23	Provinsi Nusa Tenggara Timur				475	475	100	Berhasil
	TP PROV				425	425	100	Berhasil
		1	Kab. Kupang	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
		2	Kab. Timor Tengah Selatan	Cabai Rawit	25	25	100	Berhasil
		3	Kab. Flores Timur	Cabai Rawit	15	15	100	Berhasil
		4	Kab. Manggarai	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
				Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		5	Kab. Sumba Timur	Cabai Rawit	25	25	100	Berhasil
		6	Kab. Sumba Barat	Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		7	Kab. Lembata	Cabai Rawit	25	25	100	Berhasil
		8	Kab. Rote Ndao	Cabai Besar	40	40	100	Berhasil
		9	Kab. Manggarai Barat	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
		10	Kab. Sumba Tengah	Cabai Rawit	20	20	100	Berhasil
		11	Kab. Sumba Barat Daya	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
		12	Kab. Manggarai Timur	Cabai Rawit	25	25	100	Berhasil
	TP MANDIRI				50	50	100	Berhasil
		1	Kab. Belu	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
24	Provinsi Papua				175	175	100	Berhasil
	TP PROV				130	130	100	Berhasil
		1	Kab. Biak-Numfor	Cabai Rawit	30	30	100	Berhasil
		2	Kab. Jayawijaya	Cabai Rawit	25	25	100	Berhasil

No	Provinsi	Kabupaten/Kota		Kawasan	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	%	KATEGORI
		3	Kab. Mimika	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
		5	Kota Jayapura	Cabai Rawit	25	25	100	Berhasil
	TP MANDIRI				45	45	100	Berhasil
		1	Kab. Merauke	Cabai Rawit	20	20	100	Berhasil
		2	Kab. Keerom	Cabai Rawit	25	25	100	Berhasil
25	Provinsi Bengkulu				250	250	100	Berhasil
	TP PROV				150	150	100	Berhasil
		1	Kab. Bengkulu Utara	Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		2	Kab. Rejang Lebong	Cabai Besar	50	50	100	Berhasil
		3	Kab. Kaur	Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		4	Kab. Muko-Muko	Cabai Besar	50	50	100	Berhasil
	TP MANDIRI				100	100	100	Berhasil
		5	Kab. Kepahiang	Cabai Besar	100	100	100	Berhasil
26	Provinsi Maluku Utara				145	145	100	Berhasil
	TP PROV				145	145	100	Berhasil
		1	Kab. Halmahera Selatan	Cabai Rawit	25	25	100	Berhasil
		2	Kab. Kepulauan Sula	Cabai Rawit	10	10	100	Berhasil
		3	Kab. Halmahera Timur	Cabai Rawit	25	25	100	Berhasil
		4	Kab. Halmahera Barat	Cabai Rawit	25	25	100	Berhasil
		5	Kab. Pulau Morotai	Cabai Rawit	20	20	100	Berhasil
		6	Kota Ternate	Cabai Rawit	15	15	100	Berhasil
		7	Kota Tidore Kepulauan	Cabai Rawit	25	25	100	Berhasil
27	Provinsi Banten				125	125	100	Berhasil

No	Provinsi	Kabupaten/Kota		Kawasan	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	%	KATEGORI
	TP PROV				125	125	100	Berhasil
		1	Kab. Serang	Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		2	Kab. Pandeglang	Cabai Besar	50	50	100	Berhasil
		3	Kab. Lebak	Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
		4	Kab. Tangerang	Cabai Besar	25	25	100	Berhasil
28	Provinsi Kep. Bangka Belitung				50	-	-	Tidak Berhasil
	TP PROV				50	-	-	Tidak Berhasil
		1	Kab. Belitung	Cabai Besar	20	-	-	Tidak Berhasil
		2	Kab. Bangka	Cabai Besar	10	-	-	Tidak Berhasil
		3	Kab. Bangka Tengah	Cabai Besar	20	-	-	Tidak Berhasil
29	Provinsi Gorontalo				285	285	100	Berhasil
	TP PROV				285	285	100	Berhasil
		1	Kab. Gorontalo	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
		2	Kab. Boalemo	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
		3	Kab. Pohuwato	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
		4	Kab. Bone Bolango	Cabai Rawit	75	75	100	Berhasil
		5	Kab. Gorontalo Utara	Cabai Rawit	40	40	100	Berhasil
		6	Kota Gorontalo	Cabai Rawit	20	20	100	Berhasil
30	Provinsi Kepulauan Riau				65	65	100	Berhasil
	TP PROV				65	65	100	Berhasil
		1	Kab. Bintan	Cabai Besar	20	20	100	Berhasil
		2	Kab. Lingga	Cabai Besar	15	15	100	Berhasil
		3	Kab. Anambas	Cabai Besar	15	15	100	Berhasil
		4	Kota Batam	Cabai Besar	15	15	100	Berhasil

No	Provinsi	Kabupaten/Kota		Kawasan	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	%	KATEGORI
31	Provinsi Papua Barat				280	280	100	Berhasil
	<i>TP PROV</i>				205	205	100	Berhasil
		1	Kab. Manokwari	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
		2	Kab. Fak Fak	Cabai Rawit	20	20	100	Berhasil
		3	Kab. Sorong Selatan	Cabai Rawit	20	20	100	Berhasil
		4	Kab. Raja Ampat	Cabai Rawit	30	30	100	Berhasil
		5	Kab. Teluk Bintuni	Cabai Rawit	20	20	100	Berhasil
		6	Kab. Teluk Wondama	Cabai Rawit	10	10	100	Berhasil
		7	Kab. Tambrauw	Cabai Rawit	25	25	100	Berhasil
		8	Kab. Manokwari Selatan	Cabai Rawit	15	15	100	Berhasil
		9	Kota Sorong	Cabai Rawit	15	15	100	Berhasil
	<i>TP MANDIRI</i>				75	75	100	Berhasil
		2	Kab. Sorong	Cabai Rawit	75	75	100	Berhasil
32	Provinsi Sulawesi Barat				60	60	100	Berhasil
	<i>TP PROV</i>				20	20	100	Berhasil
		2	Kab. Mamuju Utara	Cabai Rawit	20	20	100	Berhasil
	<i>TP MANDIRI</i>				40	40	100	Berhasil
		1	Kab. Majene	Cabai Rawit	40	40	100	Berhasil
33	Provinsi Kalimantan Utara				80	80	100	Berhasil
	<i>TP PROV</i>				10	10	100	Berhasil
		1	Kota Tarakan	Cabai Rawit	10	10	100	Berhasil
	<i>TP MANDIRI</i>				70	70	100	Berhasil
		1	Kab. Nunukan	Cabai Rawit	50	50	100	Berhasil
		2	Kab. Bulungan	Cabai Rawit	20	20	100	Berhasil
	Total				13.055	13.005	99,62	Berhasil

Lampiran 4. Capaian Produksi Bawang Merah Tahun 2018 Per Provinsi

No	Provinsi	Kabupaten	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	%	Kategori
1	Provinsi Jawa Barat	Kab. Bandung	27	27	100	Berhasil
		Kab. Garut	75	75	100	Berhasil
		Kab. Majalengka	77	77	100	Berhasil
		Kab. Sumedang	12	12	100	Berhasil
		Kab. Cianjur	17	17	100	Berhasil
	TP Provinsi	Kab. Cirebon	102	182	100	Berhasil
		Kab. Kuningan	30			
		Kab. Indramayu	50			
2	Provinsi Jawa Tengah	Kab. Grobogan	110	110	100	Berhasil
		Kab. Batang	20	20	100	Berhasil
	TP Provinsi	Kab. Demak	100	587	99	Berhasil
		Kab. Tegal	52			
		Kab. Brebes	50			
		Kab. Pati	-			
		Kab. Pemalang	50			
		Kab. Rembang	30			
		Kab. Sragen	50			
		Kab. Purbalingga	20			
		Kab. Wonogiri	50			
		Kab. Kendal	50			
		Kab. Blora	50			
		Kab. Cilacap	20			
		Kab. Kudus	20			
		Kab. Banjarnegara	20			
		Kab. Wonosobo	10			
		Kab. Boyolali	20			
3	Provinsi DI Yogyakarta (TP Provinsi)	Kab. Bantul	22	102	82	Berhasil

No	Provinsi	Kabupaten	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	%	Kategori
		Kab. Gunungkidul	60			
		Kab. Sleman	22			
		Kab. Kulonprogo	20			
4	Provinsi Jawa Timur	Kab. Malang	52	52	100	Berhasil
		Kab. Probolinggo	82	82	100	Berhasil
		Kab. Bondowoso	50	50	100	Berhasil
	TP Provinsi	Kab. Sumenep	50	154	86	Berhasil
		Kab. Nganjuk	52			
		Kab. Bojonegoro	52			
		Kab. Pamekasan	25			
5	Provinsi Banten	Kab. Serang	22	22	100	Berhasil
6	Provinsi Aceh (TP Provinsi)	Kab. Aceh Besar	20	102	100	Berhasil
		Kab. Pidie	17			
		Kab. Semalue	15			
		Kab. Bener Meriah	20			
		Kab. Aceh Tengah	20			
		Kab. Pidie Jaya	10			
7	Provinsi Sumatera Utara	Kab. Simalungun	65	65	100	Berhasil
		Kab. Samosir	50	300	100	Berhasil
		Kab. Dairi	50			
		Kab. Humbahas	52			
		Kab. Karo	54			
		Kab. Serdang Bedagai	22			
		Kab. Tobasa	55			
		Kota Medan	17			
8	Provinsi Sumatera Barat	Kab. Solok	52	52	100	Berhasil
	TP Provinsi	Kab. Agam	50	152	100	Berhasil

No	Provinsi	Kabupaten	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	%	Kategori
		Kab. Pesisir Selatan	52			
		Kab. Solok Selatan	25			
		Kab. Tanah Datar	25			
9	Provinsi Riau (TP Provinsi)	Kab. Kampar	27	81	100	Berhasil
		Kota Pekanbaru	27			
		Kab. Siak	27			
10	Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Bintan	10	50	90,01	Berhasil
	(TP Provinsi)	Kota Batam	10			
		Kab. Lingga	20			
		Kab. Karimun	10			
		Kab. Natuna	5			
11	Provinsi Jambi	Kab. Kerinci	9	44	100	Berhasil
	(TP Provinsi)	Kab. Merangin	10			
		Kab. Muaro Jambi	11			
		Kab. Sungai Penuh	10			
		Kota Jambi	1			
		Kab. Tanjung Jabung Timur	1			
		Kab. Bungo	1			
		Kab. Tebo	1			
12	Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu	20	80	100	Berhasil
	(TP Provinsi)	Kab. Muara Enim	10			
		Kab. OKU Timur	15			
		Kab. Musirawas	20			
		Kab. Musi Rawas Utara	10			
		Kota Lubuk Linggau	5			
13	Provinsi Lampung	Kab. Lampung Selatan	22	212	100	Berhasil
	(TP Provinsi)	Kab. Lampung Tengah	20			

No	Provinsi	Kabupaten	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	%	Kategori
		Kab. Tulang Bawang	20			
		Kab. Tanggamus	20			
		Kab. Pringsewu	20			
		Kab. Lampung Timur	20			
		Kab. Lampung Barat	40			
		Kab. Pesisir Barat	40			
		Kota Metro	10			
14	Provinsi Bengkulu	Kab. Kepahiang	50	50	100	Berhasil
	TP Provinsi	Kab. Rejanglebong	20	40	100	Berhasil
		Kab. Mukomuko	20			
15	Provinsi Bangka Belitung (TP Provinsi)	Kab. Bangka Tengah	25	25	100	Berhasil
16	Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Sambas	35	35	100	Berhasil
	TP Provinsi	Kab. Bengkayang	30	120	100	Berhasil
		Kab. Kubu Raya	20			
		Kab. Sanggau	20			
		Kab. Mempawah	30			
		Kab Landak	20			
17	Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas	20	192	100	Berhasil
		Kab. Kotawaringin Timur	22			
		Kab. Kotawaringin Barat	20			
		Kab. Gunung Mas	15			
		Kab. Barito Timur	20			
		Kab. Barito Utara	20			
		Kab. Pulang Pisau	20			
		Kab. Murung Raya	15			
		Kota Palangkaraya	20			
		Kab. Seruyan	20			

No	Provinsi	Kabupaten	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	%	Kategori
18	Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Tapin	52	174	100	Berhasil
		Kab. Hulu Sungai Selatan	52			
		Kab. Tanah Laut	50			
		Kab. Tabalong	20			
19	Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Paser	25	76	100	Berhasil
		Kab. Berau	20			
		Kab. Kutai Kartanegara	27			
		Kab. Samarinda	2			
		Kota Balikpapan	2			
20	Provinsi Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	20	20	100	Berhasil
		Kab. Bulungan	20	20	100	Berhasil
	TP Provinsi	Kota Tarakan	10	10	100	Berhasil
21	Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Minahasa	50	50	100	Berhasil
		Kab. Minahasa Selatan	45	50	100	Berhasil
		Kab. Kep. Sangihe	5			
22	Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	30	30	100	Berhasil
	TP Provinsi	Kab. Sigi	32	134	100	Berhasil
		Kota Palu	30			
		Kab. Poso	30			
		Kab. Parigi Moutong	22			
		Kab. Toli-toli	20			
23	Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Bone	22	22	100	Berhasil
		Kab. Jeneponto	32	32	100	Berhasil
		Kab. Enrekang	152	150	99	Berhasil
		Kab. Bantaeng	50	50	100	Berhasil
	TP Provinsi	Kab. Pinrang	22	193	100	Berhasil

No	Provinsi	Kabupaten	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	%	Kategori
		Kab. Gowa	22			
		Kab. Maros	52			
		Kab. Takalar	22			
		Kota. Palopo	25			
		Kab. Sinjai	50			
24	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Utara	25	75	100	Berhasil
	(TP Provinsi)	Kab. Kolaka Timur	25			
		Kab. Buton Selatan	25			
25	Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Majene	77	77	100	Berhasil
	TP Provinsi	Kab. Mamuju	12	42	100	Berhasil
		Kab. Mamasa	10			
		Kab. Polewali Mandar	20			
26	Provinsi Gorontalo	Kab. Gorontalo	27	50	100	Berhasil
	(TP Provinsi)	Kab. Boalemo	23			
27	Provinsi Maluku	Kab. Maluku Tengah	22	95	100	Berhasil
	(TP Provinsi)	Kab. Maluku Tenggara	32			
		Kab. Seram Bagian Barat	10			
		Kota Ambon	9			
		Kab. Pulau Buru	12			
		Kab. Maluku Barat Daya	10			
28	Provinsi Maluku Utara	Kab. Halmahera Selatan	20	62	100	Berhasil
	(TP Provinsi)	Kota Tidore Kepulauan	22			
		Kab. Pulau Morotai	20			
29	Provinsi Bali	Kab. Tabanan	20	20	100	Berhasil
	TP Provinsi	Kab. Buleleng	20	170	100	Berhasil
		Kab. Karangasem	50			

No	Provinsi	Kabupaten	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	%	Kategori
		Kab. Bangli	100			
30	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Timur	80	80	100	Berhasil
		Kab. Sumbawa	80	80	100	Berhasil
	(TP Provinsi)	Kab. Sumbawa Barat	20	85	100	Berhasil
		Kab. Lombok Utara	20			
		Kab. Dompu	25			
		Kota Mataram	20			
31	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	60	60	100	Berhasil
	TP Provinsi	Kab. Kupang	34	303	100	Berhasil
		Kab. Manggarai	20			
		Kab. Rote Ndao	22			
		Kab. Manggarai Barat	32			
		Kab. Melaka	100			
		Kab. Lembata	15			
		Kab. Sikka	15			
		Kab. Flores Timur	15			
		Kab. Ngada	15			
		Kab. Sumba Timur	15			
		Kab. Sabu Raijua	20			
32	Provinsi Papua	Kab. Merauke	15	15	100	Berhasil
	TP Provinsi	Kab. Jayawijaya	15	25	100	Berhasil
		Kab. Nabire	10			
33	Provinsi Papua Barat (TP Provinsi)	Kab. Tambrau	15	15	100	Berhasil
TOTAL KAWASAN BAWANG MERAH			5.493	5.434	98,93	Berhasil

Lampiran 5. Capaian Produksi Bawang Putih Tahun 2018 Per Provinsi

No	Provinsi	Kabupaten	Luasan (Ha)	Realisasi (Ha)	% Realisasi	Kategori
1	Jawa Barat	Kab. Bandung	30	30	100,00	Berhasil
		Kab. Garut	20	20	100,00	Berhasil
		Kab. Majalengka	50	50	100,00	Berhasil
		Kab. Sumedang	15	15	100,00	Berhasil
		Kab. Cianjur	30	30	100,00	Berhasil
	TP Provinsi	Kab. Bandung Barat	10	20	100,00	Berhasil
		Kab. Ciamis	5			
		Kab. Kuningan	5			
	* Jumlah		165	165		
2	Jawa Tengah	Kab. Magelang	300	300	100,00	Berhasil
		Kab. Karanganyar	7	7	100,00	Berhasil
		Kab. Batang	50	50	100,00	Berhasil
		Kab. Temanggung	1.930	1930	100,00	Berhasil
	TP Provinsi	Kab. Tegal	70	9	12,86	Kurang Berhasil
		Kab. Wonosobo	50	50	100,00	Berhasil
		Kab. Banjarnegara	30	30	100,00	Berhasil
		Kab. Cilacap	10	10	100,00	Berhasil
		Kab. Pemalang	20	0	-	Tidak Berhasil
		Kab. Pekalongan	10	10	100,00	Berhasil
	* Jumlah		2.477	2.396		
3	Jawa Timur	Kab. Bondowoso	50	50	100,00	Berhasil
		Kab. Malang	30	30	100,00	Berhasil
		Kab. Lumajang	50	0	-	Tidak Berhasil
		Kab. Banyuwangi	25	25	100,00	Berhasil
		Kab. Probolinggo	50	50	100,00	Berhasil
	TP Provinsi	Kota Batu	25	55	100,00	Berhasil
		Kab. Magetan	30			

No	Provinsi	Kabupaten	Luasan (Ha)	Realisasi (Ha)	% Realisasi	Kategori
	* Jumlah		260	210		
4	Aceh (TP Provinsi)	Kab. Bener Meriah	10	20	100,00	Berhasil
		Kab. Gayo Lues	10			
	* Jumlah		20	20		
5	Sumatera Barat	Kab. Solok	30	30	100,00	Berhasil
	TP Provinsi	Kab. Agam	20	56	93,33	Berhasil
		Kab. Tanah Datar	20			
		Kab. Solo Selatan	20			
	* Jumlah		90	86		
6	Sumatera Utara	Kab. Simalungun	50	50	100,00	Berhasil
	TP Provinsi	Kab. Karo	20	100	100,00	Berhasil
		Kab. Samosir	10			
		Kab. Madailing Natal	10			
		Kab. Dairi	10			
		Kab. Humbahas	50			
	* Jumlah		150	150		
7	Jambi (TP Provinsi)	Kab. Kerinci	10	25	100,00	Berhasil
		Kab. Merangin	15			
	* Jumlah		25	25		
8	Bengkulu	Kab. Kepahiang	25	25	100,00	Berhasil
		Kab. Rebong Lebong	10	10	100,00	Berhasil
	* Jumlah		35	35		
9	Sumatera Selatan (TP Provinsi)	Kab. Pagar Alam	20	70	100,00	Berhasil
		Kab. Muara Enim	50			
	* Jumlah		70	70		
10	Lampung (TP Provinsi)	Kab. Lampung Barat	10	30	100,00	Berhasil
		Kab. Tanggamus	20			
	* Jumlah		30	30		

No	Provinsi	Kabupaten	Luasan (Ha)	Realisasi (Ha)	% Realisasi	Kategori
11	Bali	Kab. Tabanan	50	50	100,00	Berhasil
	(TP Provinsi)	Kab. Bangli	20	30	100,00	Berhasil
		Kab. Buleleng	10			
	* Jumlah		80	80		
12	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Timur	1.642	1.642	100,00	Berhasil
		Kab. Sumbawa	75	75	100,00	Berhasil
	* Jumlah		1.717	1.717		
13	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	25	25	100,00	Berhasil
	(TP Provinsi)	Kab. Timur Tengah Selatan	75	50	13,89	Kurang Berhasil
		Kab. Malaka	25			
		Kab. Ngada	15			
		Kab. Ende	15			
		Kab. Manggarai	20			
		Kab. Manggarai Timur	25			
		Kab. Sikka	40			
		Kab. Sumba Barat	30			
		Kab. Sumba Barat Daya	20			
		Kab. Timur Tengah Utara	50			
		Kab. Sumba Timur	20			
		Kab. Manggarai Barat	25			
	* Jumlah		385	75		
14	Sulawesi Selatan	Kab. Bantaeng	50	17,5	36,00	Kurang Berhasil
		Kab. Enrekang	80	80	100,00	Berhasil
		Kab. Jeneponto	10	10	100,00	Berhasil
		Kab. Bone	10	10	100,00	Berhasil
	(TP Provinsi)	Kab. Sinjai	10	60	100,00	Berhasil
		Kab. Barru	10			
		Kab. Pangkep	10			

No	Provinsi	Kabupaten	Luasan (Ha)	Realisasi (Ha)	% Realisasi	Kategori
		Kab. Pinrang	20			
		Kab. Gowa	10			
	* Jumlah		210	177,5		
15	Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	35	35	100,00	Berhasil
	TP Provinsi	Kab. Sigi	30	110	100,00	Berhasil
		Kab. Banggai	30			
		Kab. Poso	50			
	* Jumlah		145	145		
16	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa	35	14	40,00	Kurang Berhasil
		Kab. Minahasa Selatan	35	35	100,00	Berhasil
	* Jumlah		70	49		
17	Papua	Kab. Lanny Jaya	10	10	100,00	Berhasil
	* Jumlah		10	10		
18	Papua Barat	Kab. Pegunungan Arfak	10	10	100,00	Berhasil
	* Jumlah		10	10		
		TOTAL	5.949	5.451	91,62	Berhasil

**Lampiran 6. Capaian Produksi Sayuran dan Buah-Buahan Program
#Bekerja Tahun 2018**

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Komoditas	Target (ha)	Realisasi (ha)	%	Kategori
1	Jawa Barat	Indramayu	Mangga	250	0	0	Kurang Berhasil
			Sayuran	120	0	0	Kurang Berhasil
		Cirebon	Mangga	200	57,48	28,74	Berhasil
			Pepaya	18	14,67	81,5	Berhasil
			Sayuran	60	39,27	65,45	Berhasil
		Tasikmalaya	Manggis	314	314	100	Berhasil
			Pepaya	27	27	100	Berhasil
			Sayuran	80	80	100	Berhasil
		Garut	Manggis	497	345	69,42	Berhasil
			Sayuran	120	120	100	Berhasil
		Cianjur	Pisang	1	1	100	Berhasil
			Sayuran	4	4	100	Berhasil
2	Jawa Tengah	Banyumas	Pisang	39	0	0	Kurang Berhasil
			Sayuran	80	0	0	Kurang Berhasil
		Purbalingga	Pisang	44	44	100	Berhasil
			Sayuran	85	0	0	Kurang Berhasil
		Brebes	Pisang	122	0	0	Kurang Berhasil
			Sayuran	290	290	100	Berhasil
3	Jawa Timur	Bondowoso	Sayuran	125	125	100	Berhasil
		Jember	Sayuran	215	0	0	Kurang Berhasil
		Lumajang	Mangga	250	250	100	Berhasil
			Sayuran	125	125	100	Berhasil
4	Sulawesi Selatan	Bone	Pisang	54	0	0	Berhasil
			Sayuran	20	20	100	Berhasil
		Tana Toraja	Sayuran	50	50	100	Berhasil
		Toraja Utara	Sayuran	20	20	100	Berhasil
		Soppeng	Mangga	150	150	100	Berhasil
			Sayuran	47	47	100	Berhasil
		Takalar	Mangga	100	100	100	Berhasil
			Sayuran	33	33	100	Berhasil

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Komoditas	Target (ha)	Realisasi (ha)	%	Kategori
5	Sumatera Utara	Langkat	Pisang	16	16	100	Berhasil
			Sayuran	35	35	100	Berhasil
6	Sumatera Selatan	OKI	Duku	100	0	0	Berhasil
			Sayuran	45	45	100	Berhasil
7	Lampung	Lampung Selatan	Pepaya	20	24,52	122,6	Sangat Berhasil
			Sayuran	60	60	100	Berhasil
8	Banten	Pandeglang	Manggis	69	69	100	Berhasil
			Pepaya	9	9	100	Berhasil
			Sayuran	20	20	100	Berhasil
9	Kalimantan Selatan	HSU	Mangga	50	50	100	Berhasil
			Sayuran	20	20	100	Berhasil
10	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	Pepaya	26	26	100	Berhasil
			Sayuran	110	110	100	Berhasil
Total				4.120	2.740,94	66,53	Cukup Berhasil
Sayuran				1.764	1.243,27	70,48	Cukup Berhasil
Buah				2.356	1.497,67	63,57	Cukup Berhasil

Lampiran 7. Hasil Pengujian Analisa Residu Pestisida Pada Komoditas Cabai, Bawang Merah dan Sayuran Lainnya

No	Komoditas	Bahan Aktif	Sampel Terdeteksi			TD	Ket
			<BMR	>BMR	BD (*)		
1	Bawang merah	Permethrin	-	-	-	1	BP = 0.020 mg/kg)
		Azoksitrobin	-	-	-	1	BP = 0.020 mg/kg)
		Difenoconazol	-	-	-	1	BP = 0.010 mg/kg)
		Metomil	-	-	-	1	BP = 0.025 mg/kg)
		Abamektin	-	-	-	1	BP = 0.050 mg/kg)
		Dichlorvos	-	-	-	1	BP = 0.01135 mg/kg)
		Chlorpyrifos	-	-	1	-	0.0043
2	Paprika	Isoprocarb / MIPC	-	-	-	1	BP = 0.001 mg/kg)
		Abamektin	-	-	-	1	BP = 0.020 mg/kg)
		Dimetoat	-	-	-	1	BP = 0.020 mg/kg)
		Imidacloprid	-	-	1	-	0.2500
3	Cabai	Methomyl	-	-	-	1	BP = 0.010 mg/kg)
		Azinphos-methyl	-	-	-	1	BP = 0.0066 mg/kg)
		Dimethoat	-	-	-	1	BP = 0.00132 mg/kg)
		Tebuconazol	-	-	1	-	1.7967
4	Buncis	Difenoconazol	-	-	-	1	BP = 0.020 mg/kg)
5	Brokoli	Difenoconazol	-	-	-	1	BP = 0.020 mg/kg)
6	Sawi	Fipronil	-	-	1	-	0.1442
		Difenoconazol	-	-	1	-	0.7599
7	Sawi putih	Abamectin	-	-	-	1	BP = 0.0011 mg/kg)
		Difenoconazol	-	-	1	-	0.0145
8	Pakcoy	Isoprocarb / MIPC	-	-	-	1	BP = 0.001 mg/kg)
9	Bawang daun	Difenoconazol	-	-	-	1	BP = 0.002 mg/kg)
		Profenofos	-	-	-	1	BP = 0.00098 mg/kg)
10	Kubis	Profenofos	-	-	-	1	BP = 0.00098 mg/kg)
11	Caisin	Profenofos	-	-	1	-	4.437
12	Daun katuk	Methomyl	-	-	-	1	BP = 0.0010 mg/kg)
Jumlah		27 bahan aktif	0 (0%)	0 (0%)	7 (25.93%)	20 (74.07%)	27 bahan aktif

Keterangan:

BD (*) = Belum Ditetapkan dengan Nilai BMR kandungan bahan Bahan aktif pada komoditas tersebut belum ditetapkan oleh Menteri Pertanian (Permentan No.55/Permentan/KR.040/11/2016) tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan.

TD = Tidak Terdeteksi

BP = Batas Penetapan